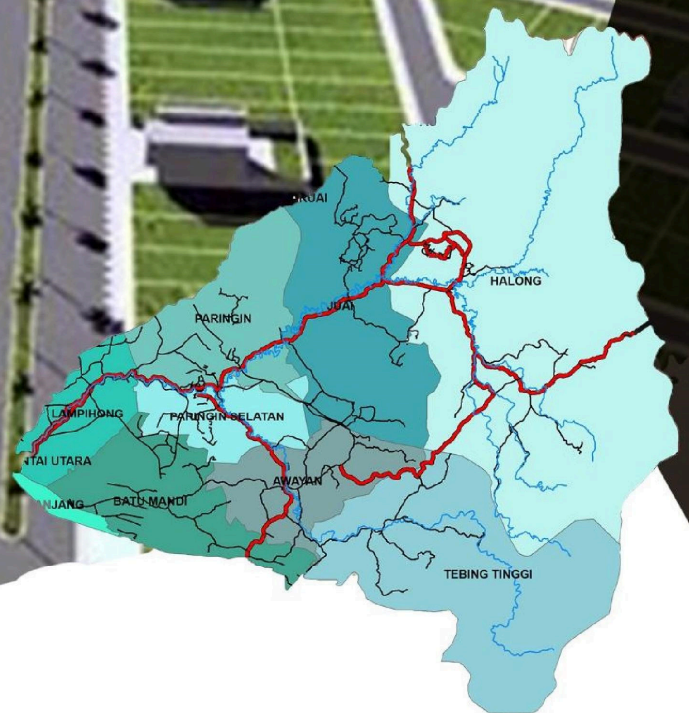




LAPORAN AKHIR PENELITIAN



KAJIAN PEMETAAN ZONASI TANAH DENGAN GEOTAG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

PENYUSUN:
TIM LPPM ULM

**KAJIAN PEMETAAN ZONASI TANAH DENGAN GEOTAG
UNTUK MENINGKATKAN PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**

Tim Peneliti LPPM ULM

KERJA SAMA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
BALANGAN**

DENGAN



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4 Sasaran Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Zonasi Nilai Tanah (ZNT)	11
2.2 Geotag	11
2.3 Penghasilan Asli Daerah (PAD)	12
2.3.1 Pengertian Penghasilan Asli Daerah (PAD)	12
2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13
2.4 Pajak	14
2.4.1 Pengertian Pajak	14
2.4.2 Pajak Daerah	16
2.4.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17
2.4.4 Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan PPh	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Metode Penelitian	21
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.3. Teknik Pengumpulan Data	21
3.4. Tahapan Penelitian	23
3.5. Teknik Analisis Data	23
3.6. Kerangka Berpikir	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Kondisi Umum Kabupaten Balangan	27
4.1.1. Sejarah	27
4.1.2. Kondisi Geografis	28
4.1.2.1. Letak, Luas, dan Batas	28
4.1.2.2. Iklim	30
4.1.2.3. Tanah	31
4.1.2.4. Topografi	33
4.1.3. Kependudukan	34
4.1.4. Ekonomi	36
4.1.5. Infrastruktur Jalan	40
4.1.6. Transportasi	42
4.1.7. Listrik	44
4.1.8. Telekomunikasi	44
4.1.9. Air Minum	45

4.1.10. Persampahan	47
4.2 Potensi Sumberdaya Alam Kabupaten Balangan	48
4.2.1. Potensi Wilayah (Geografis)	48
4.2.2. Potensi Sumberdaya Geologis.....	50
4.2.3. Potensi Kependudukan.....	55
4.2.4. Potensi Ekonomi.....	55
4.2.5. Penggunaan Lahan	56
4.2.5. Rencana Tata Ruang	59
4.3. NIR (Nilai Indikasi Rata-rata)	64
4.4. Keluaran Laporan	65
4.5. Peta Lokasi Survey	67
4.6. Data Resume Hasil Survey.....	72
4.6.1. NIR Harga Bumi	72
4.6.2. Nilai Objek Pajak Bangunan	75
4.6.3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	78
4.7. Rekapitulasi.....	81
4.8. Potential Loss Pada Berbagai Skenario Peningkatan NJOP BB	85
BAB V PENUTUP	89
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Daftar Penjabat dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Balangan	27
Tabel 4. 2. Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Balangan	29
Tabel 4. 3. Tanah Kabupaten Balangan	31
Tabel 4. 4. Topografi Wilayah Kabupaten Balangan.....	33
Tabel 4. 5. Kondisi Kependudukan Kabupaten Balangan	35
Tabel 4. 6. Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Balangan	35
Tabel 4. 7. Perkembangan PDRB Kabupaten Balangan menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	36
Tabel 4. 8. Kegiatan Utama Penduduk Kabupaten Balangan	37
Tabel 4. 9. Jumlah Klasifikasi UMKM	38
Tabel 4. 10. Klaster UMKM Kabupaten Balangan.....	38
Tabel 4. 11. Jenis Sarana Perdagangan di Kabupaten Balangan.....	39
Tabel 4. 12. Golongan Pengeluaran Perkapita Perbulan Masyarakat Balangan	39
Tabel 4. 13. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Balangan 2015 - 20120.....	40
Tabel 4. 14. Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Balangan.....	41
Tabel 4. 15. Panjang Jalan menurut TKewenangan Pemerintahan di Kabupaten Balangan....	42
Tabel 4. 16. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Balangan	43
Tabel 4. 17. Persebaran Pelanggan Air Minum Kabupaten Balangan Tahun 2019.....	46
Tabel 4. 18. Perkembangan Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Dharma Kabupaten Balangan Tahun 2015 - 2020.....	47
Tabel 4. 19. Formasi Geologi Kabupaten Balangan	51
Tabel 4. 20. Distribusi Formasi Geologi menurut Wilayah Kecamatan Kabupaten Balangan	53
Tabel 4. 21. Obyek Wisata Kabupaten Balangan yang berada di wilayah KPH Balangan	55
Tabel 4. 22. Penggunaan Lahan Kabupaten Balangan.....	56
Tabel 4. 23. Luas Komoditas Perkebunan Kabupaten Balangan	57
Tabel 4. 24. Jumlah Produksi Perkebunan (ton) Kabupaten Balangan.....	58
Tabel 4. 25. Produktivitas Komoditas Perkebunan Kabupaten Balangan.....	58
Tabel 4. 26. Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Balangan	59
Tabel 4. 27. Produktivitas Tanaman Sayur-Sayuran.....	59
Tabel 4. 28. Rencana Pola Ruang Kabupaten Balangan	60
Tabel 4. 29. Pembagian Blok KPH Balangan	61
Tabel 4. 30. Kawasan Strategis Kabupaten Balangan (KSK)	62
Tabel 4. 31. Contoh Format Laporan Untuk Buku 1 Data Awal PBB-P2 Sebelum Dilakukan Updating dan Revaluasi Nilai Objek Pajak PBB-P2 di Kabupaten Balangan Tahun 2022.....	65
Tabel 4. 32. Contoh Format Laporan Untuk Buku 2 Data Hasil Setelah Dilakukan Updating dan Revaluasi Nilai Objek Pajak PBB-P2 di Kabupaten Balangan Tahun 2022.	66
Tabel 4. 33. Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) Harga Tanah Hasil Updating Berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Timur, Tahun 2022	73
Tabel 4. 34. Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) Harga Tanah Hasil Updating Berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Kota, Tahun 2022	74

Tabel 4. 35. Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) Harga Tanah Hasil Updating Berdasarkan RT di Kelurahan Batu Piring, Tahun 2022	75
Tabel 4. 36. Nilai Bangunan Hasil Pembaharuan Data Berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Timur, Tahun 2022	76
Tabel 4. 37. Nilai Bangunan Hasil Pembaharuan Data Berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Kota Tahun 2022.....	77
Tabel 4. 38. Nilai Bangunan Hasil Pembaharuan Data Berdasarkan RT di Kelurahan Batu Piring Tahun 2022	78
Tabel 4. 39. BPHTB berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Timur di Kabupaten Balangan.	79
Tabel 4. 40. BPHTB Berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Kota di Kabupaten Balangan ..	80
Tabel 4. 41. BPHTB Berdasarkan RT di Kelurahan Batu Piring di Kabupaten Balangan	81
Tabel 4. 42. Perubahan NIR Bumi Setelah Pembaharuan Data di 3 Kelurahan Kabupaten Balangan Tahun 2022	82
Tabel 4. 43. Perubahan Nilai Bangunan Setelah Pembaharuan Data Di 3 Kelurahan di Kabupaten Balangan Tahun 2022	82
Tabel 4. 44. Perubahan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Setelah Pembaharuan Data di 3 Kelurahan Kabupaten Balangan, Tahun 2022	83
Tabel 4. 45. Potensi Kerugian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bila Dilakukan Penyesuaian Kenaikan 100% Di 3 Kelurahan di Kabupaten Balangan, Tahun 2022	86
Tabel 4. 46. Potensi Kerugian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)/(M2) Bila Dilakukan Penyesuaian Kenaikan Bertahap 75% Dan 100% di 3 Kelurahan di Kabupaten Balangan, Tahun 2022	86
Tabel 4. 47. Potensi Kerugian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)/(M2) Bila Dilakukan Penyesuaian Kenaikan Bertahap 50%, 75%, Dan 100% di 3 Kelurahan Kabupaten Balangan Tahun 2022.....	87
Tabel 4. 48. Potensi Kerugian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)/(M2) Bila Dilakukan Penyesuaian Kenaikan Bertahap 25%, 50%, 75%, Dan 100% di 3 Kelurahan Kabupaten Balangan Tahun 2022.....	87
Tabel 4. 49. Potensi Kerugian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bila Tidak Dilakukan Penyesuaian Kenaikan PBB di 3 Kelurahan Kabupaten Balangan Tahun 2022..	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Kerangka Berpikir	27
Gambar 4. 1. Peta Administrasi Kabupaten Balangan	30
Gambar 4. 2. Persebaran Tanah di Kabupaten Balangan	32
Gambar 4. 3. Peta Topografi Kabupaten Balangan.....	34
Gambar 4. 4. Kondisi Jalan Rata-Rata Tahun 2015-2020.....	40
Gambar 4. 5. Rata-Rata Kondisi Jalan menurut Permukaan tahun 2015-2020.....	41
Gambar 4. 6. Komposisi Jenis Kendaraan Roda 4 di Kabupaten Balangan	43
Gambar 4. 7. Pintu Gerbang Terminal Paringin, Kabupaten Balangan	44
Gambar 4. 8. Kategori Pelanggan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Balangan.....	46
Gambar 4. 9. Tren Jumlah Pelanggan dan Penduduk Terlayani Air Minum PDAM Tirta Dharma Kabupaten Balangan	47
Gambar 4. 10. Wisata Sungai Maranting Desa Gunung Batu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.	50
Gambar 4. 11. Peta Geologi Kabupaten Balangan.....	52
Gambar 4. 12. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Balangan	57
Gambar 4. 13. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Balangan	61
Gambar 4. 14. Peta Lokasi Survey Kabupaten Balangan	67
Gambar 4. 15. Peta Sebaran Titik Sampel Zonasi Nilai Tanah Kabupaten Balangan	68
Gambar 4. 16. Peta Titik Sampel ZNT Kelurahan Batu Piring.....	69
Gambar 4. 17. Peta Titik Sampel ZNT Kelurahan Paringin Kota.....	70
Gambar 4. 18. Peta Titik Sampel ZNT Kelurahan Paringin Timur	71
Gambar 4. 19. Peta Zonasi Nilai Tanah Kabupaten Balangan	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Survey Lapangan (Nilai Bumi/Tanah)	94
Lampiran 2. Data Survey Lapangan (Nilai Bangunan).....	106
Lampiran 3. Dokumentasi Hasil Survey	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Hal ini menjadi sangat penting karena tanah menjadi tempat bermukimnya manusia serta tempat tumbuh dan berkembangnya hewan serta tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupannya. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia serta terjadinya transformasi ekonomi berimplikasi terhadap semakin luasnya tanah yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia (Prasada & Rosa 2018). Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dalam perkembangannya kebutuhan manusia akan tanah dirasa semakin meningkat. Hal tersebut secara realitas dapat kita lihat dari luas penguasaan dan kepemilikan tanah yang semakin lama cenderung semakin menyempit, baik tanah pertanian maupun non pertanian. Inilah bentuk realitas nyata dari kebutuhan tanah yang semakin meningkat sedangkan supply tanah relatif terbatas. Dalam ilmu ekonomi suatu pasar dikatakan seimbang apabila barang yang ditawarkan dapat memenuhi permintaan yang ada. Untuk tanah hal tersebut sulit tercapai, karena kebutuhan akan tanah cenderung selalu meningkat, sedangkan di sisi lain luas tanah yang ditawarkan (tersedia), tidak bertambah bahkan cenderung tetap, sehingga pasar tanah yang ada mewujudkan bahwa semakin lama harga dan nilai tanah selalu akan meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini jika tidak diatur dan dikendalikan akan berakibat pada terbentuknya pasar monopsoni.

Sebagai daerah perlintasan antar provinsi Kabupaten Balangan khususnya Kota Paringin memiliki perkembangan kegiatan komersial yang cukup signifikan. Pola perkembangan wilayah Kabupaten Balangan khususnya Kota Paringin adalah secara linier yakni disepanjang jalan utama. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Balangan menjadikan kebutuhan akan tanah semakin meningkat.. Perkembangan sebuah daerah akan berdampak pada harga dan nilai tanah. Tanah yang memiliki lokasi strategis dan dilengkapi dengan fasilitas umum maka harga dan nilai tanah akan semakin tinggi.

Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui penggalan potensi pajak dan retribusi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melalui penggalan pajak dan objek pajak potensial adalah yang berada di kawasan perkotaan, memiliki aksesibilitas baik dan lokasi strategis. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu gambaran potensi keuangan suatu daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian, khususnya pada Sub Bidang Pendapatan dan Investasi Daerah diketahui bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam melaksanakan tugas pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 100% akan masuk ke Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan :

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui penggalan potensi pajak dan retribusi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melalui penggalan pajak yang berhubungan dengan tanah yakni PBB dan BPHTP. Obyek pajak potensial adalah yang berada di kawasan perkotaan, memiliki aksesibilitas baik dan lokasi strategis.

Pajak Bumi dan Bangunan (disingkat PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Sistem dan prosedur pemungutan PBB-P2 Kabupaten Balangan mempedomani Peraturan Bupati Balangan Nomor 6 Tahun 2014.

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan besarnya pajak PBB yang harus dibayar. Hal itu adalah Nilai Jual Objek Kena Pajak (NJOP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), serta Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP). Bagian jumlah besaran tarif pajak, pajak PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5 persen. Menurut Pasal 6 UU No. 12 tahun 1985, UU No. 12 Tahun 1994, serta PP No.25 Tahun 2002. Dasar dari penghitungan pajak PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yang berarti persentase tertentu dari nilai jual yang sebenarnya. NJKP sendiri sudah ditetapkan bahwa nilai yang paling rendah adalah 20% dan setinggi-tingginya 100%.

Besaran NJKP telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional. Persentase NJKP ditetapkan melalui Rincian KMK Nomor

201/KMK.04/2000, yaitu 40% untuk objek pajak perkebunan, objek pajak pertambangan, dan objek pajak kehutanan. Untuk rumah dan apartemen yang terkait dengan Pajak Perdesaan dan Perkotaan, objek ini dilihat dari nilai NJOP-nya. Jika NJOP lebih besar dari 1 miliar rupiah, persentase NJKP adalah 40% dan jika NJOP di bawah 1 miliar Rupiah, persentase NJKP adalah 20%.

Sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sendiri adalah harga rata-rata harga pasar dalam transaksi jual beli tanah. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dan dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Ada banyak faktor yang dapat menentukan NJOP, faktor itu adalah lokasi, pemanfaatan, bahan bangunan, teknik, serta kondisi lingkungan.

Keberadaan NJOP diharapkan menjadi referensi nilai dan harga tanah secara eksplisit belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi nilai pasar tanah. Harga nilai tanah merupakan informasi yang penting untuk keputusan manajemen baik sektor pemerintah maupun swasta. Sektor pemerintah, membutuhkan informasi nilai tanah sebagai dasar pengenaan atas Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan kepada masyarakat. Sektor swasta, membutuhkan informasi mengenai nilai tanah guna menentukan lokasi perumahan dan sebagai dasar untuk menentukan faktor penyesuaian (adjustment) dalam analisisnya.

Klasifikasi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 Kabupaten Balangan berdasarkan pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2014 dan SK Bupati Balangan Nomor 188.45/859/Kum Tahun 2020 tentang Penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dan penetapan PBB-P2 terendah di Kabupaten Balangan. NJOP yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, seharusnya sesuai dengan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Apabila NJOP tidak sesuai dengan NIR, maka NIR

yang seharusnya dapat mewakili nilai tanah, tidak dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona tertentu. Zona tersebut merupakan zona geografis yang terdiri atas sekelompok bidang tanah yang memiliki nilai tanah sama, sehingga disebut juga Zona Nilai Tanah (ZNT). NIR yang tidak dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona tersebut, akan mengakibatkan tidak sesuai pembentukan ZNT, sehingga akan terjadi ketidaksesuaian terhadap penetapan PBB pada beberapa bidang tanah.

Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan PPh adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. PPh yang dimaksud adalah pajak penghasilan atas tanah. Perolehan Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Objek Pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan tersebut salah satunya adalah penunjukkan pembeli dalam lelang. Subjek dan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Berkenaan dengan hal tersebut maka pembeli tanah atau bangunan baik pribadi atau Badan yang ditunjuk dalam lelang wajib membayar BPHTB. Tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk Kabupaten Balangan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang BPHTB. Namun sesuai dengan pasal 88 UU No.28/2009, tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP merupakan nilai pengurang NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Besaran NPOPTKP ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan sesuai pasal 87 ayat 4 UU No.28/2009 ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Golberg dan Chiloym (1990) dikutip dalam Ernawati 2005 menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai tanah dengan karakteristik yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Karakteristik Fisik, menyangkut kemiringan tanah, ketinggian, bentuk, jenis tanah dan luas dari area tertentu.
- b. Karakteristik Lokasional, lokasi suatu tanah perkotaan berkaitan dengan penggunaan tanah yang dapat dilakukan di atas tanah tersebut, berupa kegiatan ekonomi (perdagangan dan jasa) dan sosial.
- c. Karakteristik Legal, dalam pengenalan keunikan tanah perkotaan dibentuk suatu institusi legal yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan, penempatan dan kepemilikan tanah perkotaan

Berdasarkan Surat Edaran Departemen Keuangan RI, Dirjen Pajak Nomor SE 55/PJ.6/1999 tentang Petunjuk Teknis Analisis Penentuan NIR (Nilai Indikasi Rata-rata), variabel yang menentukan nilai tanah adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Fisik (luas tanah, bentuk tanah, sifat fisik tanah seperti topografi, elevasi, pariwisata, banjir/ tidak banjir, kesuburan (untuk pertanian) dan sebagainya).
- b. Lokasi dan Aksesibilitas (jarak dari pusat kota, jarak dari fasilitas pendukung, lokasi secara spesifik tanah yang terletak dipojok/di tengah/tusuk sate, kemudahan pencapaian/ aksesibilitas, kelas jalan misal arteri/kolektor/lokal/setapak, kondisi lingkungan).

Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan area yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama, sekumpulan bidang tanah didalamnya yang batasannya bersifat imajiner ataupun nyata sesuai penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Zona

nilai tanah berkaitan dengan nilai jual sehingga akan menentukan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar penetapan besaran PBB-P2.

Peta ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zonamgeografis yang terdirimatas sekelompok objek pajak yang mempunyaiisatu Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang dibatasiioleh batas penguasaan atau kepemilikan objekmpajak dalam satumwilayah adminstrasi desa atau kelurahan. Skala peta ZNT dibuatiskala 1 : 2.000 atau 1 : 2.500 untukisektor pedesaan dan untuk daerah perkotaan skala 1 : 1.000 atauiskala yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan. Nilai tanah diantaranya digunakan untuk pendaftaran peralihan hak, pendaftaran SK perpanjangan dan pembaruan SK hak wajib nilai tanah yang ada pada peta zona nilai tanah Kantor pertanahan yang sudah disahkan.

Geotagging adalah sebuah proses untuk menambahkan konten identifikasi geografis. Geotagging juga bisa disebut sebagai sebuah bentuk dari geospatial metadata (Harvey, 2014). Proses geotagging berasal dari GPS yaitu berdasarkan dari garis lintang dan garis bujur atau latitude dan longitude. Geotagging mengijinkan proses pengindeksan pada suatu lokasi. Sebuah aplikasi yang memanfaatkan fitur dari geotagging biasanya menambahkan konten-konten media berupa koordinat latitude, longitude, jarak dan nama lokasi. Data yang ditambahkan terdiri dari fitur berupa teks dan visual.

GeoTagging menurut Surat edaran SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ/2015 tentang Pemetaan lokasi wajib pajak pribadi dan atau badan serta obyek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Geotagging adalah salah satu kegiatan pemetaan untuk merekam data lokasi dan data deskriptif dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak PBB, termasuk di dalamnya menambahkan foto lokasi dan/atau foto aset serta data pendukung lainnya. Namun peraturan tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku digantikan Peaturan Dirjen Pajak Nomor PER-08/PJ/2019 tentang tata cara pemberian, penyesuaian dan penghapusan obyek pajak PBB. Dalam rangka mengoptimalkan

dan meningkatkan penerimaan PAD dari PBB dan BPHTP yang mengacu dan menggunakan nilai tanah maka harus diawali dengan penyusunan kajian Pemetaan Zonasi Tanah dengan Geotag untuk meningkatkan PAD Kabupaten Balangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Gambaran Zonasi Nilai Tanah (ZNT) Kabupaten Balangan ?
2. Bagaimana Pemetaan Zonasi Nilai Tanah (ZNT) Dengan Geotag Untuk Dalam Meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Balangan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan umum pada penelitian ini yaitu mengkaji dan memetakan zonasi tanah dengan geotag dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Balangan. Sedangkan maksud dan tujuan khusus pada penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui Gambaran Zonasi Nilai Tanah (ZNT) Kabupaten Balangan.
2. Menyusun Pemetaan Zonasi Nilai Tanah (ZNT) Dengan Geotag Untuk Kabupaten Balangan.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD Kabupaten Balangan Melalui Pemetaan Zonasi Nilai Tanah (ZNT) Dengan Geotag.
4. Menjadi referensi bagi penilai pemerintah Kabupaten Balangan dalam meningkatkan PAD
5. Updating data nilai tanah serta dapat digunakan sebagai media informasi nilai tanah bagi pelaksanaan transaksi peralihan kepemilikan tanah.

1.4 Sasaran Penelitian

Sasaran kegiatan penyusunan Kajian Pemetaan Zonasi Tanah dengan Geotag untuk meningkatkan PAD sebagai berikut :

1. Identifikasi zonasi nilai tanah (ZNT) di Kabupaten Balangan tahun 2022 berdasarkan harga pasar dan NJOP
2. Identifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dibandingkan Nilai Indikasi rata-rata (NIR) berdasarkan harga pasar
3. Menggunakan instrumen geotagging untuk kemudahan akses dan penyajian informasi ZNT
4. Mengetahui dampak penerapan ZNT sebagai dasar pemungutan PBB dan BPHTP terhadap peningkatan PAD Kabupaten Balangan

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Kajian Pemetaan Zonasi Tanah dengan Geotag untuk meningkatkan PAD sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Wilayah/ Lokasi Studi

Ruang lingkup/ lokasi studi adalah Kabupaten Balangan, khususnya pada kawasan perkotaan Paringin yakni zona-zona yang memiliki intensitas kegiatan perekonomian tinggi, kemudahan aksesibilitas, lokasi strategis, dan lain-lain.

2. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi penyusunan Kajian Pemetaan Zonasi Tanah dengan Geotag untuk meningkatkan PAD meliputi :

1. Penetapan ruang lingkup kajian yakni menggali potensi penerimaan PAD dari PBB dan BPHTB dari daerah-daerah dengan intensitas kegiatan perekonomian/ bisnis tinggi di Kabupaten Balangan yakni di Kota Paringin (Kelurahan Paringin Kota, Paringin Timur dan Batu Piring
2. Identifikasi sampel ZNT di daerah kajian dilakukan dengan survei ke BPN sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan peta ZNT
3. Identifikasi harga pasar tanah di daerah kajian

4. Identifikasi NJOP di daerah kajian
5. Identifikasi kontribusi PBB-P2 dan BPHTB ke PAD Kabupaten Balangan
6. Identifikasi peningkatan PAD Kabupaten Balangan dengan penerapan PBB-P2 dan BPHTB berbasis Peta ZNT.

1.6 Manfaat Penelitian

Penerima manfaat Kajian Pemetaan Zonasi Tanah dengan Geotag untuk meningkatkan PAD adalah sebagai bahan pengambilan kebijakan pengenaan PBB-P2 dan BPHTB terintegrasi ZNT Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, update data ZNT Kantor Pertanahan, dll.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Zonasi Nilai Tanah (ZNT)

Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan area yang menggambarkan nilai tanah yang mrelatif sama, sekumpulan bidang tanah didalamnya yang batasannya bersifat imanijer ataupun nyata sesuai penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Zona nilai tanah berkaitan dengan nilai jual sehingga akan menentukan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar penetapan besaran PBB-P2.

Peta ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona mgeografis yang terdirimatas sekelompok objek pajak yang mempunyaiisatu Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang dibatasiioleh batas penguasaan atau kepemilikan objekmpajak dalam satumwilayah adminstrasi desa atau kelurahan. Skala peta ZNT dibuat dengan skala 1 : 2.000 atau 1 : 2.500 untukisektor pedesaan dan untuk daerah perkotaan skala 1i: 1.000 atauiskala yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan. Nilai tanah diantaranya digunakan untuk pendaftaran peralihan hak, pendaftaran SK perpanjangan dan pembaruan SK hak wajib nilai tanah yang ada pada peta zona nilai tanah Kantor pertanahan yang sudah disahkan.

2.2 Geotag

Geotagging adalah sebuah proses untuk menambahkan konten identifikasi geografis. Geotagging juga bisa disebut sebagai sebuah bentuk dari geospatial metadata (Harvey, 2014). Proses geotagging berasal dari GPS yaitu berdasarkan dari garis lintang dan garis bujur atau latitude dan longitude. Geotagging mengijinkan proses pengindeksan pada suatu lokasi. Sebuah aplikasi yang memanfaatkan fitur dari geotagging biasanya menambahkan konten-konten media berupa koordinat latitude, longitude, jarak dan nama lokasi. Data yang ditambahkan terdiri dari fitur berupa teks dan visual.

GeoTagging menurut Surat edaran SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ/2015 tentang Pemetaan lokasi wajib pajak pribadi dan atau badan serta obyek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Geotagging adalah salah satu kegiatan pemetaan untuk merekam data lokasi dan data deskriptif dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak PBB, termasuk di dalamnya menambahkan foto lokasi dan/atau foto aset serta data pendukung lainnya. Namun peraturan tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku digantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-08/PJ/2019 tentang tata cara pemberian, penyesuaian dan penghapusan obyek pajak PBB.

2.3 Penghasilan Asli Daerah (PAD)

2.3.1 Pengertian Penghasilan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Rudy Badrudin, 2011). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang

dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri :

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Syafrizal, 2014). Jenis pajak yang terdapat di kabupaten atau kota seperti 1) Pajak hotel, 2) Pajak restoran, 3) Pajak hiburan, 4) Pajak reklame, 5) Pajak penerangan jalan, 6) Pajak parkir, 8) Pajak lain-lainnya.

2. Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak

langsung (Mardiasmo, 2011). Retribusi daerah terbagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu ;
1) Retribusi jasa umum, 2) Retribusi jasa usaha, dan 3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.4 Pajak

2.4.1 Pengertian Pajak

Pajak Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pajak itu adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari barang yang diperdagangkan. Secara umum, pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan.

Menurut UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 1 ayat 1 (2007), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak beserta perangkat hukum untuk mengatur tata caranya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Secara singkat dan tegas, pernyataan tentang pajak tercantum dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Dikalangan para ahli perpajakan banyak memberi pengertian tentang pajak, namun maksud dan tujuannya tetap sama seperti yang dinyatakan oleh: Pengertian pajak menurut Soemitro (2002:129) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pendapatan diatas terdapat ciri-ciri mendasar tentang pajak sebagai berikut: Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau Peraturan Hukum lainnya, Pajak dipungut tanpa adanya kontraprestasi, Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan sisanya digunakan sebagai investasi, Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara (budgeter) juga berfungsi sebagai pengatur (regulair). Didalam rancangan struktur pajak yang baik adalah bagaimana prinsip-prinsip pajak yang bertujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat walaupun ini bukan sebagai fakta pengendali utama akan tetapi pemerataan secara umum diatur oleh Undang-Undang tentang pajak.

Fungsi pajak terbagi menjadi : 1) Fungsi budgetair, yaitu sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, 2) Fungsi regulierend, yaitu sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Adapun syarat pemungutan pajak : 1) Pajak harus adil (syarat keadilan), mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan. 3) Tidak mengganggu perkenomian (syarat ekonomis), pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan dalam perekonomian masyarakat. 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil), biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan. 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya (Kasirin, 2012).

2.4.2 Pajak Daerah

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang-orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Jenis Pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah dalam perda No. 8 Tahun 2002 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi, dari pemahaman diatas masyarakat dituntut kesadarannya untuk membayar kepada badan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memungut pajak dari masyarakat yang wajib pajak, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

2.4.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (disingkat PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Sistem dan prosedur pemungutan PBB-P2 Kabupaten Balangan mempedomani Peraturan Bupati Balangan Nomor 6 Tahun 2014. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan besarnya pajak PBB yang harus dibayar. Hal itu adalah Nilai Jual Objek Kena Pajak (NJOP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), serta Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP). Bagian jumlah besaran tarif pajak, pajak PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5 persen. Menurut Pasal 6 UU No. 12 tahun 1985, UU No. 12 Tahun 1994, serta PP No.25 Tahun 2002. Dasar dari penghitungan pajak PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yang berarti persentase tertentu dari nilai jual yang sebenarnya. NJKP sendiri sudah ditetapkan bahwa nilai yang paling rendah adalah 20% dan setinggi-tingginya 100%.

Besaran NJKP telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional. Persentase NJKP ditetapkan melalui Rincian KMK Nomor

201/KMK.04/2000, yaitu 40% untuk objek pajak perkebunan, objek pajak pertambangan, dan objek pajak kehutanan. Untuk rumah dan apartemen yang terkait dengan Pajak Perdesaan dan Perkotaan, objek ini dilihat dari nilai NJOP-nya. Jika NJOP lebih besar dari 1 miliar rupiah, persentase NJKP adalah 40% dan jika NJOP di bawah 1 miliar Rupiah, persentase NJKP adalah 20%. Sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sendiri adalah harga rata-rata harga pasar dalam transaksi jual beli tanah. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dan dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Ada banyak faktor yang dapat menentukan NJOP, faktor itu adalah lokasi, pemanfaatan, bahan bangunan, teknik, serta kondisi lingkungan.

Keberadaan NJOP diharapkan menjadi referensi nilai dan harga tanah secara eksplisit belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi nilai pasar tanah. Harga nilai tanah merupakan informasi yang penting untuk keputusan manajemen baik sektor pemerintah maupun swasta. Sektor pemerintah, membutuhkan informasi nilai tanah sebagai dasar pengenaan atas Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan kepada masyarakat. Sektor swasta, membutuhkan informasi mengenai nilai tanah guna menentukan lokasi perumahan dan sebagai dasar untuk menentukan faktor penyesuaian (adjustment) dalam analisisnya.

Klasifikasi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 Kabupaten Balangan berdasarkan pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2014 dan SK Bupati Balangan Nomor 188.45/859/Kum Tahun 2020 tentang Penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dan penetapan PBB-P2 terendah di Kabupaten Balangan. NJOP yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, seharusnya sesuai dengan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Apabila NJOP tidak sesuai dengan NIR, maka NIR yang seharusnya dapat mewakili nilai tanah, tidak dapat mewakili nilai tanah dalam suatu

zona tertentu. Zona tersebut merupakan zona geografis yang terdiri atas sekelompok bidang tanah yang memiliki nilai tanah sama, sehingga disebut juga Zona Nilai Tanah (ZNT). NIR yang tidak dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona tersebut, akan mengakibatkan tidak sesuainya pembentukan ZNT, sehingga akan terjadi ketidaksesuaian terhadap penetapan PBB pada beberapa bidang tanah.

2.4.4 Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan PPh

Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan PPh adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. PPh yang dimaksud adalah pajak penghasilan atas tanah. Perolehan Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Objek Pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan tersebut salah satunya adalah penunjukkan pembeli dalam lelang. Subjek dan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Berkenaan dengan hal tersebut maka pembeli tanah atau bangunan baik pribadi atau Badan yang ditunjuk dalam lelang wajib membayar BPHTB. Tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk Kabupaten Balangan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang BPHTB. Namun sesuai dengan pasal 88 UU No.28/2009, tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP merupakan nilai pengurang NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Besaran NPOPTKP ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan sesuai pasal 87 ayat 4 UU No.28/2009 ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Golberg dan Chiloym (1990) dikutip dalam Ernawati 2005 menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai tanah dengan karakteristik yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Karakteristik Fisik, menyangkut kemiringan tanah, ketinggian, bentuk, jenis tanah dan luas dari area tertentu.
- b. Karakteristik Lokasional, lokasi suatu tanah perkotaan berkaitan dengan penggunaan tanah yang dapat dilakukan di atas tanah tersebut, berupa kegiatan ekonomi (perdagangan dan jasa) dan sosial.
- c. Karakteristik Legal, dalam pengenalan keunikan tanah perkotaan dibentuk suatu institusi legal yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan, penempatan dan kepemilikan tanah perkotaan

Berdasarkan Surat Edaran Departemen Keuangan RI, Dirjen Pajak Nomor SE 55/PJ.6/1999 tentang Petunjuk Teknis Analisis Penentuan NIR (Nilai Indikasi Rata-rata), variabel yang menentukan nilai tanah adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Fisik (luas tanah, bentuk tanah, sifat fisik tanah seperti topografi, elevasi, pariwisata, banjir/ tidak banjir, kesuburan (untuk pertanian) dan sebagainya).
- b. Lokasi dan Aksesibilitas (jarak dari pusat kota, jarak dari fasilitas pendukung, lokasi secara spesifik tanah yang terletak dipojok/di tengah/tusuk sate, kemudahan pencapaian/ aksesibilitas, kelas jalan misal arteri/kolektor/lokal/setapak, kondisi lingkungan).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan termasuk pada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu. Penelitian deskriptif analitis bertujuan memaparkan hasil penelitian yang setail mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan rekomendasi upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Temuan lapangan akan dirangkai menjadi sebuah pemetaan Zonasi Nilai Tanah (ZTR) dengan geotag dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Balangan.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah seluruh desa, kelurahan dan kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian selama 90 hari kalender.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang bisa dikumpulkan dari SKPD terkait kajian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Kantor Pertanahan, Bappedalitbang, Bagian Hukum Setda Balangan. Informasi nilai tanah dan ketersediaan tanah diperlukan data diantaranya adalah

- a. Peta RBI, citra/ foto udara Kota Paringin
- b. Batas wilayah dari peta administrasi wilayah Kota Paringin
- c. Sampel peta Zona Nilai Tanah (ZNT)
- d. Harga pasar tanah kurun waktu 2 tahun dari Kantor Pertanahan
- e. Peta pendaftaran tanah
- f. Peta tematik pertanahan (peta penguasaan tanah)
- g. Peta guna lahan/ tutupan lahan
- h. Peta rencana tata ruang wilayah
- i. Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
- j. Data NJOP tanah wilayah studi dari BPKPAD

2. Data Regulasi

Data Regulasi yang berhubungan dengan PBB-P2, BPHTB, dan PAD di Kabupaten Balangan.

- a. Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- b. Peraturan Bupati Balangan Nomor 6 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- c. Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- e. SK Bupati Balangan Nomor 188.45/859/Kum Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan terendah di Kabupaten Balangan

3. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari survei di lapangan meliputi :

1. Data non spasial yakni data harga wajar tanah tahun 2022 di daerah penelitian (Kota Paringin)

3.4. Tahapan Penelitian

1. Pembuatan zona awal yakni dengan pembuatan garis batas imajiner diatas citra untuk mempermudah menentukan sampel yang akan diambil datanya dilapangan. Tahapan tersebut adalah dengan membuat buffer jalan yang akan menjadi zona tersendiri berdasarkan kesamaan sifat. Pembuatan batas zona awal terlebih dahulu melalui skoring lahan dengan memperhatikan faktor jarak lokasi dengan jalan, semakin dekat lokasi dengan jalan semakin tinggi skornya. Lokasi berada pada guna lahan apa, dimana lokasi guna lahan perdagangan dan permukiman memiliki skor tinggi.
2. Menentukan sampel berupa bidang tanah yang memberikan informasi harga penawaran dan transaksi kurun waktu tertentu pada tanah pertanian dan non pertanian. Jumlah titik sampel menjadi acuan pengambilan data di lapangan
3. Perhitungan nilai tanah yakni mengoreksi data survei lapangan dengan unsur penyesuaian yang ditetapkan sehingga diperoleh nilai tanah terkoreksi dalam satuan rupiah/ m². Urutan perhitungan nilai tanah terdiri dari koreksi status hak, koreksi jenis data harga, koreksi waktu transaksi dan harga tanah per meter persegi.
4. Plotting data nilai indikasi rata-rata (NIR) ke dalam batas zona yang telah dibuat
5. Integrasi plotting tersebut dengan geotagging (data lokasi dan data deskriptif dari wajib pajak orang pribadi/ badan serta objek pajak PBB, foto lokasi, foto aset serta data pendukung lainnya)

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan peta RBI, citra ataumfoto udara. Dengan ketentuan membuat poligon/areamberdasarkan karakteristik tiap zona.

Parameter yang digunakan dalam interpretasi visual pembuatan zona awal yaitu rona atau warna, bentuk atap, ukuran, tekstur, asosiasi (kepadatan antara bangunan), lokasi atau situs, pola tanah (Subiyanto, 2018).

Setelah dilakukan survei harga tanah maka dilanjutkan dengan perhitungan menggunakan excel, apabila besarnya nilai standar deviasi pada setiap zona tidak memenuhi syarat standar 0-30% maka harus dilakukan pengecekan ulang pada data dan melakukan pembagian zona untuk standar deviasi lebih dari 30% (Rachmawati, 2013). Penilaian tanah dilakukan dengan 3 (tiga) metode penilaian yakni

- a. Metode pendekatan perbandingan harga pasar yakni pendekatan dengan membandingkan antara properti yang dinilai dengan properti pembanding yang telah diketahui karakteristik dan nilainya
- b. Metode pendekatan biaya
- c. Metode pendekatan pendapatan

Semua data transaksi dan penawaran yang ditetapkan kemudian dilakukan koreksi jenis dan koreksi waktu untuk mendapatkan harga estimasi nilai pasar wajar mengacu pada SE Dirjen Pajak SE No 55/PJ.6/1999

- a. Penyesuaian Status Hak

HM : 0 %

Non Sertifikat : 10 – 30 %

HGB/HGU : 2 – 10 %

Dengan arah penyesuaian positif (+)

- b. Koreksi Nilai Jenis Data Transaksi

$$HK = HT + \{(\%K) \times HT\}$$

- c. Koreksi Waktu Transaksi

$$HK = HT + \{(n-m) \times 10\% \times HT\}$$

Untuk mendapatkan harga zona maka setelah didapatkan nilai tanah yang telah dikoreksi dilakukan perhitungan NIR (Nilai Indikasi Rata-rata) yang merupakan harga rata–

rata dari zona tersebut dengan syarat NIR tiap zona memiliki standar deviasi kurang dari 30%.

Kemudian dihitung nilai pajak baru dengan rumus sebagai berikut :

$$PBB = 0,5\% \times \% \text{ NJKP} \times \text{NJKP}$$

$$\text{BPHTB} = 5\% \times ((\text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}) - \text{NPOPTKP})$$

$$\text{PPh} = 5\% \times ((\text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}))$$

Keterangan :

NJKP : Nilai Jual Kena Pajak

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

NPOPTKP : Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Untuk mendapatkan harga zona maka setelah didapatkan nilai tanah yang telah dikoreksi dilakukan perhitungan NIR (Nilai Indikasi Rata-rata) yang merupakan harga rata-rata dari zona tersebut dengan syarat NIR tiap zona memiliki standar deviasi kurang dari 30%.

Kemudian dihitung nilai pajak baru dengan rumus sebagai berikut :

$$PBB = 0,5\% \times \% \text{ NJKP} \times \text{NJKP}$$

$$\text{BPHTB} = 5\% \times ((\text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}) - \text{NPOPTKP})$$

$$\text{PPh} = 5\% \times ((\text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}))$$

Keterangan :

NJKP : Nilai Jual Kena Pajak

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

NPOPTKP : Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

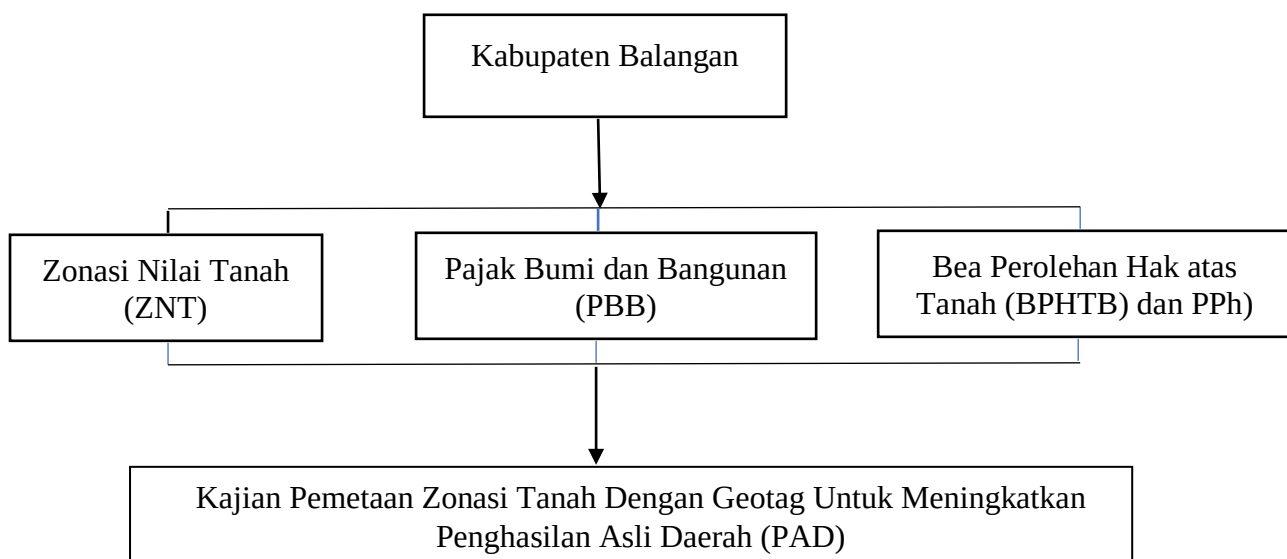
3.6. Kerangka Berpikir

Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan area yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama, sekumpulan bidang tanah didalamnya yang batasannya bersifat imanijer ataupun nyata sesuai penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Zona nilai tanah berkaitan

dengan nilai jual sehingga akan menentukan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar penetapan besaran PBB-P2. Pajak Bumi dan Bangunan (disingkat PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada.

Selanjutnya Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan PPh adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. PPh yang dimaksud adalah pajak penghasilan atas tanah. Perolehan Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Objek Pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan tersebut salah satunya adalah penunjukkan pembeli dalam lelang. Subjek dan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 3 1. Kerangka Berpikir

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum Kabupaten Balangan

4.1.1. Sejarah

Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Paringin yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pembentukan Kabupaten Balangan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 2003.

Tanggal 8 April 2003 dilaksanakan pelantikan Pj. Bupati Balangan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Hari Sabarno (<https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-balangan/>), yang kemudian menjadi hari jadi yang dirayakan setiap tahunnya. Motto Kabupaten Balangan adalah "Sanggam" yaitu "Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat" (bahasa Banjar, berarti: Kesanggupan melaksanakan pekerjaan (pembangunan) yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat. Daftar pejabat Bupati dan Bupati/Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Balangan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1. Daftar Pejabat dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Balangan

No.	Periode	Nama	Keterangan
1	8 April 2003-16 April 2004	Drs. H. M. Arsyad	Penjabat Bupati
2	16 April 2004-13 Maret 2005	Ir. H. Sefek Effendie, M.E.	Penjabat Bupati

3	13 Maret 2005-3 Agt 2006	Ir. H. Johanes Sriyono	Penjabat Bupati
4	13 Agt 2005-13 Maret 2015	Ir. H. Sefek Effendie, M.E. Drs. H. Ansharuddin, M.Si.	Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode I dan II
5	13 Maret 2015-17 Feb. 2016	Drs. H. M. Hawari	Penjabat Bupati
6	17 Feb. 2016-26 Sep. 2020	Drs. H. Ansharuddin, M.Si. H. Syaifullah	Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode III
7	26 Sept. 2020-5 Des. 2020	H. Syaifullah	Penjabat Bupati
8	26 Februari 2021- 26 Februari 2024	H. Abdul Hadi, S.Ag., M.Ikom. H. Supiani, S.Sos., M.Si.	Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode IV

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Balangan

4.1.2. Kondisi Geografis

4.1.2.1. Letak, Luas, dan Batas

Kabupaten Balangan berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara geografis terletak antara 114° 50'24" sampai dengan 115° 50'24" Bujur Timur dan 2° 01'37" sampai dengan 2° 35'58" Lintang Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Kabupaten Balangan terdiri atas 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Lampihong, Batumandi, Awayan, Paringin, Juai, dan Halong. Pada Tahun 2007 Kabupaten Balangan melakukan pemekaran kecamatan, sehingga menjadi 8 kecamatan yaitu Lampihong, Batumandi, Awayan, Paringin, Juai, Halong, Paringin Selatan, dan Tebing Tinggi. Paringin ditetapkan sebagai ibukota kabupaten. Kota Paringin yang merupakan ibu kota Kabupaten Balangan berjarak 202 km dari Kota Banjarmasin, dan dapat dicapai melalui:

- 1) Jalan darat dengan waktu tempuh $\pm$ 4 jam dari Kota Banjarmasin yang dilayani oleh trayek angkutan umum mikro bis jurusan Banjarmasin-Paringin-Tanjung atau trayek bis antar kota Banjarmasin-Balikpapan-Samarinda.
- 2) Jalur udara dari bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin menuju Bandara Warukin di Kabupaten Tabalong menggunakan maskapai Pelita Air Services, Kalstar waktu tempuh

sekitar 20 menit. Jarak antara Bandara Warukin dengan Kota Paringin sekitar 30 km atau sekitar 30 menit melalui jalan darat.

Kabupaten Balangan mempunyai luas wilayah 182.810,95 ha, saat ini telah berjumlah 8 kecamatan, dan 159 desa, atau 4,89% dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan 37.377,53 km atau 3.737.753 ha. Kecamatan Tebing Tinggi merupakan kecamatan merupakankabupaten terluas dari luas keseluruhan Kabupaten Balangan dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Paringin Selatan atau 4,71% dari keseluruhan Kabupaten Balangan.

Tabel 4. 2. Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Balangan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	%
1	Lampihong	10.009,41	5,48
2	Batumandi	11.225,93	6,14
3	Awayan	12.273,43	6,71
4	Tebing Tinggi	75.291,02	41,19
5	Paringin	13.812,98	7,56
6	Paringin Selatan	8.601,96	4,71
7	Juai	23.081,09	12,63
8	Halong	28.515,14	15,60
Total		182.810,95	100

Sumber: Analisis Peta Administrasi Kabupaten Balangan Tahun 2020

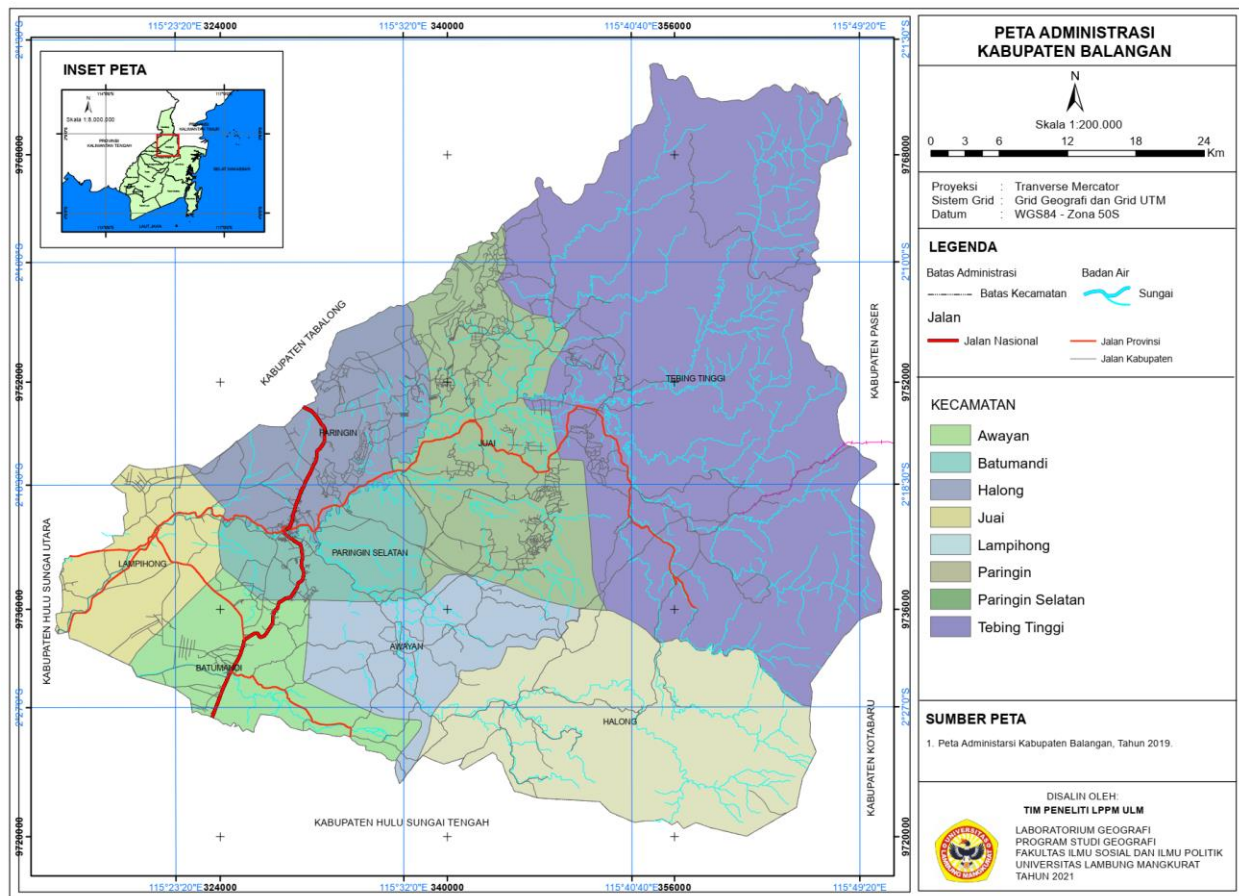
Kabupaten Balangan secara administrasi berbatasan dengan 4 (empat) kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan (Tabalong, Kotabaru, Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah) serta Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir (Provinsi Kalimantan Timur)

Sebelah Timur : Kabupaten Pasir (Provinsi Kalimantan Timur) dan Kabupaten Kotabaru

Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara



Gambar 4. 1. Peta Administrasi Kabupaten Balangan

4.1.2.2. Iklim

Kedaaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan ke dalam Iklim Hutan Tropika Humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm serta suhu udara rata-rata harian 32,0°C dan minimal 133,3°C. Kelembaban udara relatif rata-rata harian di wilayah ini pada tahun yang sama mencapai 201,5%. Curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret dengan tinggi curah hujan antara 2.000 mm/tahun hingga 2.500 mm/tahun dialami oleh sebagian wilayah Kecamatan Halong, Juai, Paringin, Batumandi, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Lampihong. Sebagian dari wilayah kecamatan-kecamatan tersebut dan seluruh wilayah Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi memiliki tinggi curah

hujan yang berkisar antara 2.500 mm/tahun hingga 3.000 mm/tahun (https://sipppa.ciptakarya.pu.go.id/sipppa_online).

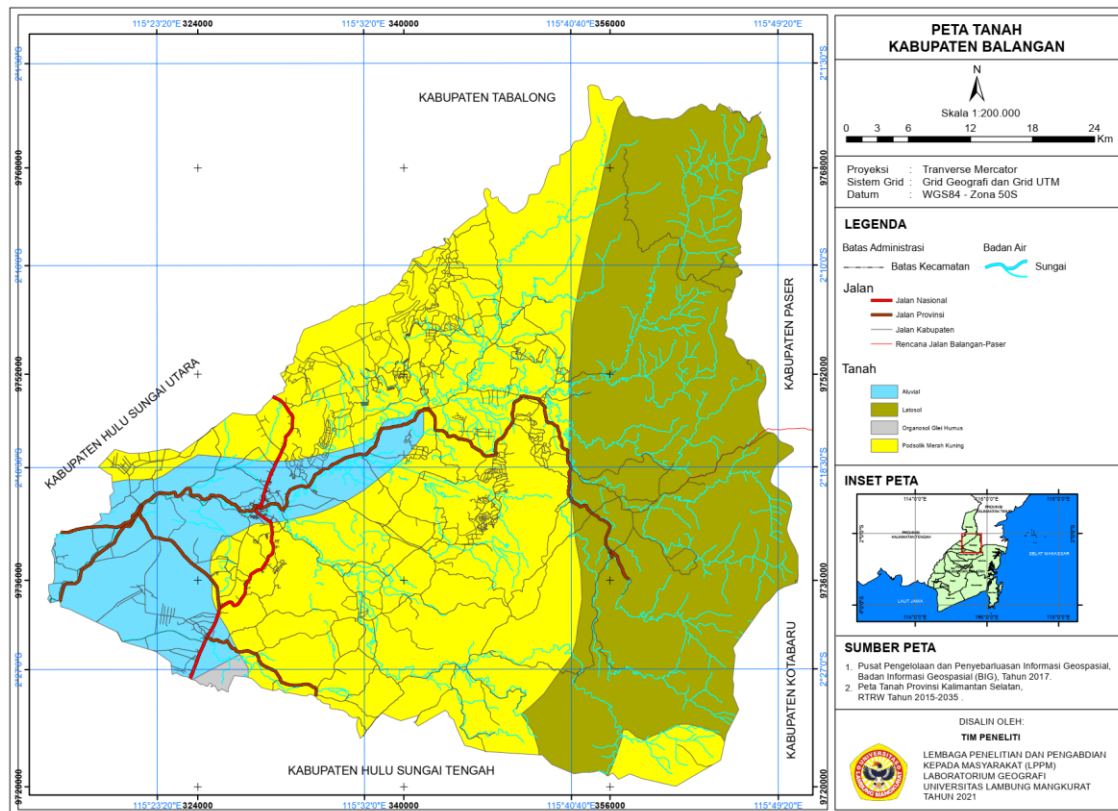
4.1.2.3. Tanah

Tanah di Kabupaten Balangan didominasi oleh tanah dengan jenis Podsolik Merah Kuning (PMK) (49,89%) yang terdistribusi diseluruh wilayah Kabupaten Balangan, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 4. 3. Tanah Kabupaten Balangan

No.	Kecamatan	Tanah (Ha)				Luas (Ha)
		Aluvial	Latosol	Organosol Glei Humus	Podsolik Merah Kuning	
1	Lampihong	8.919,94			1.089,47	10.009,41
2	Batumandi	5.156,57		575,56	5.493,80	11.225,93
3	Awayan				12.273,43	12.273,43
4	Tebing Tinggi		55.389,77		19.901,25	75.291,02
5	Paringin	3.760,07			10.052,91	13.812,98
6	Paringin Selatan	2.936,68			5.665,27	8.601,96
7	Juai	1.558,28			21.522,82	23.081,09
8	Halong		13.318,12		15.197,01	28.515,14
	Total	22.331,53	68.707,89	575,56	91.195,97	182.810,95
	%	12,22	37,58	0,31	49,89	100,00

Sumber: Analisis Overlay Peta Administrasi dan Peta Tanah Kabupaten Balangan Tahun 2021



Gambar 4. 2. Persebaran Tanah di Kabupaten Balangan

Tanah Latosol di Kabupaten Balangan memiliki luas 68.707,89 ha (37,58%) terdistribusi di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Halong. Tanah latosol merupakan tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan sedimen dan metamorf, warnanya merah hingga kuning, teksturnya lempung dan memiliki solum horizon.

Tanah alluvial di Kabupaten Balangan memiliki luas 22.231,53 ha (12,22%) yang terdistribusi di Kecamatan Lampihong, Batumandi, Paringin, Paringin Selatan dan Juai. Tanah alluvial adalah tanah yang terbentuk karena proses endapan di sekitar sungai, danau atau cekungan memiliki warna coklat hingga kelabu. Tanah ini memiliki unsur hara tinggi dan relatif subur untuk aktivitas pertanian.

Tanah Organosol Glei Humus sering dinamakan tanah humus terbentuk dari proses pembusukan bahan organik terdapat di wilayah rawa. Tanah ini memiliki luas 575,56 ha (0,31%) berada di Kecamatan Batumandi.

Tanah Podsolik Merah Kuning (PMK) adalah tanah yang mempunyai perkembangan profil, konsistensi teguh, bereaksi masam, dengan tingkat kejenuhan basa rendah, berwarna merah hingga kuning, permeabilitas lambat-sedang, struktur gumpal pada horizon B (makin kebawah makin pejal), tekstur beragam dan agregat berselaput liat, sering dijumpai konkresi besi dan kerikil kuarsa (Indrihastuti, 2004). Tanah podsolik merah kuning dengan bantuan pemupukan dan pengelolaan yang baik bisa dikembangkan menjadi perkebunan karet dengan hasil yang memuaskan. Selain jenis podsolik merah kuning, tanah latosol dan aluvial juga bisa dikembangkan untuk penanaman karet. Karet dapat tumbuh pada pH 3,8-8,0 walaupun amat dikehendaki pH 5,0-6,5 (Nazaruddin dan Paimin, 2005). Pada pH rendah (lebih kecil daripada pH 4,5) unsur Al dan Fe tersedia bagi tanaman, sedangkan kedua unsur tersebut amat beracun bagi tanaman. Kekurangan unsur hara mudah diatasi dengan cara pemupukan (Tatik, 2007).

4.1.2.4. Topografi

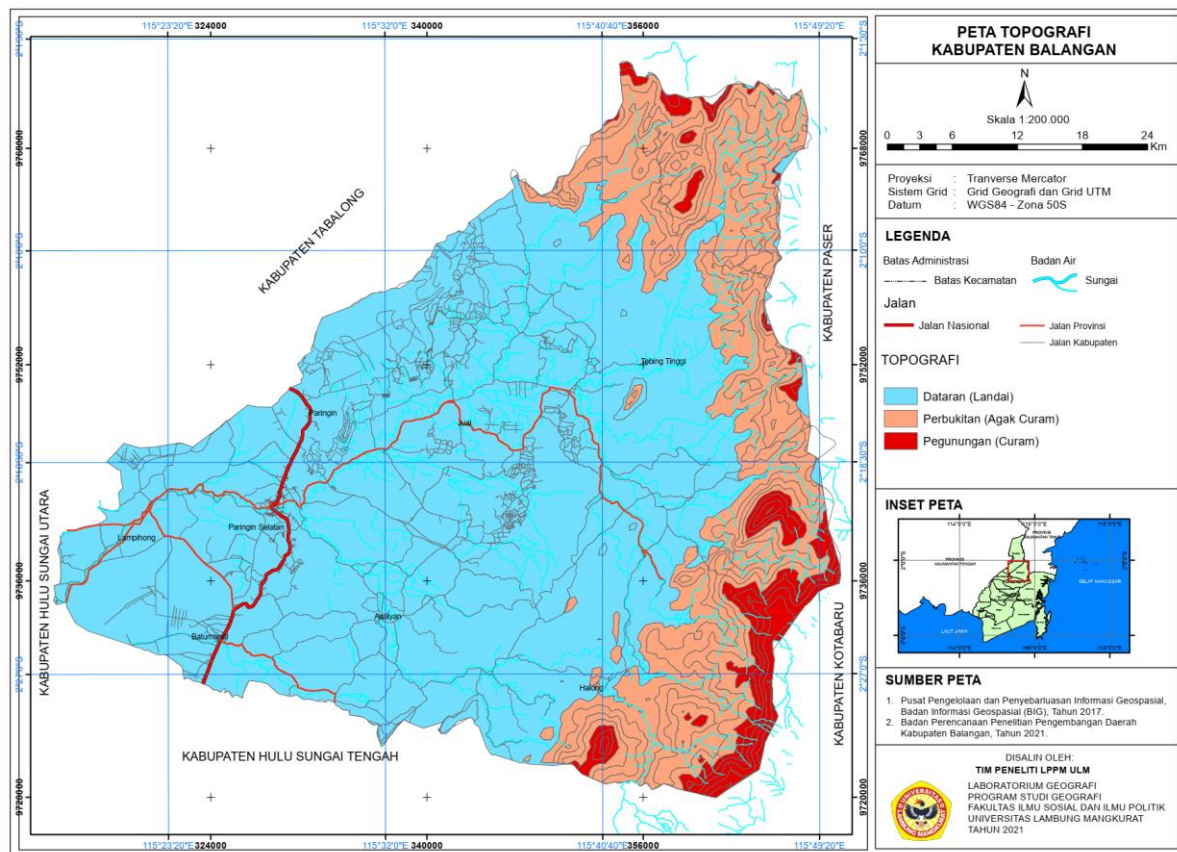
Topografi wilayah Kabupaten Balangan terdiri atas 3 (tiga) bentuk dataran, perbukitan dan pegunungan (klasifikasi bentuk lahan absolut Van Zuidam, 1985), dengan bentuk wilayah mayoritas adalah dataran (65%), perbukitan (31%) dan pegunungan (4%), kemiringan lereng berkisar antara 2% sampai 30%. Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Halong merupakan 2 (dua) wilayah kecamatan yang memiliki 3 (tiga) bentuk wilayah tersebut, dan sisanya merupakan dataran.

Tabel 4. 4. Topografi Wilayah Kabupaten Balangan

No.	Kode	Kecamatan	Luas Menurut Topografi			Luas (Ha)
			Dataran	Perbukitan	Pegunungan	
1	6311010	Lampihong	10.009			10.009,41
2	6311020	Batumandi	11.226			11.225,93
3	6311030	Awayan	12.273			12.273,43
4	6311031	Tebing Tinggi	29.349	42.156	3.786	75.291,02
5	6311040	Paringin	13.813			13.812,98
6	6311041	Paringin Selatan	8.602			8.601,96
7	6311050	Juai	23.081			23.081,09
8	6311060	Halong	10.783	15.064	2.668	28.515,14
	JUMLAH		119.136	57.220	6.455	182.810,95

	Persentase (%)	65	31	4	100,00
--	-----------------------	-----------	-----------	----------	---------------

Sumber: Analisis Overlay Peta Administrasi dan Topografi Kabupaten Balangan Tahun 2021



Gambar 4. 3. Peta Topografi Kabupaten Balangan

4.1.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada Tahun 2021 berjumlah 130.355 jiwa dengan angka dominan berada di Kecamatan Halong (15,67%) dan Kecamatan Paringin (15,11%). Laju pertumbuhan penduduk tahun 2019-2020 yaitu mengalami pertambahan rata-rata per tahun sebesar 1,41%, dimana Kecamatan Paringin merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu 2,92% dan terendah di Kecamatan Juai (0,62%). Kepadatan penduduk di Kabupaten Balangan secara keseluruhan yaitu 69,40/km² dan Kecamatan Paringin sebagai wilayah dengan kepadatan tertinggi yaitu 196,93/km². Adapun perbandingan jumlah laki-laki terhadap penduduk perempuan yaitu 102,11. Selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 5. Kondisi Kependudukan Kabupaten Balangan

No.	Kecamatan	Jumlah (ribu)	%	Laju Pertumbuhan 2019-2020	Kepadatan Penduduk per Km2	Sex Ratio
1	Lampihong	18.282	14,02	1,42	188,55	102,8
2	Batumandi	18.831	14,45	1,52	127,27	105,7
3	Awayan	13.775	10,57	1,27	96,62	101,2
4	Tebing Tinggi	7.073	5,43	1,69	27,49	101,3
5	Paringin	19.701	15,11	1,49	196,93	100,2
6	Paringin Selatan	15.462	11,86	2,92	178,13	101,3
7	Juai	16.801	12,89	0,62	43,43	100,3
8	Halong	20.430	15,67	0,86	30,96	104,1
	JUMLAH	130.355	100,00	1,41	69,40	102,11

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2021

Penduduk menurut Kelompok umur di Kabupaten Balangan didominasi penduduk usia produktif 15-64 tahun (68,29%), usia tidak produktif 0-14 tahun (28,02%), >65 tahun (3,7%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa dari aspek umur penduduk di Kabupaten Balangan memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan berbagai usaha khususnya ketersediaan SDM lapangan kerja dengan dukungan bonus demografi dari aspek penduduk usia produktif.

Tabel 4. 6. Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Balangan

Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
0-4	6.360	5.940	12.300	9,44
5-9	6.728	6.387	13.115	10,06
10-14	5.681	5.419	11.100	8,52
15-19	5.609	5.381	10.990	8,43
20-24	5.826	5.662	11.488	8,81
25-29	5.674	5.626	11.300	8,67
30-34	5.817	5.580	11.397	8,74
35-39	4.947	4.807	9.754	7,48
40-44	4.523	4.541	9.064	6,95
45-49	3.957	3.897	7.854	6,03
50-54	3.518	3.673	7.191	5,52
55-59	2.957	2.808	5.765	4,42
60-64	2.119	2.100	4.219	3,24
65-69	1.212	1.238	2.450	1,88
70-74	545	726	1.271	0,98
75+	432	665	1.097	0,84
JUMLAH	65.905	64.450	130.355	100,00
%	50,56	49,44	100	

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2021

4.1.4. Ekonomi

Kondisi perekonomian di Kabupaten Balangan dapat dilihat dari data perkembangan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 yang menunjukkan bahwa aspek pertambangan dan penggalian merupakan sektor usaha yang dominan dalam memberikan kontribusi sebesar 61,21%, diikuti oleh beberapa sektor diantaranya pertanian, kehutanan dan perikanan 12,02%, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor 5,55%, selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 7. Perkembangan PDRB Kabupaten Balangan menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**	Rerata
B	Pertambangan dan Penggalian	62,21	62,21	62,14	60,58	58,91	61,21
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,39	11,80	11,63	12,03	12,23	12,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,10	5,41	5,49	5,81	5,96	5,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,51	4,43	4,47	4,72	5,16	4,66
F	Konstruksi	4,37	4,44	4,44	4,53	4,68	4,49
P	Jasa Pendidikan	3,15	3,24	3,26	3,43	3,70	3,36
C	Industri Pengolahan	1,91	1,99	1,93	1,94	1,98	1,95
H	Transportasi dan Pergudangan	1,84	1,85	1,90	1,99	2,03	1,92
J	Informasi dan Komunikasi	1,28	1,30	1,33	1,35	1,47	1,35
L	Real Estate	0,93	0,97	0,98	1,01	1,08	0,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,86	0,88	0,94	1,03	0,91
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,51	0,53	0,54	0,58	0,61	0,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,32	0,32	0,34	0,36	0,38	0,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,30	0,31	0,33	0,35	0,38	0,33
E	Pengadaan Air	0,23	0,23	0,24	0,26	0,28	0,25
M, N	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
JUMLAH		100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2021 (diolah)

Kontribusi beberapa sektor menurut lapangan usaha sebagaimana pada tabel di atas searah dengan rendahnya jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan yaitu 1,88% atau secara mayoritas penduduk Kabupaten Balangan berstatus telah bekerja 74,62%, selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 8. Kegiatan Utama Penduduk Kabupaten Balangan

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
I	Angkatan Kerja	40.782	31.935	72.717	76,50
1	Bekerja	39.116	31.812	70.928	74,62
2	Pengangguran Terbuka	1.666	123	1.789	1,88
II	Bukan Angkatan Kerja	6.930	15.411	22.341	23,50
1	Sekolah	3.292	2.840	6.132	6,45
2	Mengurus Rumah Tangga	2.054	11.506	13.560	14,26
3	Lainnya	1.584	1.065	2.649	2,79
	JUMLAH	47.712	47.346	95.058	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2021 (diolah)

Kegiatan usaha masyarakat Kabupaten Balangan pada UMKM menunjukkan dominasi pada jenis usaha mikro berjumlah 11.565 (98,92%) dan terdistribusi di seluruh wilayah kecamatan. Usaha mikro merupakan bentuk usaha ini merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh suatu badan usaha ataupun individu yang mampu memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2018 dengan aset maksimal yang dapat masuk dalam kategori ini adalah Rp 50 juta, sedangkan omset maksimalnya adalah Rp 300 juta.

Usaha kecil di Kabupaten Balangan berjumlah 116 usaha (0,99%) yang terdistribusi diseluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Lampihong. Usaha kecil adalah bentuk usaha produktif yang bergerak sendiri dan dilakukan oleh badan usaha ataupun individu yang bukan berasal dari cabang perusahaan yang telah dimiliki. Dalam aturan perundang-undangan, aset maksimal yang terdapat dalam kategori ini adalah sekitar Rp 50 juta – Rp 500 juta, sedangkan omsetnya adalah sekitar Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar.

Usaha menengah yang terdapat di Kabupaten Balangan berjumlah 10 usaha (0,09%) terdapat pada 2 (dua) wilayah yaitu Kecamatan Paringin dan Tebing Tinggi. Usaha menengah bisa diartikan sebagai usaha produktif yang bergerak sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan dari anak ataupun cabang usaha yang dimiliki, atau bukan menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung. Jumlah kekayaan bersih atau aset maksimal yang masuk dalam kategori ini adalah Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dengan omset sekitar Rp

2,5 miliar hingga Rp 50 miliar. Distribusi jumlah UMKM di Kabupaten Balangan, selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 9. Jumlah Klasifikasi UMKM

No.	Kecamatan	Jumlah Klasifikasi UMKM			
		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Paringin	858	29	1	888
2	Paringin Selatan	1.219	5	-	1.224
3	Batumandi	2.196	2	-	2.198
4	Lampihong	2.001	-	-	2.001
5	Awayan	2.131	27	-	2.158
6	Tebing Tinggi	596	13	9	618
7	Juai	1.647	21	-	1.668
8	Halong	921	19	-	940
Jumlah		11.569	116	10	11.695
Persentase (%)					
1	Paringin	7,42	25,00	10,00	7,59
2	Paringin Selatan	10,54	4,31	-	10,47
3	Batumandi	18,98	1,72	-	18,79
4	Lampihong	17,30	-	-	17,11
5	Awayan	18,42	23,28	-	18,45
6	Tebing Tinggi	5,15	11,21	90,00	5,28
7	Juai	14,24	18,10	-	14,26
8	Halong	7,96	16,38	-	8,04
Jumlah		98,92	0,99	0,09	100

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2021 (diolah)

Klaster usaha UMKM di Kabupaten Balangan yang mayoritas adalah makanan/minuman (41,72%), pertanian (12,67%), dan Jasa (12,53%), dan selainnya pada berbagai kluster usaha, selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 10. Klaster UMKM Kabupaten Balangan

No.	Klaster Usaha UMKM	Jumlah	Persentase (%)	Ranking
1	Makanan/Minuman	4879	41,72	1
2	Lain-Lain	2068	17,68	2
3	Pertanian	1482	12,67	3
4	Jasa	1465	12,53	4
5	Peternakan	786	6,72	5
6	Tekstil	282	2,41	6
7	Kerajinan	225	1,92	7
8	Bangunan	202	1,73	8
9	Otomotif	162	1,39	9
10	Teknologi Internet	144	1,23	10
JUMLAH		11.695	100	

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2021 (diolah)

Jenis sarana perdagangan masyarakat di Kabupaten Balangan dominan adalah kios dan mengalami penambahan pada tahun 2020 dengan jumlah 797, selanjutnya warung yang mengalami penambahan 4 unit pada tahun 2020 atau berjumlah 44 warung, kemudian pasar yang berjumlah 9 unit pada tahun 2020 dan terakhir jenis sarana perdagangan berupa toko berjumlah 3 unit pada tahun 2020. Dominannya kios dan warung searah dengan jenis klaster usaha makanan/minuman sebagai kelompok usaha yang paling diminati oleh masyarakat di Kabupaten Balangan.

Tabel 4. 11. Jenis Sarana Perdagangan di Kabupaten Balangan

No.	Jenis Sarana Perdagangan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pasar	8	8	9	9
2	Toko	2	2	3	3
3	Kios	765	765	765	797
4	Warung	40	40	40	44
	Jumlah	815	815	817	853
Persentase (%)					
1	Pasar	0,98	0,98	1,10	1,06
2	Toko	0,25	0,25	0,37	0,35
3	Kios	93,87	93,87	93,64	93,43
4	Warung	4,91	4,91	4,90	5,16
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan dalam BPS Kabupaten Balangan, 2021

Kegiatan usaha di Kabupaten Balangan sangat dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang dapat diidentifikasi oleh jumlah pengeluaran per kapita per bulan. Secara umum jumlah pengeluaran masyarakat mayoritas antara Rp. 500.000->Rp. 1.500.000 (95,02%), dan selainnya atau 4,98% <Rp. 500.000, selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

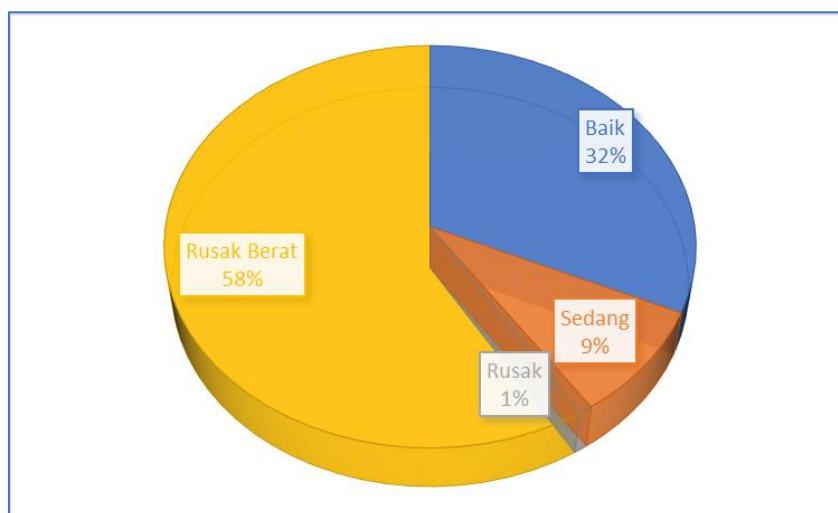
Tabel 4. 12. Golongan Pengeluaran Perkapita Perbulan Masyarakat Balangan

No.	Golongan Pengeluaran Perkapita Perbulan (Rp)	%
1	<150.000	0
2	150.000-199.999	0
3	200.000-299.999	0,43
4	300.000-499.999	4,54
5	500.000-749.999	23,25
6	750.000-999.999	23,89
7	1.000.000-1.499.999	25,77
8	> 1.500.000	22,11

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional dalam BPS Kabupaten Balangan, 2021

4.1.5. Infrastruktur Jalan

Jalan adalah sarana penghubung antar aktivitas ekonomi di suatu daerah sehingga kondisi jalan yang baik sangat menunjang tumbuh kembangnya aktivitas ekonomi di daerah. Kondisi jalan di Balangan secara rata-rata Tahun 2015-2020 mayoritas dominan mengalami rusak berat (58%) dan terus mengalami penurunan secara signifikan dan pada tahun 2020 kondisi jalan rusak hanya 36,90%, jalan dengan kondisi baik dan sedang secara rata-rata 41% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu 44,66% .



(Sumber: Dinas PUPR dalam Kabupaten Balangan dalam Angka, 2020 dan 2021)

Gambar 4. 4. Kondisi Jalan Rata-Rata Tahun 2015-2020

Meningkatkan kondisi jalan baik dan menurunnya kondisi jalan rusak dan jalan rusak berat di Kabupaten Balangan dalam rentang tahun 2015-2020 menunjukkan perhatian Pemerintah Kabupaten Balangan untuk terus mengupayakan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai sarana penghubung aktivitas ekonomi masyarakat Balangan, perhatikan tabel berikut.

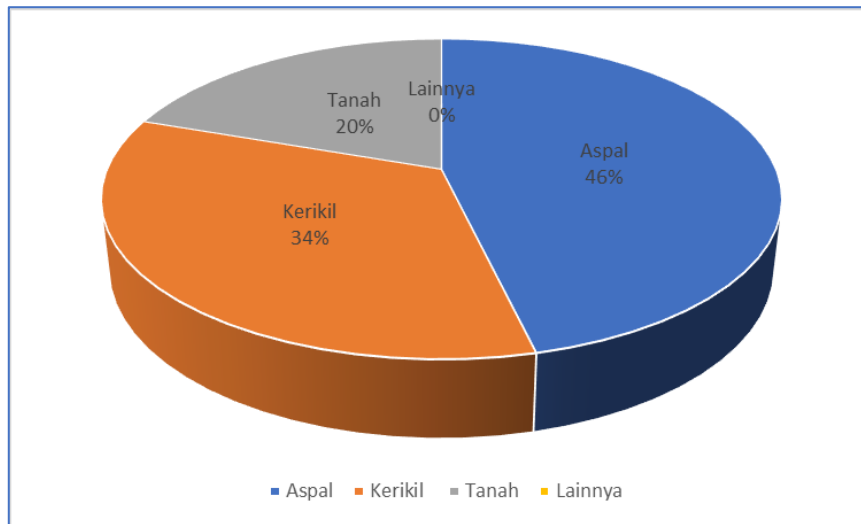
Tabel 4. 13. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Balangan 2015 - 2020

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	93.783	93.783	205.515	226.418	234.159	374.177
2	Sedang	90.679	90.679	4863	44.608	53.054	47.058
3	Rusak	4.910	4.910	24.44.00	74.39.00	18.952	2.000
4	Rusak Berat	449.595	449.595	393.668	326.837	366.088	248.076
Jumlah		638.966	638.966	672.253	672.253	672.253	672.253
Persentase (%)							

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	14,68	14,68	30,57	33,68	34,83	55,66
2	Sedang	14,19	14,19	0,72	6,64	7,89	7,00
3	Rusak	0,77	0,77	0,00	0,00	2,82	0,30
4	Rusak Berat	70,36	70,36	58,56	48,62	54,46	36,90

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2020 dan 2021

Kondisi jalan di Kabupaten Balangan menurut jenis permukaan tahun 2015-2020 dominan telah aspal (46%), jalan kerikil (34%), tanah (20%).



Gambar 4. 5. Rata-Rata Kondisi Jalan menurut Permukaan tahun 2015-2020

Panjang jalan di Balangan dengan jenis permukaan jalan aspal mengalami kecenderungan meningkat dari tahun 2015-2020, dan pada tahun 2020 jalan aspal yaitu 53,06, dan kondisi permukaan jalan kerikil dan tanah mengalami penurunan dan pada tahun 2020 yaitu 18,87% (kerikil) dan 28,07% (jalan tanah).

Tabel 4. 14. Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Balangan

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aspal	270.544	270.544	284.367	309.649	345.969	356.683
2	Kerikil	244.268	244.268	263.638	247.486	220.613	126.873
3	Tanah	124.154	124.154	123.248	115.118	105.671	188.697
4	Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		638.966	638.966	672.253	672.253	672.253	672.253
Persentase (%)							
1	Aspal	42,34	42,34	42,30	46,06	51,46	53,06
2	Kerikil	38,23	38,23	39,22	36,81	32,82	18,87
3	Tanah	19,43	19,43	18,33	17,12	15,72	28,07
4	Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas PUPR Kab. Balangan dalam BPS Kabupaten Balangan, 2020 dan 2021

Jalan di Kabupaten Balangan dapat dibedakan menurut daerah berwenang, yaitu Nasional, Provinsi, dan Kota. Berdasarkan klasifikasi tersebut, mayoritas jalan di Kabupaten Balangan adalah jalan kota. Jalan nasional dan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Balangan masing-masing hanya sebesar 5 dan 4 persen dari total ruas jalan. Dengan demikian, sebagian besar jalan yang ada merupakan wewenang Kabupaten Balangan.

Tabel 4. 15. Panjang Jalan menurut TKewenangan Pemerintahan di Kabupaten Balangan

No	Kewenangan Jalan	Panjang Jalan (Km)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nasional/Negara			-	-	-	-
2	Provinsi			-	-	-	-
3	Kabupaten/Kota	638.966	638.966	672.253	672.253	672.253	672.253
Jumlah		638.966	638.966	638.966	672.253	672.253	672.253

Sumber: Dinas PUPR Kab. Balangan (Kabupaten Balangan dalam Angka, 2020 dan 2021)

Sebagai salah satu kabupaten yang sedang giat melakukan pembangunan, Kabupaten Balangan terus membangun jalan dan jembatan baru dan meningkatkan kualitas jalan jembatan yang telah ada. Keterjangkauan dan aksesibilitas yang tinggi antar wilayah tersebut telah memicu berkembangnya ekonomi lokal dan kabupaten, karena telah menjangkau sentra-sentra produksi di pedesaan yang terhubung dengan pusat pemasaran dan produksi.

Wilayah Kabupaten Balangan dilintasi oleh sistem jaringan jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan wilayah Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan hingga ke Kalimantan Tengah, yang menjadikan wilayah ini memiliki lokasi strategis dengan aksesibilitas yang tinggi. Sebagai daerah pegunungan yang topografinya bergelombang disertai banyaknya Daerah Aliran Sungai, menyebabkan diperlukannya banyak jembatan sebagai sarana penghubung transportasi darat. Diantaranya telah dibangun jembatan baru di jalan lingkaran timur yang menghubungkan Muara Pitap dengan Gunung Pandau.

4.1.6. Transportasi

Sistem transportasi yang digunakan di Kabupaten Balangan menggunakan moda transportasi darat yang melayani pergerakan penduduk dengan sistem angkutan regional dan

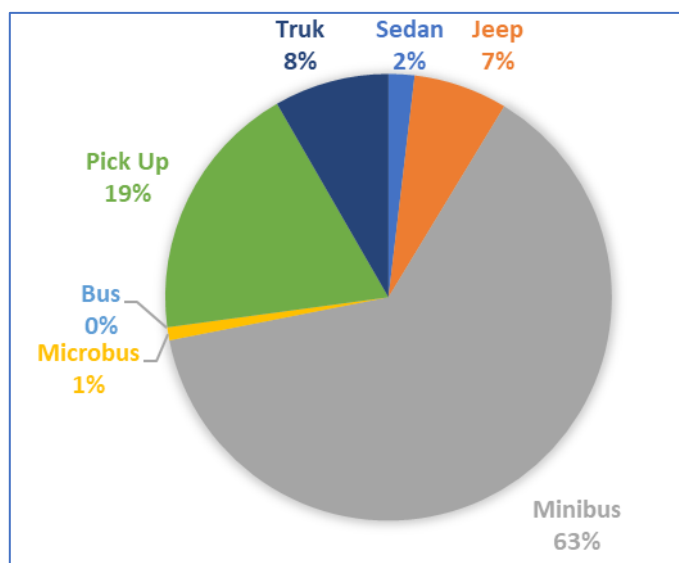
angkutan lokal. Lokasi strategis Kabupaten Balangan yang terletak pada perlintasan jalan Trans Kalimantan menjadikan wilayah ini terlayani oleh sistem angkutan umum antar kota antar provinsi, yaitu rute Palangkaraya-Banjarmasin-Paringin-Balikpapan-Samarinda.

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 berjumlah 46.741 yang mayoritas jenis kendaraan bermotor roda dua (84,75%), roda empat (15,19%) dan roda tiga (0,06%), selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 16. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Balangan

No.	Jenis	PKB/Daftar Ulang	Baru 2021	Jumlah	%
1	Roda 2	37.047	2.564	39.611	84,75
2	Roda 3	16	14	30	0,06
3	Roda 4	6.716	384	7.100	15,19
	JUMLAH	43.779	2.962	46.741	100

Sumber: UPPD, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan, 2021



Gambar 4. 6. Komposisi Jenis Kendaraan Roda 4 di Kabupaten Balangan

Pola pergerakan masyarakat secara internal telah difasilitasi dengan akses transportasi lokal berupa jalur angkutan umum perdesaan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, yaitu trayek Paringin-Awayan dan Paringin-Halong, serta angkutan antar kota dalam provinsi rute Paringin-Barabai, Tanjung-Barabai, Banjarmasin-Paringin-Tanjung, dan Paringin-Amuntai. Upaya untuk memperlancar arus distribusi barang dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Balangan telah dibangun juga sarana angkutan, yaitu terminal. Terminal yang ada di kabupaten Balangan adalah Terminal Paringin. Terminal

ini merupakan Terminal Angkutan Pedesaan dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi sesuai status yang diberikan. Meskipun luas terminal ini 6.240 m², namun daya tampung terhadap jumlah penumpangnya cukup besar yaitu 1.100 orang dan bisa menampung 5 bus serta 40 non bus.



Gambar 4. 7. Pintu Gerbang Terminal Paringin, Kabupaten Balangan

4.1.7. Listrik

Pembangunan kelistrikan di Kabupaten Balangan telah menjangkau keseluruhan kecamatan hingga desa-desa di daerah pinggiran, dengan pasokan sumber energi listrik berasal dari PT. PLN Ranting Amuntai dan PT. PLN Cabang Barabai. Jumlah daya terpasang pada tahun 2019 sebesar 31.294.250 KW yang mengalami peningkatan sebesar 11,56% dari tahun 2018 yaitu sebesar 28.052.700 KW. Jumlah daya terpasang tersebut digunakan untuk melayani 35.319 pelanggan pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 11,01% dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 31.817 pelanggan. Peningkatan jumlah ini mengindikasikan semakin meningkatnya pembangunan sarana yang membutuhkan pasokan listrik yang juga semakin besar setiap tahunnya.

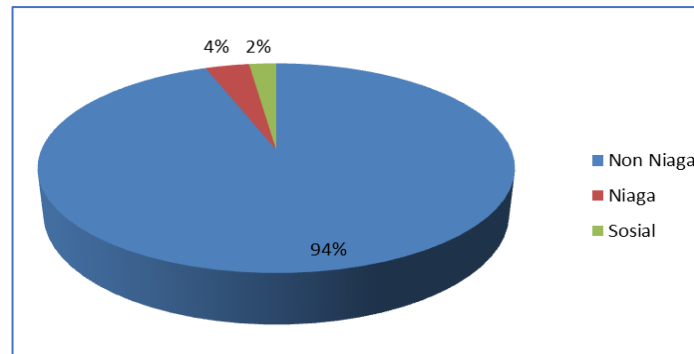
4.1.8. Telekomunikasi

Kabupaten Balangan memiliki 5 (lima) kantor pos pembantu yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, yang dapat melayani masyarakat baik untuk surat menyurat, maupun pengiriman

paket dan uang dalam bentuk wesel pos. Jaringan telepon umum dan layanan sambungan tak bergerak (*fixed telephone*) di wilayah Kabupaten Balangan dilayani oleh PT. Telkom, sedangkan untuk layanan sambungan bergerak (*mobile cellular services*) dilayani oleh beberapa operator selular. Untuk layanan sambungan bergerak (*mobile cellular services*), umumnya operator telepon selular telah menyediakan *base tranceiver station* (BTS) yang dibangun untuk melengkapi jaringan dan cakupan pelayanannya. Hingga saat ini di wilayah Kabupaten Balangan, tercatat terdapat 56 unit *base tranceiver station* (BTS) yang dibangun dan tersebar di beberapa wilayah kecamatan, dari 56 unit *base tranceiver station* (BTS) tersebut 3 unit diantaranya masih dalam proses pembangunan.

4.1.9. Air Minum

Pencapaian selama satu dekade Kabupaten Balangan di sektor Air Minum dapat dilihat dengan dibangunnya PDAM Balangan, yang sebelumnya masih disuplai dari PDAM Kabupaten HSU. Pada tahun 2019 terdapat 22.868 pelanggan air minum PDAM Balangan, meningkat sebanyak 1.042 pelanggan dari tahun 2019 yang hanya 21.826 pelanggan. Pelayanan air minum sudah menjangkau pada 7 kecamatan dari 8 kecamatan yang ada, yang belum terlayani hanya Kecamatan Tebing Tinggi. Pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat dipenuhi oleh PDAM melalui BNA Paringin. SPAM BNA Paringin dibangun sejak tahun 1987 yang berlokasi di Paringin Timur Kecamatan Paringin dengan sumber air baku sebagai pemenuhan kebutuhan diambil dari aliran sungai Balangan. Lokasi IPA yang dibangun berada di timur laut dari lokasi IPA Lama yang berada di Desa Lok Batung atau disebut juga dengan IPA Paringin 2 dan sebelah tenggara (Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan). Total kapasitas dari ketiga Lokasi IPA ini (Paringin I, Paringin 2 dan Paringin Selatan) sebesar 245 l/dt. Pelayanan PDAM Ibu Kota Kabupaten Balangan, secara umum dilayani melalui akses sambungan rumah, sementara sebagian kecil lainnya memanfaatkan sarana hidran umum.



Gambar 4. 8. Kategori Pelanggan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Balangan

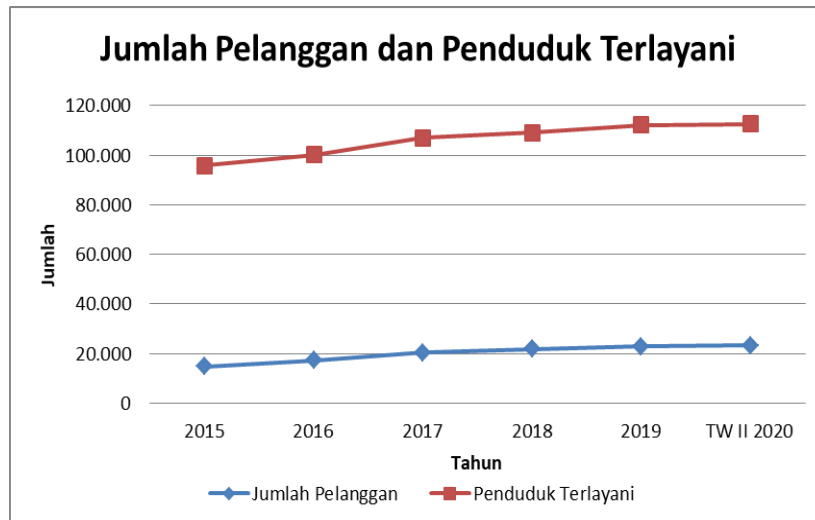
Pelanggan terbanyak PDAM berada di Kecamatan Paringin yang merupakan ibukota Kabupaten Balangan. Sedangkan pelanggan yang paling sedikit berada di Kecamatan Tebing Tinggi yang jaraknya cukup jauh dari ibu kota kabupaten.

Tabel 4. 17. Persebaran Pelanggan Air Minum Kabupaten Balangan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Pelanggan						Jumlah	Persentase (%)
		Non-Niaga		Niaga		Sosial			
		RT	IP	NK	NB	SU	SK		
1	Paringin	8.694	148	480	57	37	153	9.569	41,84
2	Awayan	1.297	42	26	1	4	37	1.407	6,15
3	Lampihong	2.736	65	47	1	9	67	2.925	12,79
4	Halong	2.109	40	36	1	10	46	2.242	9,80
5	Juai	2.058	36	34	1	1	46	2.176	9,52
6	Batumandi	1.495	32	34	4	1	24	1.590	6,95
7	Paringin Selatan	2.231	88	67	5	-	44	2.435	10,65
8	Tebing Tinggi	473	21	12	-	-	18	524	2,29
KABUPATEN		21.093	472	736	70	62	435	22.868	100,00

Sumber: PDAM Balangan (2020)

Berdasarkan total pelanggan air minum dilihat perkembangannya dari tahun 2015 hingga 2020, maka trennya cenderung meningkat. Jumlah penduduk yang terlayani hingga periode triwulan II Tahun 2020 mencakup 112.726 jiwa atau sebesar 84,58 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Balangan.



Gambar 4. 9. Tren Jumlah Pelanggan dan Penduduk Terlayani Air Minum PDAM Tirta Dharma Kabupaten Balangan

Perkembangan jumlah pelanggan air minum di PDAM Tirta Dharma Kabupaten Balangan dari tahun 2015 hingga tahun 2020, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 18. Perkembangan Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Dharma Kabupaten Balangan Tahun 2015 - 2020

No.	Kecamatan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Paringin	6.818	7.500	8.593	9.049	9.569	9.691
2	Awayan	627	1.348	1.403	1.407	1.407	1.407
3	Lampihong	2.164	2.230	2.378	2.847	2.925	3.026
4	Halong	1.022	1.065	2.144	2.177	2.242	2.253
5	Juai	1.818	2.050	2.067	2.143	2.176	2.183
6	Batumandi	1.018	1.326	1.330	1.335	1.590	1.590
7	Paringin Selatan	1.252	1.430	1.812	2.335	2.435	2.512
8	Tebing Tinggi	59	186	517	523	524	524
	Jumlah Pelanggan	14.778	17.135	20.244	21.816	22.868	23.186
	Jumlah Penduduk	123.449	125.534	127.503	129.505	131.428	133.274
	Penduduk Terlayani	95.790	100.124	107.038	109.130	112.318	112.726
	Cakupan Pelayanan	77,59%	79,76%	83,95%	84,27%	85,46%	84,58%

Sumber: PDAM Kabupaten Balangan (2020)

4.1.10. Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Balangan sudah dilakukan dengan sistem dan manajemen yang baik, mulai dari tahap pengumpulan dan pengangkutan hingga pengolahan akhir di TPA dengan menggunakan *control landfill*. Penanganan persampahan dibawah kendali Badan Lingkungan Hidup Daerah dengan fasilitas persampahan yang dimiliki terdiri atas 7 buah TPS permanen, 205 buah TPS besi, 20 buah TPS kayu ulin, 4 unit *dump truck*, 2

unit *arm roll container*, dan 25 unit gerobak. Pengolahan akhir sampah dilakukan di TPA Batu Merah Kecamatan Lampihong dengan sistem *Control Landfill* melalui pembangunan Sel TPA pada tahun 2013, yang kedepannya direncanakan pengolahannya dengan sistem *Sanitary Landfill*.

Sistem pengumpulan sampah yang terdapat di Kabupaten Balangan menggunakan sistem pengumpulan individu tak langsung dan komunal langsung, yaitu dengan memanfaatkan gerobak dan becak sampah berukuran 1,5 m³ menuju ke TPS (Tempat Penampungan Sementara). Pola pengumpulan dan pengangkutan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: pewadahan, pengumpulan, dan pemindahan.

4.2 Potensi Sumberdaya Alam Kabupaten Balangan

Potensi SDA Kabupaten Balangan pada pembahasan ini akan diuraikan potensi wilayah (geografis), sumberdaya geologis, penggunaan lahan dan Rencana Tata Ruang dalam rangka mengidentifikasi terhadap rencana pembangunan jenis usaha oleh PT. Asabaru Daya Cipta Lestari Kabupaten Balangan.

4.2.1. Potensi Wilayah (Geografis)

Potensi wilayah Kabupaten Balangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian kondisi umum Kabupaten Balangan dapat dianalisis beberapa potensi sebagai berikut:

- 1) **Aspek Geoposisi** Kabupaten Balangan yang dilewati oleh jalur trans Kalimantan yang terkoneksi oleh sistem transportasi darat dengan Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Paser), Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga sangat memungkinkan untuk dilaksanakannya sistem perdagangan dalam kawasan regional Kalimantan, namun disisi lain Kabupaten Balangan merupakan wilayah pedalaman dalam sistem gugus Pegunungan Meratus sehingga tidak memiliki jalur laut yang relatif menjadi variabel penghambat dalam pengiriman antar pulau dengan sarana pelabuhan laut.

- 2) **Aspek iklim**, menunjukkan Kabupaten Balangan memiliki curah hujan tahunan 2000 mm hingga 3000 mm serta suhu udara rata-rata harian 32,0°C yang memungkinkan kemelimpahan keanekaragaman hayati sebagai ciri dari zona iklim tropis basah.
- 3) **Aspek tanah**, menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan memiliki 4 tipe dengan dominan tanah Podsolik Merah Kuning (49,89%) dengan karakteristik kaya akan sumberdaya mineral dan miskin unsur hara memiliki potensi untuk tanaman tahunan yang memiliki kesesuaian dengan kondisi lingkungannya, Latosol (37,58%) dengan jenis potensi untuk pengembangan tanaman tahunan, Aluvial (12,22%) dengan karakteristik tanah yang memiliki unsur hara tinggi serta cocok untuk berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang dipersyaratkan diantaranya tanaman palawija/hortikultura, dan Organosol Glei Humus (0,31%) dengan karakteristik tanah yang terbentuk pada wilayah rawa memiliki potensi untuk pengembangan tanaman khas rawa.
- 4) **Aspek Topografi**, menunjukkan Kabupaten Balangan secara dominan merupakan wilayah dataran (65%), perbukitan (31%) dan pegunungan (4%), dengan kemiringan lereng berkisar antara 2% sampai 30%. Kondisi ini memungkinkan untuk pembangunan infrastruktur yang relatif tidak mengeluarkan biaya tinggi pada wilayah dataran, disisi lain pada wilayah perbukitan dan pegunungan berpotensi untuk pengembangan pariwisata alam.



Gambar 4. 10. Wisata Sungai Maranting Desa Gunung Batu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.

- 5) Aspek Sarana dan Prasarana Dasar, meliputi: (1) infrastruktur jalan mayoritas dalam kondisi sedang-baik (63,7%) namun masih terdapat dengan kondisi rusak dan rusak berat (37,3%), (2) sistem transportasi menggunakan moda transportasi darat yang telah terkoneksi antar wilayah dengan fasilitas angkutan umum dan terminal, (3) parasarana listrik telah menjangkau keseluruhan kecamatan hingga desa-desa di daerah pinggiran, dengan pasokan sumber energi listrik berasal dari PT. PLN Ranting Amuntai dan PT. PLN Cabang Barabai, (4) sumber air bersih dilayani oleh PDAM Tirta Dharma Kabupaten Balangan dengan cakupan pelayanan 84,58% rumah tangga, (5) pengelolaan persampahan dilakukan dengan sistem dan manajemen yang baik, mulai dari tahap pengumpulan dan pengangkutan hingga pengolahan akhir di TPA dengan menggunakan *control landfill*.

4.2.2. Potensi Sumberdaya Geologis

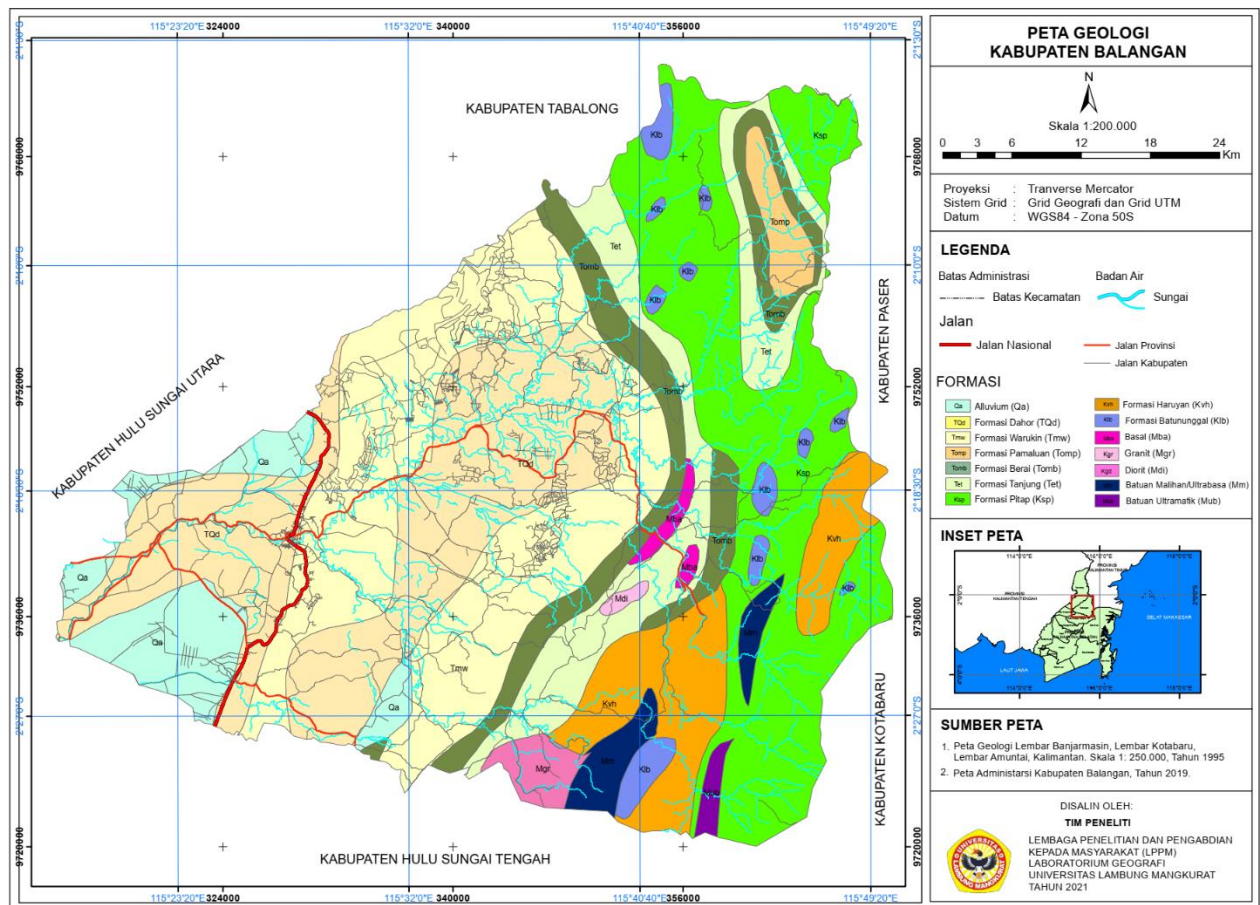
Potensi sumberdaya geologis Kabupaten Balangan menunjukkan kekayaan akan potensi sumberdaya mineral dan pertambangan diantaranya batubara, biji besi, batuan sedimen dan metamorf. Karakteristik masing-masing formasi geologi Kabupaten Balangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 19. Formasi Geologi Kabupaten Balangan

No	Formasi	Luas (Ha)	%	Karakteristik
1	Formasi Pitap (Ksp)	38.354	21,25	Endapan “flysch” berupa perselingan antara batupasir, batulempung, batulanau, serpih, rijang, breksi aneka bahan, olistolit batugamping dan lava basal, diapakan dalam lingkungan rumpang palung-busur; umurnya Kapur Akhir.
2	Formasi Batununggal (Klb)	3.574	1,98	Singkapan batugamping
3	Formasi Haruyan (Kvh)	13.408	7,43	Batuan utama berupa leleran lava bersusunan basal, sisipan breksi aneka bahan, menjemari dengan Formasi Pitap; umurnya diperkirakan Kapur Akhir
4	Diorit (Mdi)	370	0,21	Diorit merupakan padanan andesit tetapi yang intrusif. Batuan diorit tersusun dengan mineral berbutir kasar seperti granit berwarna kelabu. Umumnya diorit tersusun atas mineral plagioklas feldspar dan amphibole. Butiran feldspar berwarna terang dan kristal amphibole berwarna gelap
5	Granit (Mgr)	2.197	1,22	batuan metamorfose yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi sebagai hasil proses karbonisasi unsur-unsur organik.
6	Batuan Ultrabasa (Mm)	1.871	1,04	batuan beku yang kandungan silikanya rendah (18 %, tinggi akan kandungan FeO, rendah akan kandungan kalium dan umumnya kandungan mineral mafiknya lebih dari 90 %. Batuan ultrabasa umumnya terdapat sebagai opiolit
7	Alluvium (Qa)	11.137	6,17	kelompok batuan yang paling muda yang tersusun oleh endapan berukuran kerikil, pasir, lanau, lempung, dan lumpur yang tersebar di morfologi dataran dan sepanjang aliran sungai.
8	Formasi Dahor (TQd)	39.227	21,73	Formasi Dahor (TQd) berumur Plio-Plistosen, secara tidak selaras menindih Formasi Warukin. Formasi ini tersusun oleh batupasir kuarsa bersisipan lempung, lignit dan limonit, mudah hancur, setempat mengandung kerakal, andesit, dan terendapkan pada lingkungan darat dengan ketebalan formasi sekitar 750 meter
9	Formasi Warukin (Tmw)	39.291	8,27	Formasi Warukin (Tmw) berumur Miosen Bawah-Miosen Tengah, tersusun oleh batupasir kuarsa dan lempung, dengan sisipan serpih dan batubara.
10	Formasi Berai (Tomb)	2.435	1,35	Formasi Berai (Tomb) berumur Oligosen, tersusun oleh batugamping dengan sisipan napal dan batulempung. Formasi ini secara selaras menindih Formasi Tanjung, terendapkan pada lingkungan laut dangkal dengan ketebalan formasi mencapai 1250 meter.

No	Formasi	Luas (Ha)	%	Karakteristik
11	Formasi Tanjung (Tet)	14.929	0,56	Formasi Tanjung (Tet) berumur Eosen, tersusun oleh perselingan batupasir, batulempung, batulanau, batugamping, konglomerat dan batubara. Formasi ini terendapkan dalam lingkungan darat sampai laut dangkal dengan ketebalan sekitar 400 meter
12	Basal (Mba)	1.013	21,77	batuan beku vulkanik dimana secara umum mempunyai tekstur halus (afanitik) dan holokristalin
13	Formasi Berai (Tomb)	10.048	5,57	Tersusun atas batugamping berwarna kuning sampai kecoklatan, umunya berlapis dan padat serta keras.
14	Formasi Pamaluan (Tomp)	2.626	1,46	Litologinya terdiri dari batulempung dengan sisipan batupasir, napal, batugamping, diendapkan dalam lingkungan neritik dalam sampai neritik dangkal; umurnya diperkirakan Oligosen Awal-Miosen
Jumlah		180.480	100,00	

Sumber: Analisis Peta Geologi Kabupaten Balangan, Lembar Banjarmasin; Lembar Kotabaru; Lembar Amuntai, 2021



Gambar 4. 11. Peta Geologi Kabupaten Balangan

Distribusi formasi geologi menurut wilayah kecamatan di Kabupaten Balangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 20. Distribusi Formasi Geologi menurut Wilayah Kecamatan Kabupaten Balangan

No.	Kecamatan	Kode	Formasi	Luas (ha)	%
1	Awayan	Tmw	F. Warukin	6.172,58	3,38
2	Awayan	Qtd	Formasi Dahor	4.190,46	2,29
3	Awayan	Qa	Alluvium (Qa)	893,74	0,49
4	Awayan	Tomb	Formasi Beraí	679,95	0,37
5	Awayan	Tet	Formasi Tanjung	336,70	0,18
6	Batumandi	Tmw	F. Warukin	2.541,97	1,39
7	Batumandi	Qtd	Formasi Dahor	4.079,97	2,23
8	Batumandi	Qa	Alluvium (Qa)	4.460,36	2,44
9	Batumandi	Tomb	Formasi Beraí	143,62	0,08
10	Batumandi	Qa	Alluvium (Qa)	0,00	0,00
11	Batumandi	Tmw	F. Warukin	0,00	0,00
12	Batumandi	Tmw	F. Warukin	0,00	0,00
13	Batumandi	Tomb	Formasi Beraí	0,00	0,00
14	Halong	Mu	Batuan Ultramafik	798,02	0,44
15	Halong	Mm	Batuan Malihan	249,77	0,14
16	Halong	MM	Batuan Malihan	2.299,51	1,26
17	Halong	Kpb	Formasi Batununggal	1.167,96	0,64
18	Halong	Kph	Ang Haruyan F.Pitap	8.114,46	4,44
19	Halong	Kp	Formasi Pitap	7.217,71	3,95
20	Halong	Tmw	F. Warukin	1.381,53	0,76
21	Halong	Tetb	Ang Beraí F.Tanjung	0,98	0,00
22	Halong	Tomb	Formasi Beraí	1.273,26	0,70
23	Halong	Tet	Formasi Tanjung	3.814,50	2,09
24	Halong	Mgr	Granit	2.197,45	1,20
25	Halong	MM	Batuan Malihan	0,00	0,00
26	Halong	Kpb	Formasi Batununggal	0,00	0,00
27	Halong	MM	Batuan Malihan	0,00	0,00
28	Halong	Kph	Ang Haruyan F.Pitap	0,00	0,00
29	Halong	MM	Batuan Malihan	0,00	0,00
30	Halong	Mgr	Granit	0,00	0,00
31	Halong	Kph	Ang Haruyan F.Pitap	0,00	0,00
32	Halong	Tetb	Ang Beraí F.Tanjung	0,00	0,00
33	Halong	Kph	Ang Haruyan F.Pitap	0,00	0,00
34	Halong	Tet	Formasi Tanjung	0,00	0,00
35	Halong	Kph	Ang Haruyan F.Pitap	0,00	0,00
36	Halong	Mgr	Granit	0,00	0,00
37	Juai	Tmw	F. Warukin	9.193,35	5,03
38	Juai	Qtd	Formasi Dahor	13.176,48	7,21
39	Juai	Tomb	Formasi Beraí	528,96	0,29
40	Juai	Mdi	Diorit	55,18	0,03
41	Juai	Tet	Formasi Tanjung	127,13	0,07
42	Lampihong	Qtd	Formasi Dahor	6.055,86	3,31
43	Lampihong	Qa	Alluvium (Qa)	3.953,55	2,16
44	Paringin	Tmw	F. Warukin	7.963,92	4,36
45	Paringin	Qtd	Formasi Dahor	4.019,90	2,20

No.	Kecamatan	Kode	Formasi	Luas (ha)	%
46	Paringin	Qa	Alluvium (Qa)	1.829,17	1,00
47	Paringin Selatan	Tmw	F. Warukin	4.686,18	2,56
48	Paringin Selatan	Qtd	Formasi Dahor	3.915,77	2,14
49	Tebing Tinggi	Kph	Ang Haruyan F.Pitap	3.749,24	2,05
50	Tebing Tinggi	Tomp	Formasi Pamaluan	2.626,21	1,44
51	Tebing Tinggi	Tomb	Formasi Beraí	2.617,85	1,43
52	Tebing Tinggi	Mm	Batuan Malihan	822,81	0,45
53	Tebing Tinggi	Kpb	Formasi Batununggal	334,68	0,18
54	Tebing Tinggi	Kpb	Formasi Batununggal	489,20	0,27
55	Tebing Tinggi	Kpb	Formasi Batununggal	159,87	0,09
56	Tebing Tinggi	Kph	Ang Haruyan F.Pitap	1.544,40	0,84
57	Tebing Tinggi	Kp	Formasi Pitap	31.136,50	17,04
58	Tebing Tinggi	Kpb	Formasi Batununggal	117,93	0,06
59	Tebing Tinggi	Kpb	Formasi Batununggal	695,88	0,38
60	Tebing Tinggi	Kpb	Formasi Batununggal	114,18	0,06
61	Tebing Tinggi	Kpb	Formasi Batununggal	186,47	0,10
62	Tebing Tinggi	Tet	Formasi Tanjung	4.158,82	2,28
63	Tebing Tinggi	Kpb	Formasi Batununggal	123,66	0,07
64	Tebing Tinggi	Kpb	Formasi Batununggal	60,37	0,03
65	Tebing Tinggi	Kpb	Formasi Batununggal	123,62	0,07
66	Tebing Tinggi	Tmw	F. Warukin	7.351,12	4,02
67	Tebing Tinggi	Qtd	Formasi Dahor	3.788,22	2,07
68	Tebing Tinggi	Tetb	Ang Beraí F.Tanjung	2.127,08	1,16
69	Tebing Tinggi	Tetb	Ang Beraí F.Tanjung	306,90	0,17
70	Tebing Tinggi	Tomb	Formasi Beraí	4.804,58	2,63
71	Tebing Tinggi	Tkb	Kasale/Basal Kasale	288,22	0,16
72	Tebing Tinggi	Mdi	Diorit	315,05	0,17
73	Tebing Tinggi	Tkb	Kasale/Basal Kasale	724,72	0,40
74	Tebing Tinggi	Tet	Formasi Tanjung	6.491,55	3,55
75	Tebing Tinggi	Kph	Ang Haruyan F.Pitap	0,00	0,00
76	Tebing Tinggi	Tetb	Ang Beraí F.Tanjung	0,00	0,00
77	Tebing Tinggi	Tet	Formasi Tanjung	0,00	0,00
78	Tebing Tinggi	Kp	Formasi Pitap	0,00	0,00
79	Tebing Tinggi	Tetb	Ang Beraí F.Tanjung	0,00	0,00
80	Tebing Tinggi	Tet	Formasi Tanjung	0,00	0,00
81	Tebing Tinggi	Tetb	Ang Beraí F.Tanjung	0,00	0,00
82	Tebing Tinggi	Kp	Formasi Pitap	0,00	0,00
83	Tebing Tinggi	Tetb	Ang Beraí F.Tanjung	0,00	0,00
84	Tebing Tinggi	Tomb	Formasi Beraí	0,00	0,00
85	Tebing Tinggi	Tetb	Ang Beraí F.Tanjung	0,00	0,00
86	Tebing Tinggi	Tet	Formasi Tanjung	0,00	0,00
87	Tebing Tinggi	Tomb	Formasi Beraí	0,00	0,00
88	Tebing Tinggi	Tkb	Kasale/Basal Kasale	0,00	0,00
89	Tebing Tinggi	Tomb	Formasi Beraí	0,00	0,00
90	Tebing Tinggi	Tet	Formasi Tanjung	0,00	0,00
JUMLAH				182.779,07	100,00

Sumber: Analisis Peta Geologi Kabupaten Balangan, Lembar Banjarmasin; Lembar Kotabaru; Lembar Amuntai, 2021

Kekayaan potensi sumberdaya geologis berupa mineral dan sumberdaya pertambangan, sebagai dampak aspek geologi lingkungan memberikan berbagai potensi sumberdaya lain diantaranya pariwisata yaitu obyek wisata alam, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 4. 21. Obyek Wisata Kabupaten Balangan yang berada di wilayah KPH Balangan

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nama obyek Wisata Alam
1	Tebing Tinggi (RPH)	1) Ju'uh, 2) Sungsum, 3) Auh, 4) Dayak Pitap, 5) Langkap, 6) Mayanau, 7) Simpang Bumbuan, 8) Simpang Nadum, 9) Gunung Batu, 10) Tebing Tinggi	1) Sungsum "Gunung Batu", 2) Gunung Hantanung, 3) Gunung Hauk, 4) Arus Deras Nanai
2	Halong (RPH)	1) Marajai, 2) Mauya, 3) Buntut Pilanduk, 4) Uren, 5) Liyu, 6) Puyun, 7) Gunung Riut, 8) Mamantang, 9) Aniungan, 10) Binuang Santang, 11) Karya, 12) Hauwai, 13) Nungka, 14) Gunung Manau	1) Air Terjun "Tumate", 2) Air Terjun Manyandar, 3) Air terjun "Pamandian Anggang", 4) Air terjun Tayak, 5) Air terjun Buntar/Sawang, 6) Air terjun "Tanjung/Jalamu", 7) Puncak Balawanai, 8) Gua Berangin Belawan, 9) Gua batu batulis, 10) Air Panas Desa Liyu
3	Paringin	Lok Batung, Dahai	
4	Juai	Lalayau, Tawahan, Mihu	

Sumber: KPH Balangan, 2021

4.2.3. Potensi Kependudukan

Potensi kependudukan dapat dianalisis dari usia produktif yang diketahui bahwa usia produktif 15-64 tahun (68,29%), usia tidak produktif 0-14 tahun (28,02%), >65 tahun (3,7%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa dari aspek umur penduduk di Kabupaten Balangan memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan berbagai usaha khususnya ketersediaan SDM lapangan kerja, disisi lain Kabupaten Balangan masih tertinggal dari penguatan SDM yang dibuktikan dengan Skor IPM 68,82 yang berada di peringkat 11 diantara 13 kab/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

4.2.4. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi Kabupaten Balangan berdasarkan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 menunjukkan dominan pada aspek pertambangan dan penggalian (61,21%), diikuti oleh beberapa sektor diantaranya pertanian, kehutanan dan perikanan (12,02%), perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor (5,55%). Kegiatan

UMKM dominan pada klasifikasi usaha mikro (98,92%), kecil (0,99%) dan menengah (0,09%) dengan klaster UMKM pada jenis usaha makanan/minuman (41,72%), pertanian (12,67%), dan Jasa (12,53%).

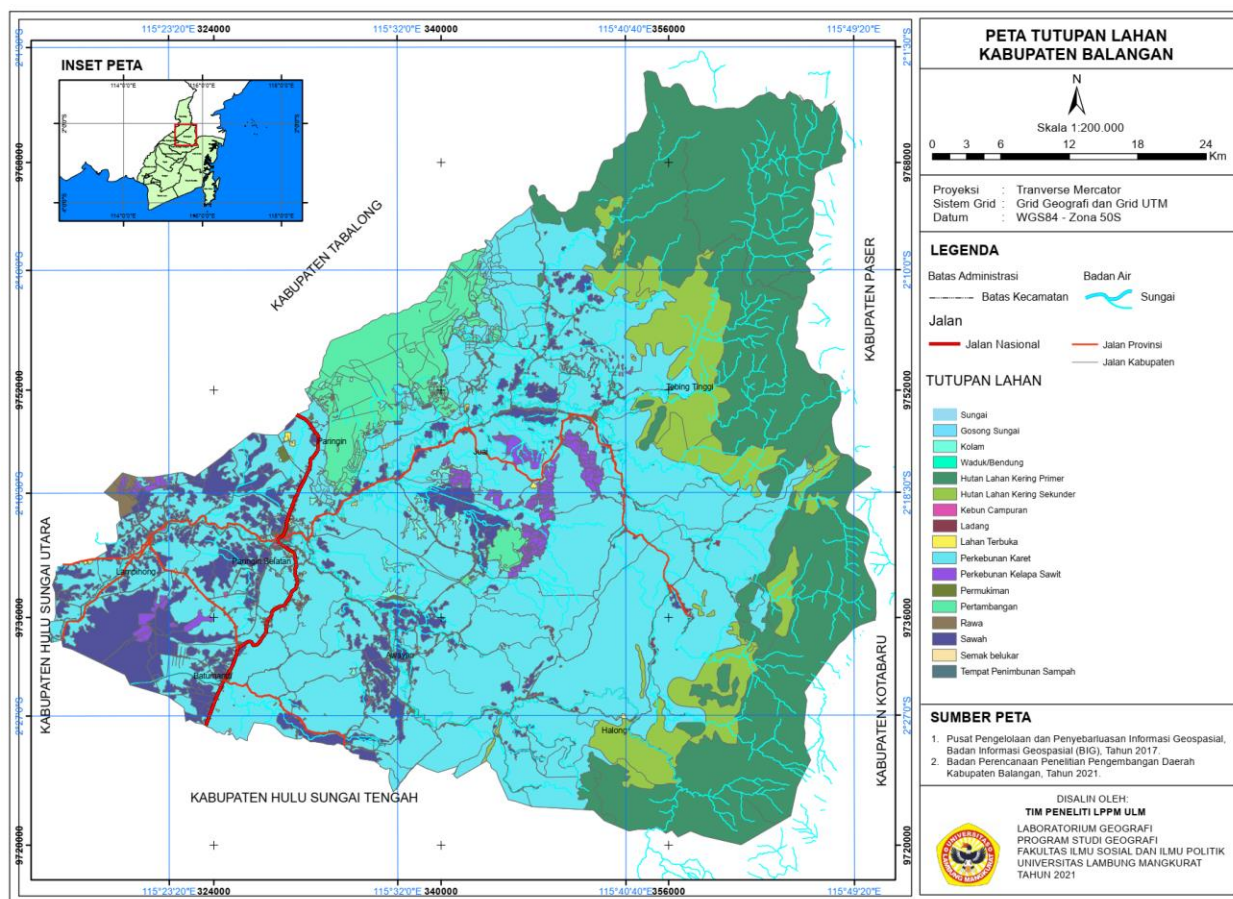
4.2.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan segala bentuk campur tangan atau kegiatan manusia baik secara siklis maupun permanen terhadap suatu kumpulan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materiil maupun spiritual atau kedua-duanya. Penggunaan lahan di Kabupaten Balangan di dominasi oleh jenis perkebunan karet (49,61%) dan hutan lahan kering primer (25,62%), selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 22. Penggunaan Lahan Kabupaten Balangan

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Gosong Sungai	13,61	0,01
2	Hutan Lahan Kering Primer	46.829,08	25,62
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	13.797,41	7,55
4	Kebun Campuran	163,02	0,09
5	Kolam	934,02	0,51
6	Ladang	196,34	0,11
7	Lahan Terbuka	305,14	0,17
8	Perkebunan Karet	90.685,15	49,61
9	Perkebunan Kelapa Sawit	2.755,08	1,51
10	Permukiman	2.897,06	1,58
11	Pertambangan	9.314,33	5,10
12	Rawa	348,36	0,19
13	Sawah	14.099,18	7,71
14	Semak belukar	1,71	0,00
15	Sungai	415,39	0,23
16	Tempat Penimbunan Sampah	11,03	0,01
17	Waduk/Bendung	45,07	0,02
	Grand Total	182.810,97	100,00

Sumber: Analisis Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Balangan, 2020



Gambar 4. 12. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Balangan

Perkebunan karet sebagaimana data penggunaan lahan di Kabupaten Balangan pada tabel di atas merupakan jenis usaha primadona masyarakat Kabupaten Balangan. Luas perkebunan karet pada tahun 2021 yaitu 37.454 ha (94,45%), selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 23. Luas Komoditas Perkebunan Kabupaten Balangan

No.	Kecamatan	Luas Komoditas Perkebunan (Ha)				JUMLAH
		Karet	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	
1	Tebing Tinggi	4413	85	106	139	4743
2	Halong	4951	143	61	66	5221
3	Juai	3264	45	40	15	3364
4	Paringin	5616	15	51	20	5702
5	Awayan	7286	57	113	124	7580
6	Batumandi	6740	599	108	79	7526
7	Lampihong	2182	119	83	71	2455
8	Paringin Selatan	3002	22	29	12	3065
	JUMLAH	37.454	1.085	591	526	39.656
	%	94,45	2,74	1,49	1,33	100,00

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, 2021 (diolah)

Produksi komoditas perkebunan khususnya karet di Kabupaten Balangan yaitu 30.959 ton (97,81%) yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Balangan. Selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 24. Jumlah Produksi Perkebunan (ton) Kabupaten Balangan

No.	Kecamatan	Produksi Komoditas Perkebunan (ton)				JUMLAH
		Karet	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	
1	Tebing Tinggi	3693	-	51	4,5	3748,5
2	Halong	3541	108	28	7	3684
3	Juai	2521	47	21,6	1,4	2591
4	Paringin	5552	26	25	1,8	5604,8
5	Awayan	6058	97	67	7	6229
6	Batumandi	5055	42	34	7	5137,5
7	Lampihong	1726	33	47	6	1812
8	Paringin Selatan	2813	21	11	1	2845,6
	JUMLAH	30.959	373	285	36	31.652
	%	97,81	1,18	0,90	0,11	100,00

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, 2021 (diolah)

Produksi komoditas perkebunan khususnya karet di Kabupaten Balangan yaitu 0,83 ton/ha yang diikuti oleh komoditas kopi 0,63 ton/ha, kelapa 0,48 ton/ha dan kelapa sawit 0,3 ton/ha. Selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 25. Produktivitas Komoditas Perkebunan Kabupaten Balangan

No.	Kecamatan	Produktivitas Komoditas Perkebunan (ton/ha)				JUMLAH
		Karet	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	
1	Tebing Tinggi	0,84	-	0,48	0,03	0,79
2	Halong	0,72	0,76	0,46	0,11	0,71
3	Juai	0,77	1,04	0,54	0,09	0,77
4	Paringin	0,99	1,73	0,49	0,09	0,98
5	Awayan	0,83	1,70	0,59	0,06	0,82
6	Batumandi	0,75	0,07	0,31	0,09	0,68
7	Lampihong	0,79	0,28	0,57	0,08	0,74
8	Paringin Selatan	0,94	0,94	0,38	0,08	0,93
	JUMLAH	0,83	0,34	0,48	0,63	0,80

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, 2021 (diolah)

Penggunaan lahan di Kabupaten Balangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Balangan mayoritas menggunakan lahan untuk kegiatan perkebunan dengan jenis komoditas utamanya adalah karet. Selanjutnya untuk tanaman pangan di Kabupaten Balangan menunjukkan jagung merupakan jenis komoditas dengan nilai

produktivitas tertinggi, diikuti ubi (kayu dan jalar) dan padi, selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 26. Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Balangan

No.	Jenis Tanaman Pangan	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas	Ranking
1	Jagung	2.896	60.969	21,05	1
2	Ubi Kayu	176	2.343	13,31	2
3	Ubi Jalar	30	260	8,67	3
4	Padi Sawah	43.256	174.551	4,04	4
5	Padi Ladang	4.845	11.403	2,25	5
6	Kacang Tanah	165	203	1,23	6
7	Kedelai	270	318	1,18	7
8	Kacang Hijau	100	28	0,28	8
	Balangan	51,738	250,075		

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021 (diolah)

Produktivitas tanaman sayur-sayuran di Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa tanaman terong sebagai tanaman sayur-sayuran dengan produktivitas tertinggi (65,26), diikuti keitmun (64,67), tomat (54,60), cabai rawit (42,56), dan cabai besar (39,40), selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 4. 27. Produktivitas Tanaman Sayur-Sayuran

No.	Kecamatan	Kacang Panjang	Cabai Besar	Cabai Rawit	Tomat	Terung	Buncis	Ketimun	Kangkung	Bayam	Jamur
1	Tebing Tinggi	40,00	50,00	51,00	65,00	65,00	50,00	46,67	-	-	-
2	Halong	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-
3	Juai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
4	Paringin	22,22	-	31,43	55,00	46,67	60,00	56,67	5,11	-	-
5	Awayan	18,50	-	20,75	45,00	70,00	60,00	35,00	5,00	-	-
6	Batumandi	51,67	52,38	50,00	78,89	138,75	40,00	-	-	-	-
7	Lampihong	45,00	52,00	52,00	73,33	60,00	-	57,14	4,83	9,00	-
8	Paringin Selatan	40,00	17,85	26,36	35,00	27,50	5,00	46,50	7,00	7,00	0,01
	Jumlah	36,85	39,40	42,56	54,60	65,26	37,77	64,67	5,11	8,50	0,01

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, 2021 (diolah)

4.2.5. Rencana Tata Ruang

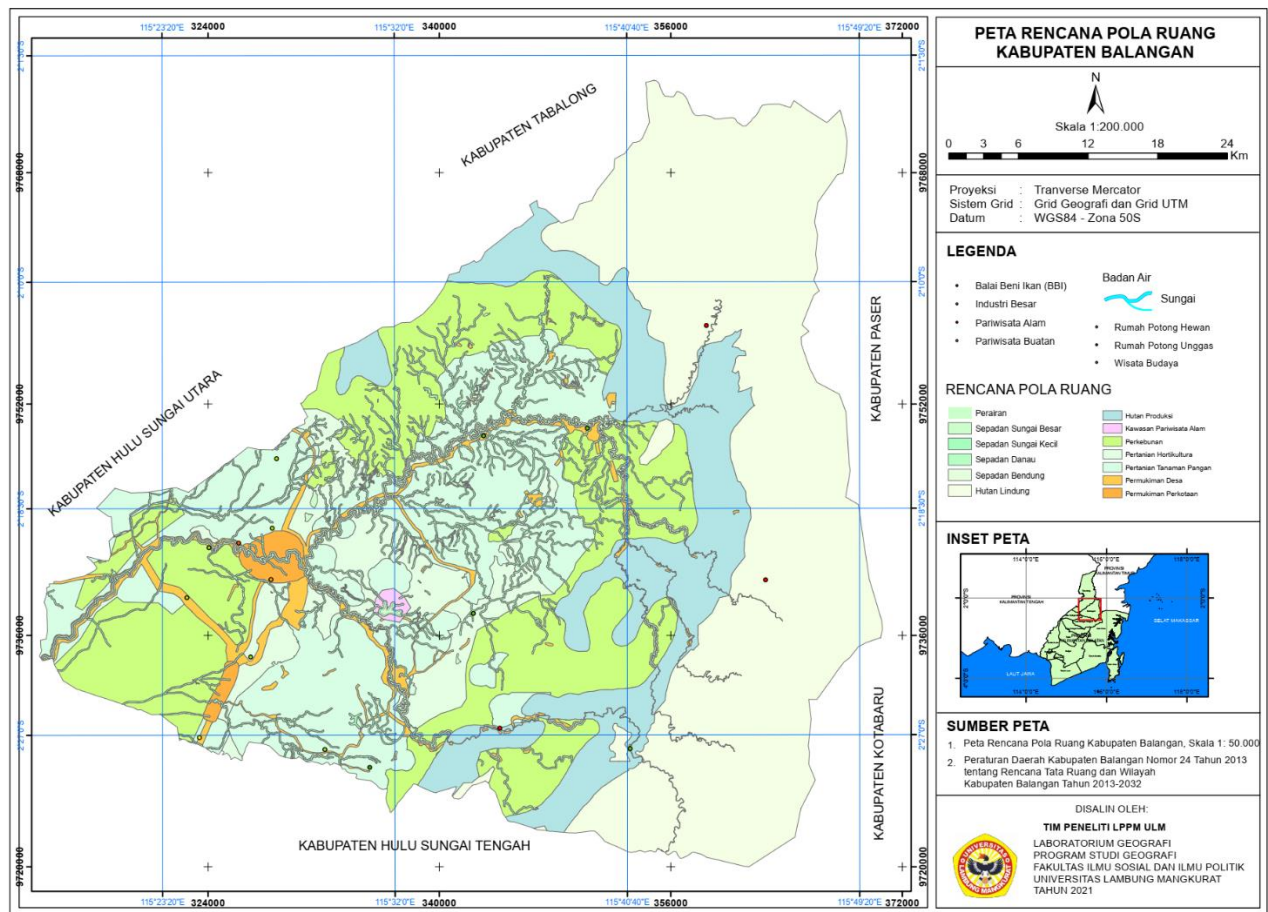
Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Analisis potensi SDA dengan basis pada Rencana Tata Ruang diharapkan bahwa setiap potensi yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Balangan belum tentu sesuai dengan arah dan fungsi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Rencana pola ruang Kabupaten Balangan yang memuat distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 28. Rencana Pola Ruang Kabupaten Balangan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
A	Kawasan Lindung	72.565	40
1	Perairan	1.047	0,572
2	Sempadan Sungai Besar	2.946	1,609
3	Sempadan Sungai Kecil	8.195	4,476
4	Sempadan Danau	59	0,032
5	Sempadan Bendung	6	0,003
6	Hutan Lindung	60.313	32,943
B	Kawasan Budidaya	110.514	60
1	Hutan Produksi	23.899	13,054
2	Kawasan Pariwisata Alam	295	0,161
3	Perkebunan	37.396	20,426
4	Pertanian Hortikultura	10.262	5,605
5	Pertanian Tanaman Pangan	32.715	17,869
6	Permukiman Desa	4.516	2,467
7	Permukiman Perkotaan	1.431	0,782
	Total	183.079	100

Sumber: Analisis Peta Rencana Pola Ruang, RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032



Gambar 4. 13. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Balangan

Kawasan lindung dengan fungsi memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya secara umum berada pada penguasaan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.435/Menhut-II/2009, Tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah yang kelola KPH Balangan memiliki luas kawasan hutan $\pm$ 90.709 ha, kawasan Hutan Lindung (66.373 ha), Hutan Produksi (24.336 ha) (BPKH Wil. V. 2016), selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 29. Pembagian Blok KPH Balangan

No	Pembagian Blok KPH Balangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	66.373	73,17
	1.1. Blok Inti	37.779	41,65
	1.2. Blok Pemanfaatan	28.594	31,52
2	Hutan Produksi	24.336	26,83
	2.1. Blok Pemanfaatan HHK-HT	17.896	19,73
	2.2. Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasling & HHBK	4.499	1,50
	2.3. Blok Pemberdayaan Masyarakat	4.499	4,96

No	Pembagian Blok KPH Balangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
	2.4. Blok Perlindungan	580	0,64
	Jumlah	90.709	100,00

Sumber: KPH Balangan, 2021

RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 telah menetapkan 16 Kawasan Strategis Khusus (KSK) dengan fokus pada bidang ekonomi dan sosial. KSK bidang ekonomi fokus pada bidang pertanian dengan menetapkan 2 KSK Agropolitan yaitu KSK Kota Tani Agropolitan Batumandi dan KSK Kota Tani Agropolitan Paringin, selanjutnya pada bidang sosial meliputi kegiatan wisata, pusat pemerintahan, kawasan adat dan kegiatan keagamaan. Selengkapanya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 30. Kawasan Strategis Kabupaten Balangan (KSK)

No.	Kawasan Strategis Kabupaten Balangan (KSK)	Nama KSK	Luas (ha)	%
1	KSK Bidang Ekonomi	KSK Kota Tani Agropolitan Batumandi	1.107,02	0,60
2	KSK Bidang Ekonomi	KSK Pertanian Pangan Berkelanjutan Awaysan	4.695,54	2,56
3	KSK Bidang Ekonomi	KSK Pertanian Pangan Berkelanjutan Batumandi	2.960,23	1,62
4	KSK Bidang Ekonomi	KSK Pertanian Pangan Berkelanjutan Juai	3.594,93	1,96
5	KSK Bidang Ekonomi	KSK Pertanian Pangan Berkelanjutan Paringin	1.521,75	0,83
6	KSK Bidang Ekonomi	KSK Kota Tani Agropolitan Paringin	29,63	0,02
7	KSK Bidang Ekonomi	KSK Pertanian Pangan Berkelanjutan Lampihong	712,48	0,39
8	KSK Bidang Ekonomi	KSK Pertanian Pangan Berkelanjutan Paringin Selatan	2.199,98	1,20
9	KSK bidang sosial budaya	KSK Kawasan Desa Wisata Danau Baruh Bahinu	394,29	0,22
10	KSK bidang sosial budaya	KSK Kawasan Kegiatan Wisata Religius Makam Datuk Kandang Haji	609,21	0,33
11	KSK bidang sosial budaya	KSK Kawasan Adat Halong	609,21	0,33
12	KSK bidang sosial budaya	KSK Kawasan Adat Dayak Pitap	609,21	0,33
13	KSK bidang sosial budaya	KSK Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten	434,11	0,24
14	KSK bidang sosial budaya	KSK Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten	106,96	0,06
15	KSK bidang sosial budaya	KSK Pusat Kegiatan Keagamaan	34,08	0,02
16	KSK bidang sosial budaya	KSK Pusat Kegiatan Keagamaan	131,62	0,07
	Jumlah		183.079,27	100,00

Sumber: Analisis Peta Rencana Kawasan Strategis, RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032

4.3. NIR (Nilai Indikasi Rata-rata)

Kegiatan updating PBB-P2 tidak terlepas dari kondisi harga pasar tanah terbaru pada waktu dan tempat dilakukannya penilaian. NIR merupakan langkah awal di mana proses tersebut melahirkan suatu informasi tentang harga pada masing-masing blok tanah, kelas tanah yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam menentukan kebijakan zona nilai tanah (ZNT). Proses mencari nilai indikasi rata-rata dilakukan mengacu pada data transaksi jual beli dan lain-lain per dusun, desa atau kelurahan maupun kecamatan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dengan saat dilakukan kegiatan updating dan evaluasi. Adapun cara pengolahan data transaksi, sebagai berikut:

Sumber data penunjang dalam kegiatan Updating dan Revaluasi Nilai Objek Pajak PBB-P2 ini berupa data Sekunder yang diperoleh dari Instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Dari data sekunder tersebut, dilakukan verifikasi, investigasi serta wawancara terhadap status kepemilikan subjek pajak berkaitan dengan kepemilikan objek pajak, alamat objek pajak, serta melakukan penilaian atas objek pajak tersebut berkaitan dengan luas tanah, harga tanah/M2, luas bangunan, harga bangunan/M2 dalam bentuk data Primer, yang selanjutnya diolah untuk menjadi data dalam menentukan kebijakan untuk instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berkenaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

4.4. Keluaran Laporan

1. CONTOH BUKU 1 “Berisikan data PBB-P2 sebelum dilakukan updating”

Tabel 4. 31. Contoh Format Laporan Untuk Buku 1 Data Awal PBB-P2 Sebelum Dilakukan Updating dan Revaluasi Nilai Objek Pajak PBB-P2 di Kabupaten Balangan Tahun 2022

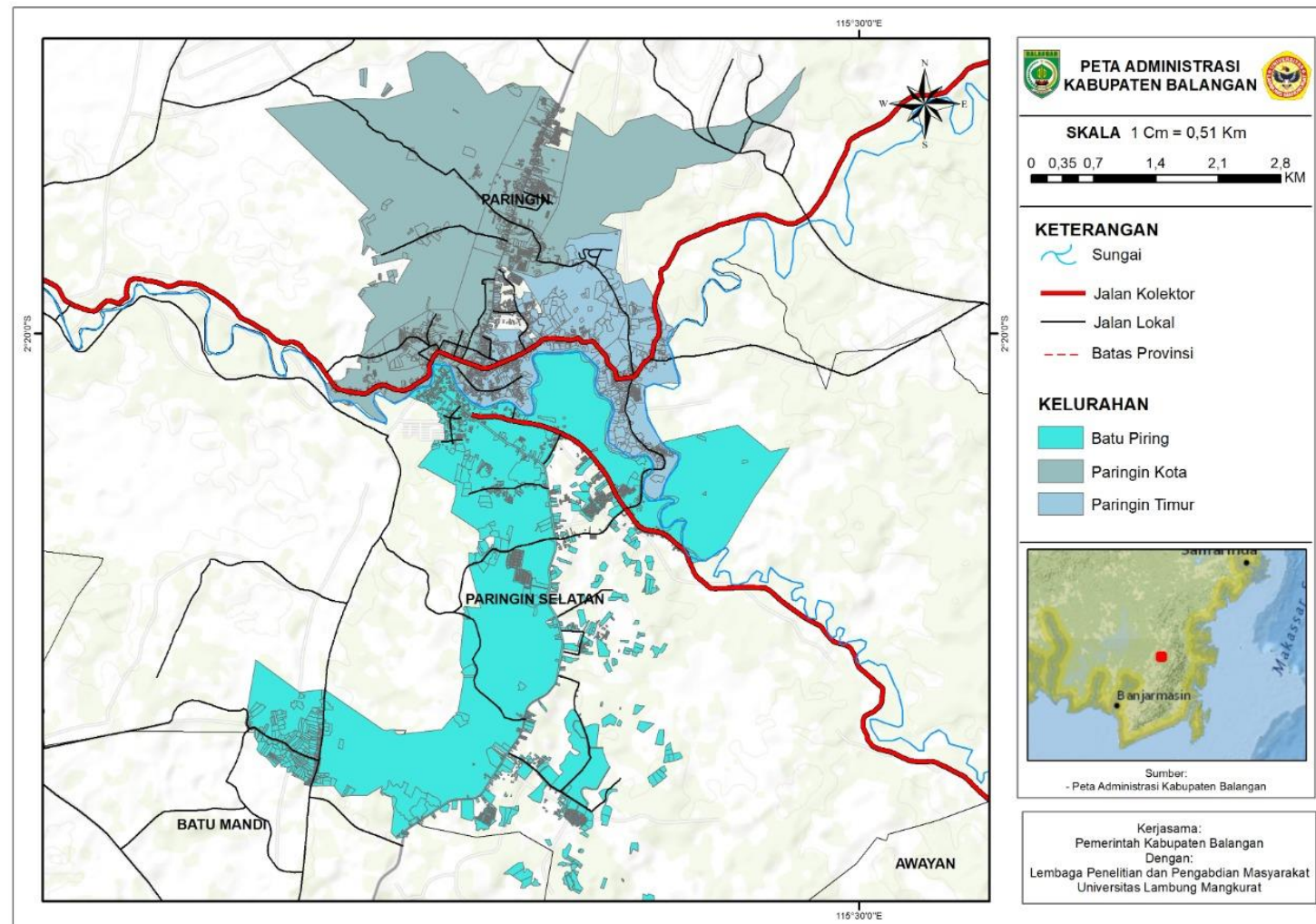
No	NOP	Wajib Pajak		RT OP	RW OP	Kd ZNT	Kd Kls Tnh	Kd Kls Bng	Alamat WP		NJOP Bumi		NJOP Bangunan		NJOP Bumi + Bangunan (Rp.)	NJOP TKP (Rp.)	NJOP KP (Rp.)	SPPT PBB-P2 Terhutang		
		Nama	Alamat						Jl.	Kel	Luas (m2)	Harga (Rp./M2)	NJOP Bumi	Luas (m2)					Harga (Rp./M2)	NJOP Bng (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 12x13	15	16	17=15x16	18= 14+17	19	20= 18-19	21= 20 x tarif
1	631101000900002940	HARYONO,H	GUNUGN PANDAU	5			093	040	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	20.000	1.200	24.000.000	0	-	-	24.000.000	-	24.000.000	24.000
2	631102001100005880	AGUS MUSLIM	KO.CITRA PERMAI BL	7			091	040	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	10.000	2.450	24.500.000	0	-	-	24.500.000	-	24.500.000	24.500
3	631102001900006520	ABDUL FATAH	JL A. YANI RICA	11	0		082	025	LingkarTimur	PARINGIN TIMUR	200	48.000	9.600.000	112	595.000	66.640.000	76.240.000	10.000.000	66.240.000	66.240
4	631104003200100520	SRI NORHASANAI	JL KO MARITAM	1			077	026	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	120	160.000	19.200.000	80	505.000	40.400.000	59.600.000	10.000.000	49.600.000	49.600
5	631104003200100660	TABERANI,SE	JL.A.YANI	1			076	023	Lingkar Timur	PARINGIN TIMUR	171	200.000	34.200.000	102	823.000	83.946.000	118.146.000	10.000.000	108.146.000	108.146
6	631104003200100930	ASMADI	JL.A. YANI	1			073	025	Lingkar Timur	PARINGIN TIMUR	180	335.000	60.300.000	150	595.000	89.250.000	149.550.000	10.000.000	139.550.000	139.550
7	631104003200100950	SYAHMADI	JL.A. YANI	1			073	031	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	160	335.000	53.600.000	100	225.000	22.500.000	76.100.000	10.000.000	66.100.000	66.100
8	631104003200101090	FATIMAH, HAJJAH	JL.A. YANI	1			076	025	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	300	200.000	60.000.000	150	595.000	89.250.000	149.250.000	10.000.000	139.250.000	139.250
9	631104003200101230	FAISAL,H	JL.A.YANI	1			073	023	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	250	335.000	83.750.000	200	823.000	164.600.000	248.350.000	10.000.000	238.350.000	238.350
10	631104003200200320	HALIK	JL.GUNUNG PANDAU	6			080	031	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	69	82.000	5.658.000	60	225.000	13.500.000	19.158.000	10.000.000	9.158.000	10.000
11	631104003200200520	RUDI RESNAWAN	LI A. KURNIA	2			075	033	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	200	243.000	48.600.000	67	162.000	10.854.000	59.454.000	10.000.000	49.454.000	49.454
12	631104003200200540	JOHANSYAH,H	JLAHMAD KURNIA	2			081	033	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	96	64.000	6.144.000	65	162.000	10.530.000	16.674.000	10.000.000	6.674.000	10.000
13	631104003200200570	NOR HANAFIAH	JLAHMAD KURNIA	2			077	033	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	45	160.000	7.200.000	32	162.000	5.184.000	12.384.000	10.000.000	2.384.000	10.000
14	631104003200200580	M. ANWAR	JLAHMAD KURNIA	2			075	031	A. YANI	PARINGIN TIMUR	151	243.000	36.693.000	133	225.000	29.925.000	66.618.000	10.000.000	56.618.000	56.618
15	631104003200200620	KUSMALI	JLAHMAD KURNIA	2			077	029	TEMBUS MESJID Y	PARINGIN TIMUR	230	160.000	36.800.000	91	310.000	28.210.000	65.010.000	10.000.000	55.010.000	55.010
16	631104003200200640	MASIAH/HAMLI G	JL TEPIAN	2			077	033	A. YANI	PARINGIN TIMUR	60	160.000	9.600.000	40	162.000	6.480.000	16.080.000	10.000.000	6.080.000	10.000
17	631104003200200660	SYAHRUII	JL TEPIAN	2			077	033	A. YANI	PARINGIN TIMUR	77	160.000	12.320.000	50	162.000	8.100.000	20.420.000	10.000.000	10.420.000	10.420
18	631104003200200700	RUSDIANSYAH	JLAHMAD KURNIA	2			077	029	A. YANI	PARINGIN TIMUR	119	160.000	19.040.000	104	310.000	32.240.000	51.280.000	10.000.000	41.280.000	41.280
19	631104003200200710	MAYUS AKHMAD,	JLAHMAD KURNIA	2			075	026	TEMBUS MESJID Y	PARINGIN TIMUR	168	243.000	40.824.000	99	505.000	49.995.000	90.819.000	10.000.000	80.819.000	80.819
20	631104003200200740	IDA,HJ	JL TEPIAN	2			077	031	TEMBUS MESJID Y	PARINGIN TIMUR	115	160.000	18.400.000	72	225.000	16.200.000	34.600.000	10.000.000	24.600.000	24.600
21	631104003200200830	KASMAN .PURBA	JL RATU ZALEHA	2			076	029	A. YANI	PARINGIN TIMUR	149	200.000	29.800.000	90	310.000	27.900.000	57.700.000	10.000.000	47.700.000	47.700
22	631104003200300500	D E S I	JL. GUNUNG PANDAU	6			079	031	A. YANI	PARINGIN TIMUR	217	103.000	22.351.000	40	225.000	9.000.000	31.351.000	10.000.000	21.351.000	21.351
23	631104003200300740	MUSLIM EFFENDI	JL. GUNUNG PANDAU	3			076	028	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	270	200.000	54.000.000	168	365.000	61.320.000	115.320.000	10.000.000	105.320.000	105.320
24	631104003200300860	ALI SUBHAN	JL AHMAD KURNIA	12			080	024	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	200	82.000	16.400.000	72	700.000	50.400.000	66.800.000	10.000.000	56.800.000	56.800
25	631104003200300910	MURSIAH	JL. GUNUNG PANDAU	3	0		078	031	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	80	128.000	10.240.000	32	225.000	7.200.000	17.440.000	10.000.000	7.440.000	10.000
26	631104003200301000	YUSMANSYAH .H	GUNUNG PANDAU	3	0		080	031	M. Naid	PARINGIN TIMUR	80	82.000	6.560.000	63	225.000	14.175.000	20.735.000	10.000.000	10.735.000	10.735
27	631104003200301010	DIDIT TANTOKO	JL. GUNUNG PANDAU	3	0		080	029	A. YANI	PARINGIN TIMUR	105	82.000	8.610.000	84	310.000	26.040.000	34.650.000	10.000.000	24.650.000	24.650
28	631104003200301120	NINENG ERAWAT	JL GUNUNG PANDAU	3			076	024	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	410	200.000	82.000.000	153	700.000	107.100.000	189.100.000	10.000.000	179.100.000	179.100
29	631104003200301140	ANCAH .H / UMI	JL. GUNUNG PANDAU	3			077	033	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	100	160.000	16.000.000	52	162.000	8.424.000	24.424.000	10.000.000	14.424.000	14.424
30	631104003200301220	NURBAINAH .HJ	JL. GUNUNG PANDAU	3			078	029	JL. GUNUNG PAN	PARINGIN TIMUR	242	128.000	30.976.000	77	310.000	23.870.000	54.846.000	10.000.000	44.846.000	44.846

2. CONTOH BUKU 2 “Berisikan Data PBB-P2 Hasil Updating”

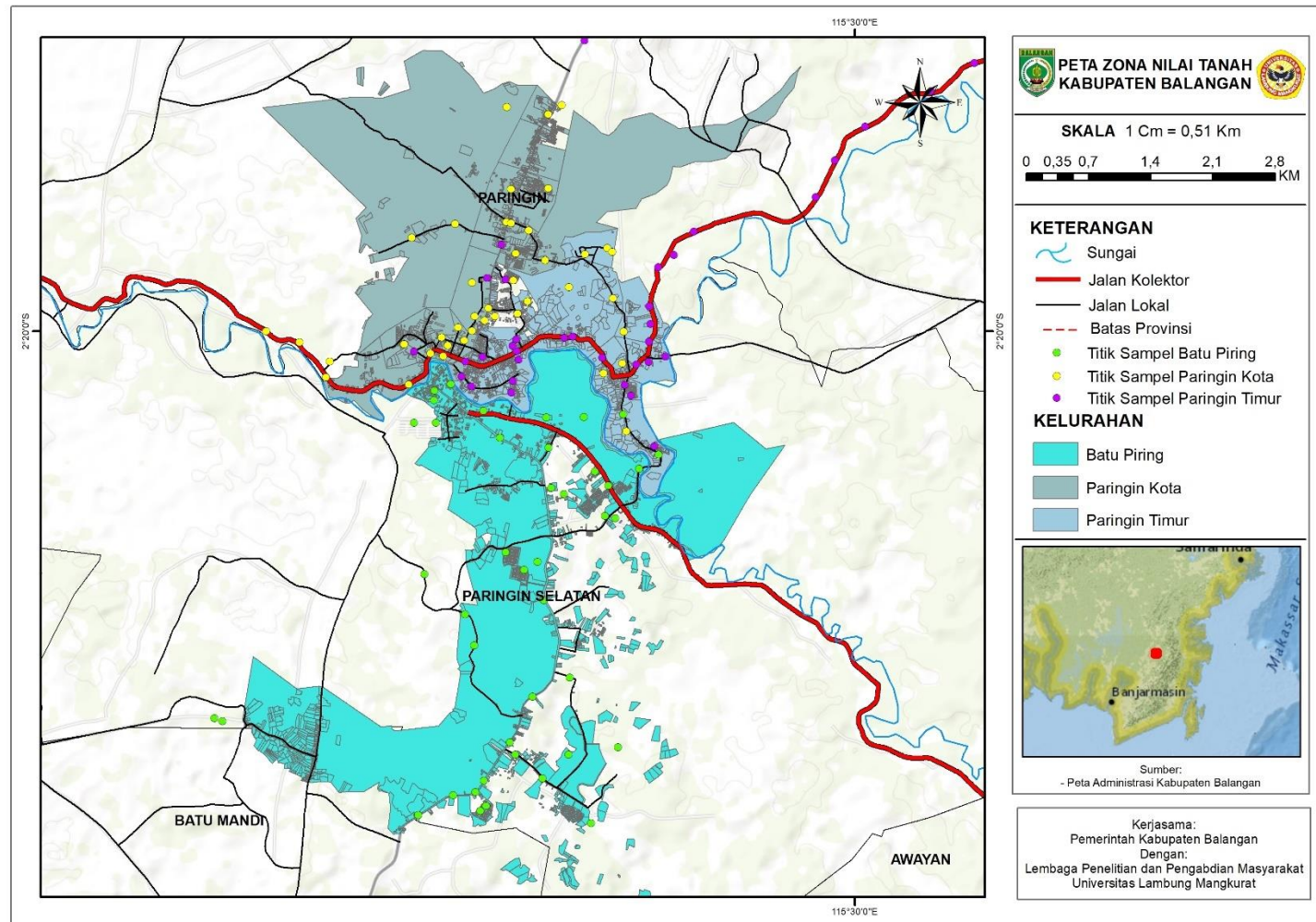
Tabel 4. 32. Contoh Format Laporan Untuk Buku 2 Data Hasil Setelah Dilakukan Updating dan Revaluasi Nilai Objek Pajak PBB-P2 di Kabupaten Balangan Tahun 2022

No	NOP	Wajib Pajak		RT OP	RW OP	Kd ZNT	Kd Kls Tnh	Kd Kls Bng	Alamat WP		NJOP Bumi		NJOP Bangunan		NJOP Bumi + Bangunan (Rp.)	NJOP TKP (Rp.)	NJOP KP (Rp.)	SPPT PBB- P2 Terhutang		
		Nama	Alamat						Jl.	Kel	Luas (m2)	Harga (Rp./M2)	NJOP Bumi	Luas (m2)					Harga (Rp./M2)	NJOP Bng (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 12x13	15	16	17=15x16	18= 14+17	19	20= 18-19	21= 20 x tarif
1	631101000900002940	HARYONO,H	GUNUNG PANDAU	5			065	040	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	93	1.032.000	95.976.000	51	50.000	2.550.000	98.526.000	-	98.526.000	98.526
2	631102001100005880	AGUS MUSLIM	KO.CITRA PERMAI BL	7			071	010	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	130	464.000	60.320.000	36	6.950.000	250.200.000	310.520.000	-	310.520.000	310.520
3	631102001900006520	ABDUL FATAH	JL. A. YANI RICA	11	0		071	040	LingkarTimur	PARINGIN TIMUR	300	464.000	139.200.000	72	50.000	3.600.000	142.800.000	10.000.000	132.800.000	132.800
4	631104003200100520	SRI NORHASANA	JL KO MARITAM	1			072	040	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	120	394.000	47.280.000	80	50.000	4.000.000	51.280.000	10.000.000	41.280.000	41.280
5	631104003200100660	TABERANI,SE	JLA.YANI	1			061	040	Lingkar Timur	PARINGIN TIMUR	168	1.573.000	264.264.000	99	50.000	4.950.000	269.214.000	10.000.000	259.214.000	259.214
6	631104003200100930	ASMADI	JLA. YANI	1			061	040	Lingkar Timur	PARINGIN TIMUR	151	1.573.000	237.523.000	133	50.000	6.650.000	244.173.000	10.000.000	234.173.000	234.173
7	631104003200100950	SYAHMADI	JLA. YANI	1			061	040	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	110	1.573.000	173.030.000	96	50.000	4.800.000	177.830.000	10.000.000	167.830.000	167.830
8	631104003200101090	FATIMAH, HAJJAH	JLA. YANI	1			061	040	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	208	1.573.000	327.184.000	156	50.000	7.800.000	334.984.000	10.000.000	324.984.000	324.984
9	631104003200101230	FAISAL,H	JLA.YANI	1			058	040	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	172	2.013.000	346.236.000	150	50.000	7.500.000	353.736.000	10.000.000	343.736.000	343.736
10	631104003200200320	HALIK	JL.GUNUNG PANDAU	6			065	040	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	180	1.032.000	185.760.000	112	50.000	5.600.000	191.360.000	10.000.000	181.360.000	181.360
11	631104003200200520	RUDI RESNAWAN	LJ A.KURNIA	2			061	040	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	200	1.573.000	314.600.000	67	50.000	3.350.000	317.950.000	10.000.000	307.950.000	307.950
12	631104003200200540	JOHANSYAH,H	JLAHMAD KURNIA	2			061	040	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	96	1.573.000	151.008.000	0	50.000	-	151.008.000	10.000.000	141.008.000	141.008
13	631104003200200570	NOR HANAFIAH	JLAHMAD KURNIA	2			067	040	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR	45	802.000	36.090.000	32	50.000	1.600.000	37.690.000	10.000.000	27.690.000	27.690
14	631104003200200580	M. ANWAR	JLAHMAD KURNIA	2			058	040	A. YANI	PARINGIN TIMUR	151	2.013.000	303.963.000	133	50.000	6.650.000	310.613.000	10.000.000	300.613.000	300.613
15	631104003200200620	KUSMALI	JLAHMAD KURNIA	2			069	040	TEMBUS MESJID Y	PARINGIN TIMUR	84	614.000	51.576.000	66	50.000	3.300.000	54.876.000	10.000.000	44.876.000	44.876
16	631104003200200640	MASIAH/HAMLI C	JL TEPIAN	2			068	040	A. YANI	PARINGIN TIMUR	60	702.000	42.120.000	40	50.000	2.000.000	44.120.000	10.000.000	34.120.000	34.120
17	631104003200200660	SYAHRUJI	JL TEPIAN	2			067	040	A. YANI	PARINGIN TIMUR	77	802.000	61.754.000	50	50.000	2.500.000	64.254.000	10.000.000	54.254.000	54.254
18	631104003200200700	RUSDIANSYAH	JLAHMAD KURNIA	2			067	040	A. YANI	PARINGIN TIMUR	119	802.000	95.438.000	104	50.000	5.200.000	100.638.000	10.000.000	90.638.000	90.638
19	631104003200200710	MAYUS AKHMAD	JLAHMAD KURNIA	2			061	040	TEMBUS MESJID Y	PARINGIN TIMUR	168	1.573.000	264.264.000	99	50.000	4.950.000	269.214.000	10.000.000	259.214.000	259.214
20	631104003200200740	IDA,HJ	JL TEPIAN	2			061	040	TEMBUS MESJID Y	PARINGIN TIMUR	115	1.573.000	180.895.000	72	50.000	3.600.000	184.495.000	10.000.000	174.495.000	174.495
21	631104003200200830	KASMAN .PURBA	JL RATU ZALEHA	2			061	040	A. YANI	PARINGIN TIMUR	149	1.573.000	234.377.000	90	50.000	4.500.000	238.877.000	10.000.000	228.877.000	228.877
22	631104003200300500	D E S I	JL. GUNUNG PANDAU	6			065	040	A. YANI	PARINGIN TIMUR	217	1.032.000	223.944.000	40	50.000	2.000.000	225.944.000	10.000.000	215.944.000	215.944
23	631104003200300740	MUSLIM EFFENDI	JL. GUNUNG PANDAU	3			068	040	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	270	702.000	189.540.000	168	50.000	8.400.000	197.940.000	10.000.000	187.940.000	187.940
24	631104003200300860	ALI SUBHAN	JL AHMAD KURNIA	12			069	040	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	110	614.000	67.540.000	60	50.000	3.000.000	70.540.000	10.000.000	60.540.000	60.540
25	631104003200300910	MURSIHAH	JL. GUNUNG PANDAU	3	0		071	040	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	80	464.000	37.120.000	45	50.000	2.250.000	39.370.000	10.000.000	29.370.000	29.370
26	631104003200301000	YUSMANSYAH .H	GUNUNG PANDAU	3	0		071	040	M. Naid	PARINGIN TIMUR	80	464.000	37.120.000	63	50.000	3.150.000	40.270.000	10.000.000	30.270.000	30.270
27	631104003200301010	DIDIT TANTOKO	JL. GUNUNG PANDAU	3	0		071	040	A. YANI	PARINGIN TIMUR	110	464.000	51.040.000	0	50.000	-	51.040.000	10.000.000	41.040.000	41.040
28	631104003200301120	NINENG ERAWAT	JL GUNUNG PANDAU	3			065	040	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	410	1.032.000	423.120.000	153	50.000	7.650.000	430.770.000	10.000.000	420.770.000	420.770
29	631104003200301140	ANCAH .H / UMI .	JL. GUNUNG PANDAU	3			074	040	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	150	285.000	42.750.000	70	50.000	3.500.000	46.250.000	10.000.000	36.250.000	36.250
30	631104003200301220	NURBAINAH .HJ	JL. GUNUNG PANDAU	3			067	040	JL. GUNUNG PAN	PARINGIN TIMUR	120	802.000	96.240.000	87	50.000	4.350.000	100.590.000	10.000.000	90.590.000	90.590
31	631104003200301230	DAIM MARULLAH	JL. GUNUNG PANDAU	3			071	040	JL. GUNUNG PAN	PARINGIN TIMUR	90	464.000	41.760.000	72	50.000	3.600.000	45.360.000	10.000.000	35.360.000	35.360
32	631104003200301270	WAHYUNI	JL. GUNUNG PANDAU	3			072	040	JL. GUNUNG PAN	PARINGIN TIMUR	60	394.000	23.640.000	33	50.000	1.650.000	25.290.000	10.000.000	15.290.000	15.290
33	631104003200301300	HARNAWATI	JL. GUNUNG PANDAU	3			065	040	JL. GUNUNG PAN	PARINGIN TIMUR	279	1.032.000	287.928.000	84	50.000	4.200.000	292.128.000	10.000.000	282.128.000	282.128
34	631104003200301470	HASAN .H	JL. GUNUNG PANDAU	3			067	040	JL. GUNUNG PAN	PARINGIN TIMUR	300	802.000	240.600.000	160	50.000	8.000.000	248.600.000	10.000.000	238.600.000	238.600
35	631104003200301480	HAPSAH	JL. GUNUNG PANDAU	3			067	040	JL. GUNUNG PAN	PARINGIN TIMUR	420	802.000	336.840.000	79	50.000	3.950.000	340.790.000	10.000.000	330.790.000	330.790

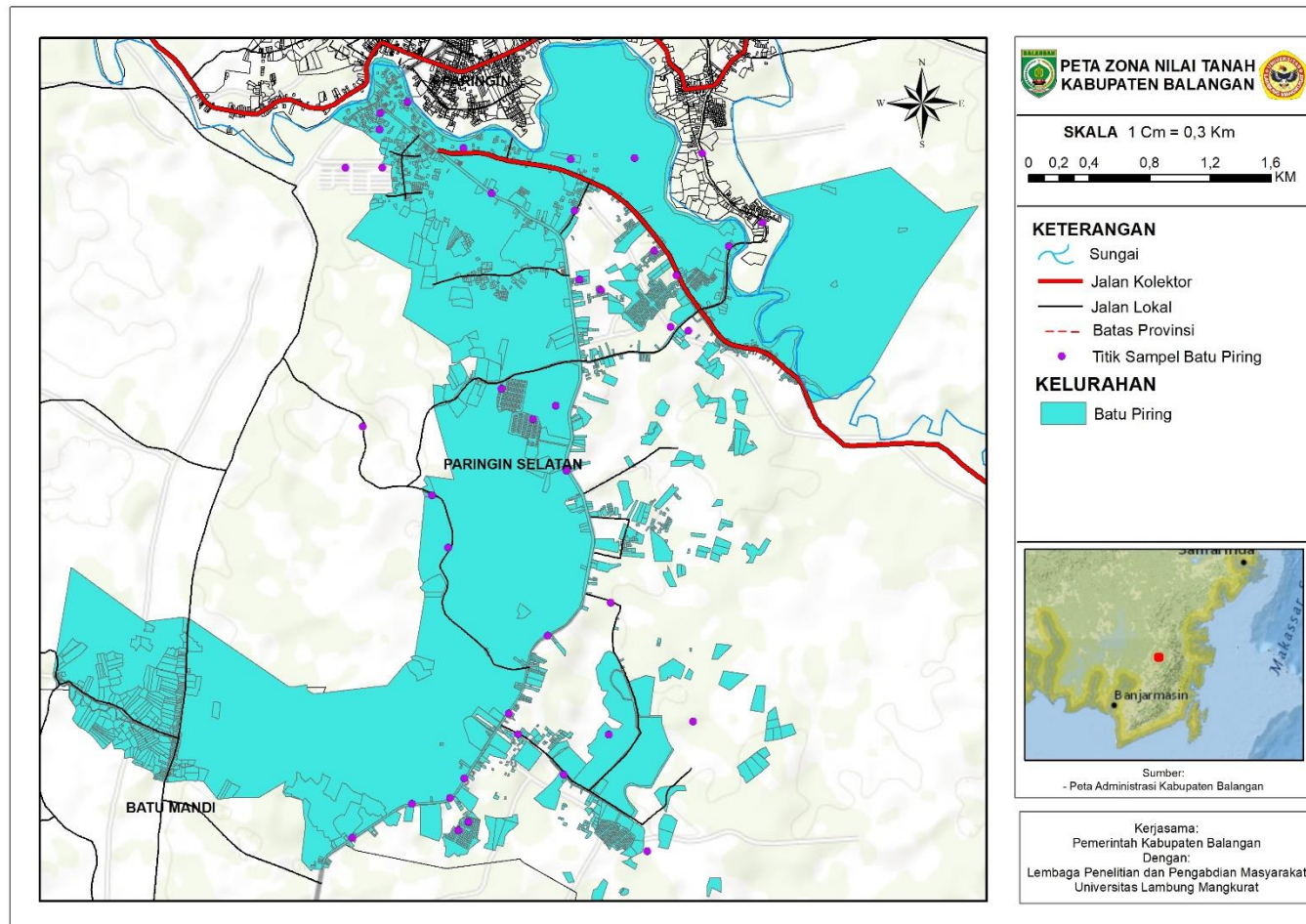
4.5. Peta Lokasi Survey



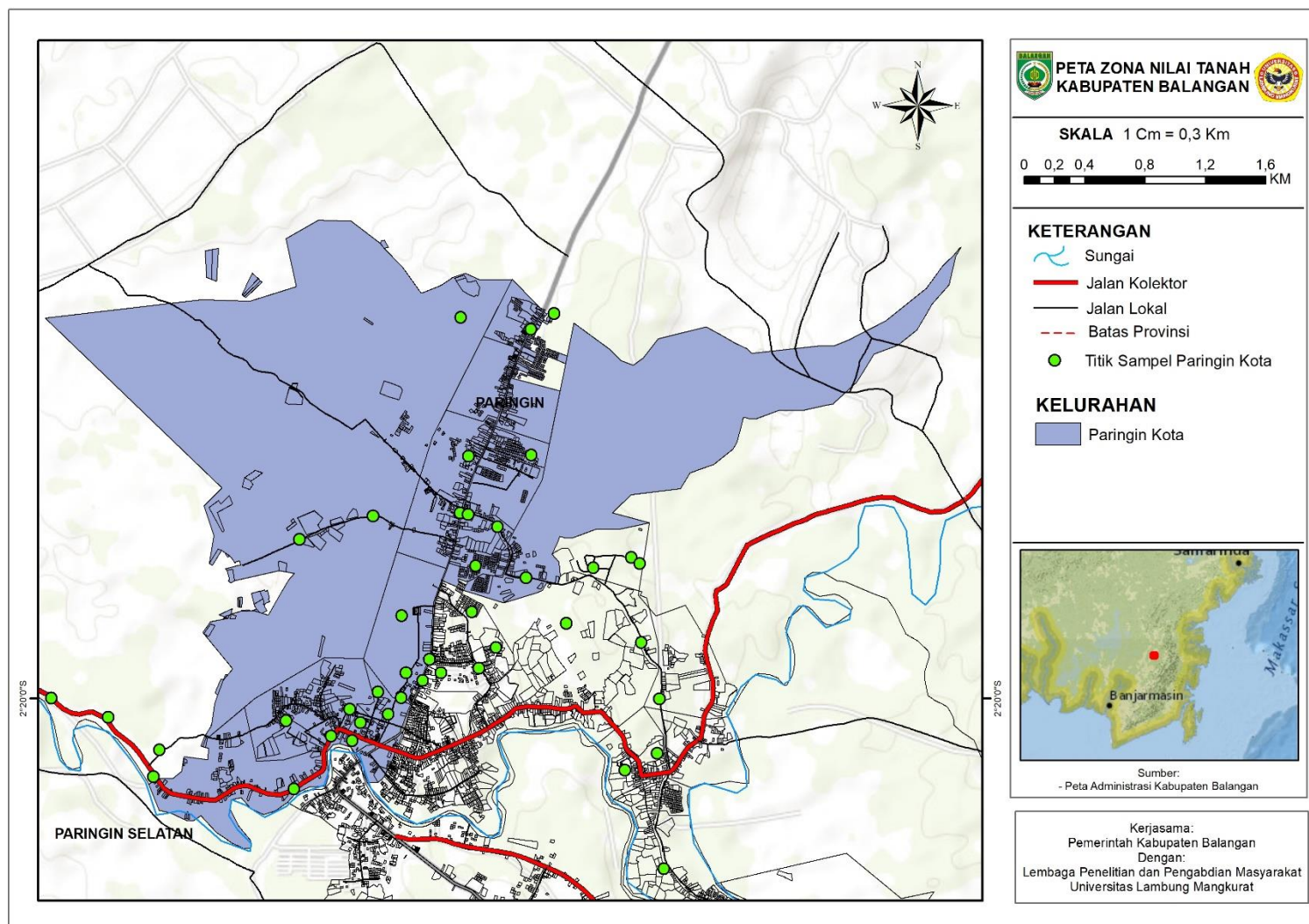
Gambar 4. 14. Peta Lokasi Survey Kabupaten Balangan



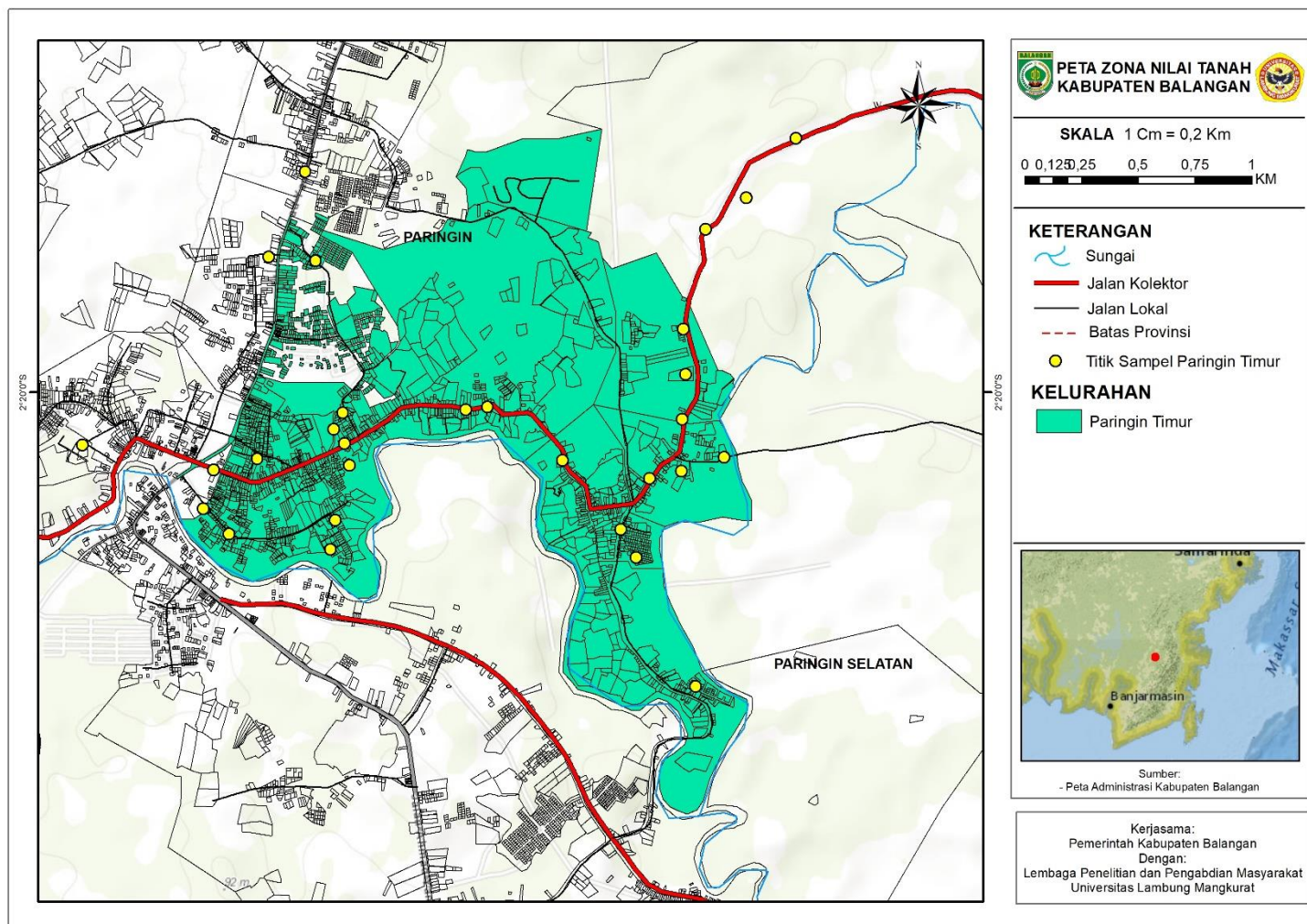
Gambar 4. 15. Peta Sebaran Titik Sampel Zonasi Nilai Tanah Kabupaten Balangan



Gambar 4. 16. Peta Titik Sampel ZNT Kelurahan Batu Piring



Gambar 4. 17. Peta Titik Sampel ZNT Kelurahan Paringin Kota



Gambar 4. 18. Peta Titik Sampel ZNT Kelurahan Paringin Timur

4.6.Data Resume Hasil Survey

Pelaksanaan kegiatan survey updating dan revaluasi NJOP yang baru dilakukan di tiga Kelurahan/ desa tersebut menghasilkan sebuah informasi berharga berupa Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) harga Bumi yang dirangkum berdasarkan RT dan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk masing-masing Desa/Kelurahan. Informasi ini disajikan dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Balangan, dalam rangka menetapkan besaran harga dan menghadapi sebuah proses klaim masyarakat terhadap besaran harga tanah di masing-masing wilayah tersebut, walaupun harga untuk masing-masing objek pajak yang ada telah dimasukkan dalam kelas tertentu dari klasifikasi harga bumi maupun harga bangunan.

4.6.1. NIR Harga Bumi

Variasi nilai indikasi rata-rata untuk harga bumi di Kelurahan Paringin Timur yang pada saat dilakukan survey terdapat 12 RT yang terdiri dari 1.576 objek pajak PBB-P2 namun yang dikaji adalah sebanyak 109 objek pajak. Berdasarkan hasil survey lapangan yang telah diolah tersebut, dapat disajikan data dan informasi bahwa indikasi rata-rata harga bumi untuk Kelurahan Paringin Timur adalah dimana di tahun dasar adalah sebesar Rp. 98.616,-/m² menjadi Rp. 951.757,-/m², seperti terlihat pada Tabel 4.33. Nilai tersebut diperoleh dari besarnya NJOP Bumi tahun dasar sekitar Rp.11,4 miliar, menjadi sekitar Rp. 50, 7 miliar setelah pembaharuan data.

Dari Tabel 4.33. terlihat bahwa secara umum berdasarkan hasil survey, terjadi peningkatan NJOP Bumi yang berarti di hampir seluruh RT di Kelurahan Paringin Timur, dengan tingkat peningkatan yang beragam berdasarkan RT. Kondisi ini juga mengakibatkan NIR Bumi juga meningkat, dimana peningkatan NIR Bumi tertinggi terjadi di RT. 5 yaitu sebesar 3.345,91% dimana meningkat menjadi Rp. 1.555.998,-/m² dibandingkan dengan NIR tahun dasar yang sebesar Rp. 45.155,-/m². Kemudian secara berurutan diikuti oleh berbagai

RT yang lain seperti di RT. 6 (1.884,94%), RT. 7 (1.000,45%), dan RT. 3 (799,57%). Namun, secara rata-rata, kenaikan NIR Bumi di Kelurahan Paringin Timur adalah sebesar 865,12%

Tabel 4. 33. Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) Harga Tanah Hasil Updating Berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Timur, Tahun 2022

RT	Objek Pajak Bumi Tahun Dasar			Objek Pajak Bumi Update			Peningkatan (%)
	NJOP Bumi (Rp)	Luas Bumi (m2)	NIR Bumi (Rp/m2)	NJOP Bumi (Rp)	Luas Bumi (m2)	NIR Bumi (Rp/m2)	
1	1.174.125.000	5.213	225.230	5.969.147.000	4.926	1.211.763	438,01
2	1.031.818.000	4.098	251.786	5.632.543.000	4.039	1.394.539	453,86
3	1.761.086.000	10.611	165.968	10.546.572.000	7.064	1.493.003	799,57
4	1.211.596.000	6.324	191.587	4.959.793.000	6.223	797.010	316,00
5	1.194.166.000	26.446	45.155	8.343.263.000	5.362	1.555.998	3345,91
6	1.022.949.750	15.140	67.566	6.119.658.000	4.563	1.341.148	1884,94
7	703.425.000	18.343	38.348	1.629.786.000	3.862	422.006	1000,45
9	377.840.000	3.902	96.832	1.032.816.000	2.768	373.127	285,33
10	737.142.000	6.498	113.441	2.602.921.000	4.995	521.105	359,36
11	1.021.328.000	6.016	169.769	2.680.505.000	5.455	491.385	189,44
12	1.142.681.000	12.899	88.587	1.187.604.000	3.940	301.422	240,26
13	28.640.000	179	160.000	31.635.000	111	285.000	78,13
Total	11.406.796.750	115.669		50.736.243.000	53.308		
Rerata			98.616			951.757	865,12

Sumber : Data Survey, Diolah 2022

Selanjutnya hampir serupa dengan kelurahan Paringin Timur untuk Kelurahan Paringin Kota yang terdapat sebanyak 14 RT yang terdiri dari 2.313 objek pajak PBB-P2 namun yang dikaji adalah sebanyak 146 objek pajak. Berdasarkan hasil survey lapangan yang telah diolah tersebut, dapat disajikan data dan informasi bahwa indikasi rata-rata harga bumi untuk Kelurahan Paringin Kota adalah dimana di tahun dasar sebesar Rp. 172.259,-/m2 menjadi Rp. 782.788,-/m2, seperti terlihat pada Tabel 4.34. Nilai tersebut diperoleh dari besarnya NJOP Bumi tahun dasar sekitar Rp.7,1 miliar, menjadi sekitar Rp. 27, 8 miliar setelah pembaharuan data.

Dari Tabel 4.34. terlihat bahwa secara umum berdasarkan hasil survey, terjadi peningkatan NJOP Bumi yang berarti di hampir seluruh RT di Kelurahan Paringin Kota, dengan tingkat peningkatan yang beragam berdasarkan RT. Kondisi ini juga mengakibatkan

NIR Bumi juga meningkat, dimana peningkatan NIR Bumi tertinggi terjadi di RT. 3 yaitu sebesar 1.376,29% dimana meningkat menjadi Rp. 1.962.449,-/m2 dibandingkan dengan NIR tahun dasar yang sebesar Rp. 132.931,-/m2. Kemudian secara berurutan diikuti oleh berbagai RT yang lain seperti di RT. 5 (935,16%), RT. 1 (740,50%), dan RT. 2 (601,34%). Namun, secara rata-rata, kenaikan NIR Bumi di Kelurahan Paringin Kota adalah sebesar 354,42%

Tabel 4. 34. Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) Harga Tanah Hasil Updating Berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Kota, Tahun 2022

RT	Objek Pajak Bumi Tahun Dasar			Objek Pajak Bumi Update			Peningkatan (%)
	NJOP Bumi (Rp)	Luas Bumi (m2)	NIR Bumi (Rp/m2)	NJOP Bumi (Rp)	Luas Bumi (m2)	NIR Bumi (Rp/m2)	
1	452.260.000	2.212	204.458	3.801.238.000	2.212	1.718.462	740,50
2	437.510.000	1.306	335.000	3.160.080.000	1.345	2.349.502	601,34
3	713.175.000	5.365	132.931	5.237.776.000	2.669	1.962.449	1376,29
4	430.679.000	2.493	172.755	696.928.000	2.503	278.437	61,17
5	732.613.000	3.766	194.533	7.311.895.000	3.631	2.013.741	935,16
6	562.208.000	2.591	216.985	2.284.182.000	2.494	915.871	322,09
7	570.463.000	3.774	151.156	1.095.515.000	3.380	324.117	114,43
8	300.945.000	1.265	237.901	472.996.000	1.906	248.162	4,31
9	258.800.000	2.192	118.066	202.350.000	2.004	100.973	-14,48
10	679.600.000	5.791	117.355	1.632.350.000	4.590	355.632	203,04
11	792.154.000	3.874	204.480	716.285.000	4.309	166.230	-18,71
12	718.241.000	4.081	175.996	725.672.000	2.454	295.710	68,02
13	398.120.000	1.939	205.322	262.040.000	1.551	168.949	-17,72
17	152.115.000	1.142	133.201	237.432.000	513	462.830	247,47
Total	7.198.883.000	41.791		27.836.739.000	35.561		
Rerata			172.259			782.788	354,42

Sumber: Data Survey, Diolah 2022

Untuk Kelurahan Batu Piring, yang memiliki sebanyak 2.412 objek pajak namun yang dikaji hanya sebanyak 140 objek pajak dari data yang terkumpul, menghasilkan variasi kenaikan nilai indikasi rata-rata harga bumi yang berbeda dengan apa yang terjadi di Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Paringin Kota (lihat Tabel 4.35.) dimana setelah dilakukan pembaharuan data dari tahun dasar, peningkatan NIR Bumi di kelurahan ini sebesar 394,45%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 2 kelurahan yang diamati sebelumnya. NJOP Bumi dari sejumlah data yang diamati di desa ini meningkat menjadi

Rp.15,2 miliar dari Rp.6,2 miliar di tahun dasar, dengan luasan wilayah sebesar 56.674 m² di tahun dasar dan 27.872 m² setelah pembaharuan data

Bila diamati secara lebih dalam, berdasarkan RT, terlihat bahwa peningkatan terbesar terjadi pada RT.6 dengan peningkatan sebesar 4.783,67%, diikuti dengan RT.7 (2.194,43%), dan RT.5 (1.186,76%), dan seterusnya. Namun, secara umum peningkatan NIR Bumi di kelurahan ini hanya sebesar 394,45%.

Tabel 4. 35. Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) Harga Tanah Hasil Updating Berdasarkan RT di Kelurahan Batu Piring, Tahun 2022

RT	Objek Pajak Bumi Tahun Dasar			Objek Pajak Bumi Update			Peningkatan (%)
	NJOP Bumi (Rp)	Luas Bumi (m ²)	NIR Bumi (Rp/m ²)	NJOP Bumi (Rp)	Luas Bumi (m ²)	NIR Bumi (Rp/m ²)	
1	410.815.000	1.820	225.723	772.392.000	1785	432.713	91,70
2	328.887.000	1.382	237.979	552.898.000	1430	386.642	62,47
3	592.103.000	2.586	228.965	1.577.694.000	2136	738.621	222,59
4	657.365.000	3.183	206.524	2.533.558.000	2905	872.137	322,29
5	179.353.000	1.292	138.818	1.832.692.000	1026	1.786.250	1186,76
6	394.332.750	11.963	32.963	2.208.631.000	1372	1.609.789	4783,67
7	139.980.000	4.875	28.714	409.786.000	622	658.820	2194,43
8	414.357.000	2.731	151.724	1.113.183.000	2824	394.187	159,81
9	298.080.000	2.802	106.381	781.876.000	1988	393.298	269,71
10	575.742.000	3.298	174.573	488.921.000	1795	272.379	56,03
11	523.574.000	3.462	151.235	952.684.000	3386	281.360	86,04
12	908.569.000	10.628	85.488	585.205.000	2751	212.724	148,83
13	436.824.000	3.295	132.572	276.950.000	1091	253.850	91,48
14	186.880.000	1.460	128.000	703.830.000	1470	478.796	274,06
15	115.360.000	1.120	103.000	286.360.000	900	318.178	208,91
16	12.288.000	96	128.000	27.360.000	96	285.000	122,66
17	77.453.000	681	113.734	98.825.000	295	335.000	194,55
Total	6.251.962.750	56.674		15.202.845.000	27.872		
Rerata			110.314			545.452	394,45

Sumber: Data Survey, diolah 2022

4.6.2. Nilai Objek Pajak Bangunan

Selain objek pajak berupa bumi, objek pajak berupa bangunan juga digambarkan dalam kajian ini. Secara umum, di Kelurahan Paringin Timur, yang terbagi menjadi 12 RT,

yang mencakup areal seluas 574 Hektar, terjadi peningkatan dan juga penurunan di berbagai RT pada kelurahan Paringin Timur. Tetapi jika dihitung secara keseluruhan Kelurahan Paringin Timur mengalami peningkatan nilai jual objek pajak berupa bangunan sebesar 390%, Rata-rata NJOP Bangunan di tahun dasar sebesar Rp.194.341,- menjadi 952.271,-/m² setelah pembaharuan. (lihat Tabel 4.36.)

Tabel 4. 36. Nilai Bangunan Hasil Pembaharuan Data Berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Timur, Tahun 2022

RT	Objek Pajak Bangunan Tahun Dasar			Objek Pajak Bangunan Update			Peningkatan (%)
	NJOP Bangunan (Rp)	Luas Bng (m ²)	NJOP Bng (Rp/m ²)	NJOP Bangunan (Rp)	Luas Bng (m ²)	NJOP Bng (Rp/m ²)	
1	261.867.000	2.571	101.854	113.650.000	2.273	50.000	-50,91
2	56.130.000	2.211	25.387	110.100.000	2.202	50.000	96,95
3	50.712.000	3.371	15.044	171.750.000	3.435	50.000	232,37
4	273.073.000	2.726	100.174	164.800.000	3.296	50.000	-50,09
5	128.400.000	2.149	59.749	3.542.050.000	2.828	1.252.493	1996,27
6	422.460.000	1.978	213.579	9.489.325.000	2.807	3.380.593	1482,83
7	19.745.000	1.716	11.506	2.207.350.000	2.384	925.902	7946,83
9	348.605.000	1.260	276.671	1.442.590.000	2.755	523.626	89,26
10	501.252.000	1.296	386.769	963.136.000	2.339	411.773	6,46
11	495.182.000	1.800	275.101	1.191.570.000	3.375	353.058	28,34
12	224.583.000	1.220	184.084	302.246.000	2.429	124.432	-32,40
13	302.447.000	1.150	262.997	406.136.000	1.607	252.729	-3,90
Total	2.442.674.000	12.569		19.544.403.000	20.524		
Rerata			194.341			952.271	390,00

Sumber: Data Survey, Diolah 2022

Pada Kelurahan Paringin Kota NJOP Bangunan mengalami Penurunan di setiap RT. Penurunan terbesar berada di RT 17 dengan NJOP pada tahun dasar sebesar Rp. 457.24,-/M² Menjadi Rp. 50.000,- / M² (lihat Tabel 4.37.). Secara umum, penurunan NJOP Bangunan di Kelurahan ini mencapai -80,81% dari secara rata-rata sebesar Rp.352.163,-/m² menjadi Rp. 67.593,-/m².

Tabel 4. 37. Nilai Bangunan Hasil Pembaharuan Data Berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Kota Tahun 2022

RT	Objek Pajak Bangunan Tahun Dasar			Objek Pajak Bangunan Update			Peningkatan (%)
	NJOP Bangunan (Rp)	Luas Bng (m2)	NJOP Bng (Rp/m2)	NJOP Bangunan (Rp)	Luas Bng (m2)	NJOP Bng (Rp/m2)	
1	162.738.000	770	211.348	43.900.000	878	50.000	-76,34
2	143.101.000	631	226.784	30.050.000	601	50.000	-77,95
3	415.505.000	1.009	411.799	70.100.000	1.402	50.000	-87,86
4	213.228.000	963	221.421	45.900.000	918	50.000	-77,42
5	387.721.000	1.077	360.001	65.250.000	1.305	50.000	-86,11
6	385.243.000	1.144	336.751	58.300.000	1.166	50.000	-85,15
7	604.797.000	1.470	411.427	341.700.000	1.866	183.119	-55,49
8	269.220.000	827	325.538	82.100.000	1.642	50.000	-84,64
9	344.428.000	998	345.118	99.550.000	1.991	50.000	-85,51
10	302.002.000	1.122	269.164	96.700.000	1.934	50.000	-81,42
11	507.323.000	1.568	323.548	109.150.000	2.183	50.000	-84,55
12	365.755.000	882	414.688	50.450.000	1.009	50.000	-87,94
13	163.575.000	496	329.788	25.500.000	510	50.000	-84,84
17	196.149.000	429	457.224	25.650.000	513	50.000	-89,06
Total	3.526.213.000	10.013		954.350.000	14.119		
Rerata			352.163			67.593	-80,81

Sumber : Data Survey, Diolah 2022

Selanjutnya, Peningkatan NJOP Bangunan juga terjadi di Kelurahan Batu Piring. Akan tetapi di beberapa RT di kelurahan tersebut ada yang mengalami penurunan NJOP dari tahun dasar. Tabel 4.38. terlihat bahwa peningkatan NJOP Bangunan terbesar berada pada RT 6 yaitu sebesar 2627,42% dengan NJOP Bangunan pada tahun dasar sebesar Rp.251.671,-/M²

Menjadi Rp.6.864.122,-/M². Peningkatan juga terjadi di beberapa RT tersebut seperti RT 7 sebesar 713,84% dan diikuti oleh RT 5 sebesar 660,98%. Secara keseluruhan Kelurahan Batu Piring terjadi peningkatan sebesar 352,81% dari secara rata-rata sebesar Rp.325.208,-/M² Menjadi Rp.1.472.582,-/M².

Tabel 4. 38. Nilai Bangunan Hasil Pembaharuan Data Berdasarkan RT di Kelurahan Batu Piring Tahun 2022

RT	Objek Pajak Bangunan Tahun Dasar			Objek Pajak Bangunan Update			Peningkatan (%)
	NJOP Bangunan (Rp)	Luas Bng (m2)	NJOP Bng (Rp/m2)	NJOP Bangunan (Rp)	Luas Bng (m2)	NJOP Bng (Rp/m2)	
1	465.915.000	1.019	457.228	34.050.000	681	50.000	-89,06
2	238.804.000	737	324.022	42.400.000	848	50.000	-84,57
3	516.202.000	1.153	447.703	55.450.000	1.109	50.000	-88,83
4	900.915.000	1.344	670.324	96.650.000	1.933	50.000	-92,54
5	224.158.000	507	442.126	3.451.950.000	1.026	3.364.474	660,98
6	155.281.000	617	251.671	9.417.575.000	1.372	6.864.122	2627,42
7	82.764.000	246	336.439	1.620.950.000	592	2.738.091	713,84
8	362.920.000	1.219	297.719	3.795.537.000	2.670	1.421.549	377,48
9	258.122.000	812	317.884	1.389.240.000	1.688	823.009	158,90
10	141.408.000	660	214.255	921.936.000	1.515	608.539	184,03
11	314.206.000	1.051	298.959	1.161.020.000	2.764	420.051	40,50
12	285.042.000	922	309.156	274.646.000	1.877	146.322	-52,67
13	259.499.000	1.114	232.943	404.336.000	1.571	257.375	10,49
14	276.601.000	601	460.235	2.287.275.000	1.460	1.566.627	240,40
15	245.560.000	400	613.900	1.331.040.000	856	1.554.953	153,29
16	15.444.000	36	429.000	115.200.000	96	1.200.000	179,72
17	98.710.000	178	554.551	14.750.000	295	50.000	-90,98
Total	2.719.715.000	8.363		26.185.455.000	17.782		
Rerata			325.208			1.472.582	352,81

Sumber: Data Survey, Diolah 2022

4.6.3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Sedangkan tarif dari BPHTB sendiri sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan pasal 88 UU No.28/2009. Dari data hasil survey di 3 Kelurahan Kabupaten Balangan terdapat beberapa peningkatan persentase dari tahun dasar. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 39. BPHTB berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Timur di Kabupaten Balangan

RT	Objek Pajak Bangunan Tahun Dasar			Objek Pajak Bangunan Update			Peningkatan (%)
	NJOP Bumi dan Bangunan (Rp)	NJOPTKP	BPHTB	NJOP Bumi dan Bangunan (Rp)	NJOPTKP	BPHTB	
1	800.996.000	60.000.000	37.049.800	1.431.217.000	60.000.000	68.560.850	85,05
2	491.039.000	110.000.000	19.051.950	1.773.735.000	110.000.000	83.186.750	336,63
3	923.616.000	130.000.000	39.680.800	1.989.328.000	130.000.000	92.966.400	134,29
4	336.323.000	60.000.000	13.816.150	1.744.905.000	60.000.000	84.245.250	509,76
5	537.067.000	80.000.000	22.853.350	765.366.000	80.000.000	34.268.300	49,95
6	614.735.000	110.000.000	25.236.750	1.994.702.000	110.000.000	94.235.100	273,40
7	436.904.000	90.000.000	17.345.200	1.191.200.000	90.000.000	55.060.000	217,44
9	209.960.000	60.000.000	7.498.000	304.290.000	60.000.000	12.214.500	62,90
10	350.182.000	100.000.000	12.509.100	2.155.200.000	100.000.000	102.760.000	721,48
11	842.531.000	100.000.000	37.126.550	1.997.521.000	100.000.000	94.876.050	155,55
12	438.995.000	40.000.000	19.949.750	629.999.000	40.000.000	29.499.950	47,87
13	53.840.000	10.000.000	2.192.000	33.435.000	10.000.000	1.171.750	-46,54
Total	3.484.214.000	590.000.000	254.309.400	9.071.713.000	590.000.000	753.044.900	
Rerata							196,11

Sumber: Data Survey, Diolah 2022

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di 3 kelurahan, tabel diatas adalah rekapitulasi dari BPHTB yang diklasifikasikan berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Timur. Pada tabel tersebut terlihat bahwa peningkatan persentase BPHTB sebesar 196,11% dengan total BPHTB pada tahun dasar sebesar Rp. 254.309.400,- menjadi Rp. 753.044.900,-. Persentase peningkatan paling tinggi terdapat pada RT 10 dengan tingkat persentase sebesar 721,48% dan Total BPHTB pada tahun dasar sebesar Rp. 12.509.100,- menjadi Rp. 102.760.000,- dan persentase peningkatan paling rendah di Kelurahan Paringin Timur sebesar -46,54% dengan BPHTB pada tahun dasar sebesar Rp. 2.192.000,- menjadi Rp. 1.171.750,-

Tabel 4. 40. BPHTB Berdasarkan RT di Kelurahan Paringin Kota di Kabupaten Balangan

RT	Objek Pajak Bangunan Tahun Dasar			Objek Pajak Bangunan Update			Peningkatan (%)
	NJOP Bumi dan Bangunan (Rp)	NJOPTKP (Rp)	BPHTB (Rp)	NJOP Bumi dan Bangunan (Rp)	NJOPTKP (Rp)	BPHTB (Rp)	
1	614.998.000	100.000.000	25.749.900	3.845.138.000	100.000.000	187.256.900	627,21
2	580.611.000	110.000.000	23.530.550	3.373.610.000	110.000.000	163.180.500	593,48
3	1.099.828.000	80.000.000	50.991.400	7.629.850.000	80.000.000	377.492.500	640,31
4	643.907.000	120.000.000	26.195.350	1.334.310.000	120.000.000	60.715.500	131,78
5	1.044.612.000	110.000.000	46.730.600	5.835.305.000	110.000.000	286.265.250	512,59
6	451.235.000	120.000.000	16.561.750	1.988.075.000	120.000.000	93.403.750	463,97
7	762.856.000	100.000.000	33.142.800	660.600.000	100.000.000	28.030.000	-15,43
8	570.165.000	100.000.000	23.508.250	665.486.000	100.000.000	28.274.300	20,27
9	393.268.000	70.000.000	16.163.400	614.136.000	70.000.000	27.206.800	68,32
10	631.420.000	80.000.000	27.571.000	451.650.000	80.000.000	18.582.500	-32,60
11	533.186.000	120.000.000	20.659.300	497.000.000	120.000.000	18.850.000	-8,76
12	748.941.000	80.000.000	33.447.050	344.800.000	80.000.000	13.240.000	-60,42
13	507.855.000	100.000.000	20.392.750	2.104.340.000	100.000.000	100.217.000	391,43
17	248.033.000	30.000.000	10.901.650	129.780.000	30.000.000	4.989.000	-54,24
Total	5.891.571.000	910.000.000	375.545.750	13.291.172.000	910.000.000	1.407.704.000	
Rerata							274,84

Sumber: Data Survey, diolah 2022

Selanjutnya Pada tabel tersebut terlihat bahwa peningkatan persentase BPHTB di Kelurahan Paringin Kota di Kabupaten Balangan sebesar 274,84% dengan total BPHTB pada tahun dasar sebesar Rp. 375.545.750,- menjadi Rp. 1.407.704.000,-. Persentase peningkatan paling tinggi terdapat pada RT 03 dengan tingkat persentase sebesar 640,31% dan Total BPHTB pada tahun dasar sebesar Rp. 50.991.400,- menjadi Rp. 377.492.500,- dan persentase peningkatan paling rendah di Kelurahan Paringin Kota terdapat pada RT 11 dengan Persentase sebesar -8,76% dengan BPHTB pada tahun dasar sebesar Rp. 20.659.300,- menjadi Rp. 18.850.000,-

Tabel 4. 41. BPHTB Berdasarkan RT di Kelurahan Batu Piring di Kabupaten Balangan

RT	Objek Pajak Bangunan Tahun Dasar			Objek Pajak Bangunan Update			Peningkatan (%)
	NJOP Bumi dan Bangunan (Rp)	NJOPTKP (Rp)	BPHTB (Rp)	NJOP Bumi dan Bangunan (Rp)	NJOPTKP (Rp)	BPHTB (Rp)	
1	876.730.000	100.000.000	38.836.500	806.442.000	100.000.000	35.322.100	-9,05
2	567.691.000	110.000.000	22.884.550	595.298.000	110.000.000	24.264.900	6,03
3	1.090.795.000	120.000.000	48.539.750	1.099.144.000	120.000.000	48.957.200	0,86
4	1.484.340.000	100.000.000	69.217.000	2.045.378.000	100.000.000	97.268.900	40,53
5	403.511.000	80.000.000	16.175.550	5.284.642.000	80.000.000	260.232.100	1508,80
6	549.613.750	80.000.000	23.480.688	11.626.206.000	80.000.000	577.310.300	2358,66
7	191.226.000	40.000.000	7.561.300	1.985.336.000	40.000.000	97.266.800	1186,38
8	207.112.000	80.000.000	6.355.600	4.243.234.000	80.000.000	208.161.700	3175,25
9	162.934.000	70.000.000	4.646.700	1.556.980.000	70.000.000	74.349.000	1500,04
10	85.730.000	40.000.000	2.286.500	959.207.000	40.000.000	45.960.350	1910,07
11	272.474.000	20.000.000	12.623.700	1.377.554.000	20.000.000	67.877.700	437,70
12	444.670.000	40.000.000	20.233.500	515.051.000	40.000.000	23.752.550	17,39
13	188.468.000	100.000.000	4.423.400	657.586.000	100.000.000	27.879.300	530,27
14	463.481.000	110.000.000	17.674.050	2.991.105.000	110.000.000	144.055.250	715,07
15	360.920.000	80.000.000	14.046.000	1.617.400.000	80.000.000	76.870.000	447,27
16	27.732.000	10.000.000	886.600	142.560.000	10.000.000	6.628.000	647,58
17	100.231.000	10.000.000	4.511.550	63.525.000	10.000.000	2.676.250	-40,68
Total	3.458.102.750	760.000.000	314.382.938	33.020.386.000	760.000.000	1.613.019.300	
Rerata							413,07

Sumber: Data Survey, Diolah 2022

Selanjutnya peningkatan persentase BPHTB di Kelurahan Batu Piring di Kabupaten Balangan sebesar 413,07% dengan total BPHTB pada tahun dasar sebesar Rp. 314.382.938,- menjadi Rp. 1.613.019.300,-. Persentase peningkatan paling tinggi terdapat pada RT 08 dengan tingkat persentase sebesar 3.175,25% dan Total BPHTB pada tahun dasar sebesar Rp. 6.355.600,- menjadi Rp. 208.161.700,- dan persentase peningkatan paling rendah di Kelurahan Batu Piring terdapat pada RT 17 dengan Persentase sebesar -40,68% dengan BPHTB pada tahun dasar sebesar Rp. 4.511.550,- menjadi Rp. 2.676.250,-

4.7.Rekapitulasi

Perubahan NIR Bumi dan Nilai Bangunan dari 3 Kelurahan yang dikaji kemudian direkapitulasi agar dapat dilihat peningkatan NIR Bumi, Nilai Bangunan, dan besarnya peningkatannya setelah dilakukan pembaharuan data.

Tabel 4. 42. Perubahan NIR Bumi Setelah Pembaharuan Data di 3 Kelurahan Kabupaten Balangan Tahun 2022

No	Kelurahan/ Desa	Jml Data Dasar	Jml Data Update	OP Bumi Thn Dasar		OP Bumi Update		Perubahan (%)
				Luas (m ²)	NIR Bumi (Rp/m ²)	Luas (m ²)	NIR Bumi (Rp/m ²)	
1	Paringin Timur	1.576	109	115.669	98.616	53.308	951.757	865,12
2	Paringin Kota	2.313	146	41.791	172.259	35.561	782.788	354,42
3	Batu Piring	2.415	140	56.674	110.314	27.872	545.452	394,45
Total		6.304	395	214.134		116.741		
Rerata					127.063		759.999	498,13

Sumber: Data Survey, Diolah 2022

Perubahan Nilai Indikasi Rata-rata Bumi pada 3 Kelurahan di Kabupaten Balangan dengan total sebanyak 6.304 nomor objek pajak (NOP), terlihat pada Tabel diatas Secara rata-rata peningkatan NIR di 3 Kelurahan sebesar 498,13%. Dari seluruh kelurahan, Kelurahan Paringin Timur adalah Kelurahan yang terluas, mencakup 115.669 m², diikuti oleh Kelurahan Batu Piring dan Kelurahan Paringin Kota yang meliputi areal seluas 56.674 m² dan 41.791 m². Namun, dalam kajian ini hanya sebagian (109 dari 1.576 data NOP) yang dilakukan pembaharuan data di Kelurahan Paringin Timur. Kelurahan Paringin Timur juga merupakan Kelurahan yang memiliki NIR bumi tertinggi dengan nilai sebesar Rp.951.757,-/m².

Selanjutnya perubahan peningkatan yang hampir sama di ketiga kelurahan yang dikaji tersebut terdapat pada Kelurahan Paringin Kota dan Batu Piring dengan NIR Bumi sebesar Rp. 782.788,-/M² dan Rp. 545.452,-/M². Dengan persentase perubahan sebesar 354,42% dan 394,45%.

Tabel 4. 43. Perubahan Nilai Bangunan Setelah Pembaharuan Data Di 3 Kelurahan di Kabupaten Balangan Tahun 2022

No	Kelurahan/ Desa	Jml Data Dasar	Jml Data Update	OP Bangunan Thn Dasar		OP Bangunan Update		Perubahan (%)
				Luas (m ²)	NJOP Bng (Rp/m ²)	Luas (m ²)	NJOP Bng (Rp/m ²)	
1	Paringin Timur	1.576	109	12.569	194.341	20.524	952.271	390,00
2	Paringin Kota	2.313	146	10.013	352.163	14.119	67.593	-80,81
3	Batu Piring	2.415	140	8.363	325.208	17.782	1.472.582	352,81
Total		6.304	395	30.945		52.425		
Rerata					290.571		830.815	185,93

Sumber: Data Survey, Diolah 2022

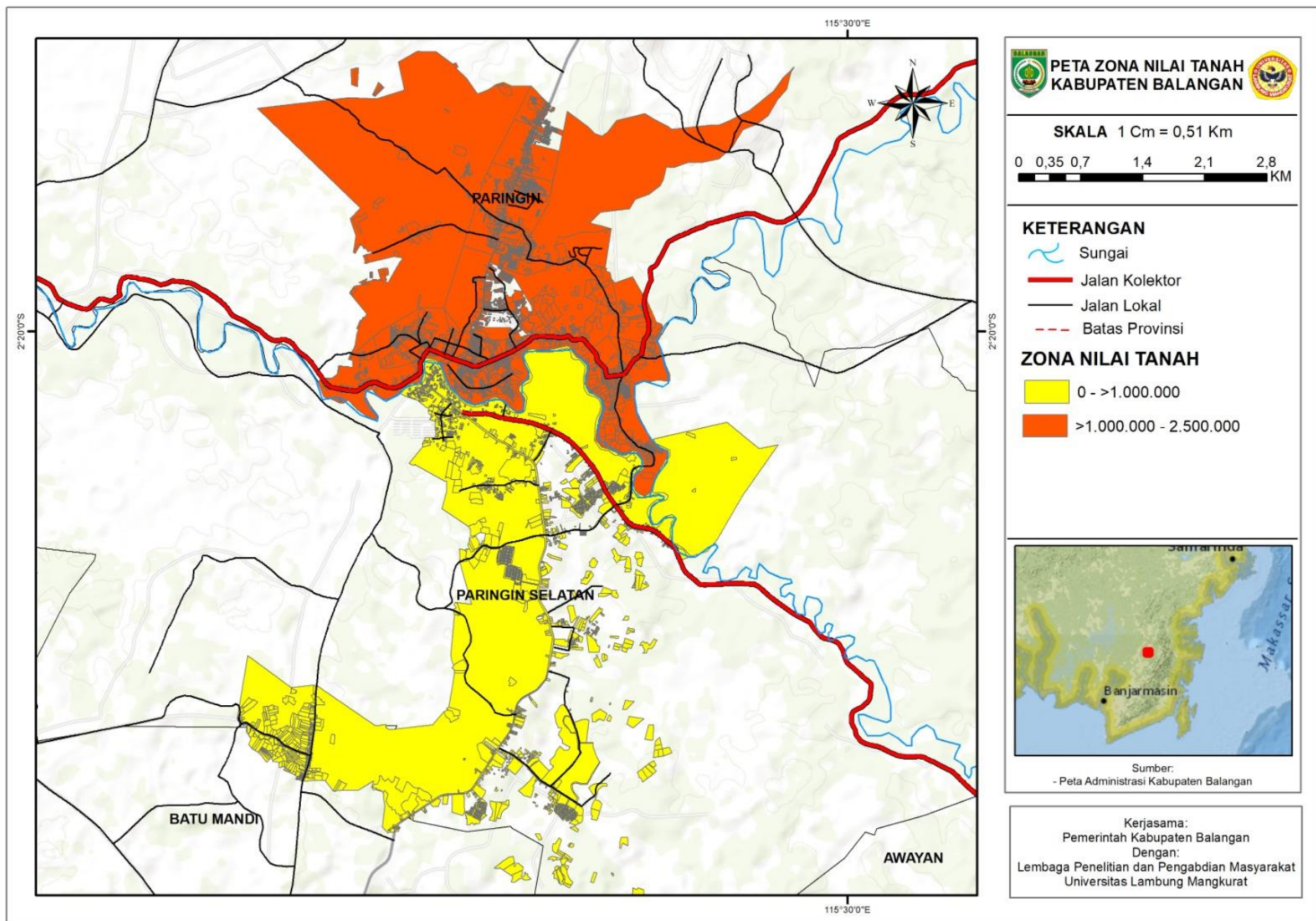
Perubahan nilai bangunan pada 3 Kelurahan yang dikaji seperti terlihat pada tabel diatas, di mana terjadi peningkatan secara rata-rata sebesar 185,93% dari sebesar Rp.290,571,-/m² menjadi Rp.830.815,-/m². Kelurahan Paringin Timur merupakan Kelurahan dengan perubahan NJOP tertinggi yang mencapai 390% sementara Kelurahan Paringin Kota mengalami Penurunan NJOP Bangunan setelah dilakukan pembaharuan yang pada tahun dasar sebesar Rp. 352.163,-/M² Menjadi Rp. 67.593,-/M².

Tabel 4. 44. Perubahan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Setelah Pembaharuan Data di 3 Kelurahan Kabupaten Balangan, Tahun 2022

No	Kelurahan/ Desa	Jml Data Dasar	Jml Data Update	OP Bumi & Bng Thn Dasar			OP Bumi & Bng Update			Perubahan (%)
				NIR Bumi (Rp/m ²)	NJOP Bng (Rp/m ²)	NJOP BB	NIR Bumi (Rp/m ²)	NJOP Bng (Rp/m ²)	NJOP BB	
1	Paringin Timur	1.576	109	98.616	194.341	292.957	951.757	952.271	1.904.027	549,93
2	Paringin Kota	2.313	146	172.259	352.163	524.423	782.788	67.593	850.382	62,16
3	Batu Piring	2.415	140	110.314	325.208	435.523	545.452	1.472.582	2.018.034	363,36
Total		6.304	395	381.189	871.713	1.252.902	2.279.997	2.492.446	4.772.443	
Rerata						417.634			1.590.814	280,91

Sumber: Data Survey, Diolah 2022

Perubahan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada 3 Kelurahan di Kabupaten Balangan tersaji pada tabel diatas, di mana terjadi peningkatan secara rata-rata sebesar 280,91%. Kelurahan Paringin Timur mengalami peningkatan NJOP BB tertinggi yang mencapai 549,93% yang diikuti oleh Kelurahan Batu Piring yang mencapai tingkat persentase perubahan sebesar 363,36% dan Kelurahan Paringin Kota merupakan Kelurahan yang mengalami tingkat perubahan NJOP BB terendah yaitu sebesar 62,16%.



Gambar 4. 19. Peta Zonasi Nilai Tanah Kabupaten Balangan

4.8.Potential Loss Pada Berbagai Skenario Peningkatan NJOP BB

Peningkatan penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan daerah, utamanya di era otonomi daerah. Penerimaan ini penting untuk mendukung pendanaan kegiatan yang diarahakan untuk peningkatan kualitas layanan pada masyarakat. Namun demikian, selain berfokus pada peningkatan pendapatan, pemerintah daerah tentu akan mempertimbangkan berbagai hal seperti tingkat penghasilan masyarakat, daya beli, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Melalui berbagai pertimbangan, ada beberapa skenario yang disiapkan untuk memudahkan pemerintah daerah untuk menerapkan penyesuaian kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan. Dalam kajian ini, ada empat alternatif pilihan yang dapat dilihat, dengan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan. Keempat skenario tersebut dapat menggambarkan seberapa besar potensi kerugian (potential loss) yang mungkin ditanggung oleh pemerintah daerah terkait dengan alternatif skenario yang dipilih.

Skenario pertama, yaitu dengan menerapkan kenaikan pajak 100%, sesuai dengan hasil survey yang dilakukan, langsung tahun depan. Seperti terlihat pada tabel dibawah, dengan asumsi tingkat bunga 8%, tidak ditemukan potensi kerugian dari sisi penerimaan dari SPPT-PBB. Kenaikan 100% ini selanjutnya dijadikan pembanding dengan skenario lain.

Potensi kerugian yang mungkin dapat dialami pemerintahan Kabupaten Balangan bila menaikkan 100% NJOP BB secara perhitungan keuangan adalah tidak ada. Namun, mempertimbangkan untuk menaikkan NJOP pada tingkat ini tentunya akan berimbas pada kemampuan membayar pajak sehingga kemungkinan akan mempengaruhi besarnya realisasi penerimaan pajak di sektor ini.

Seperti terlihat pada tabel dibawah, penerimaan pajak dari 3 Kelurahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebesar Rp. 98,3 Juta yang meningkat dari tahun dasar sebesar

hanya Rp. 19 juta. Karena tidak terdapat potensial loss, maka juga tidak dapat didiskontokan dan demikian juga dengan kemungkinan kerugian kumulatifnya.

Tabel 4. 45. Potensi Kerugian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bila Dilakukan Penyesuaian Kenaikan 100% Di 3 Kelurahan di Kabupaten Balangan, Tahun 2022

No	Thn Ke: ... Kel./Desa	0			1	2	3	4
		Tahun Dasar	Update	Update -Thn. Dasar	100%	100%	100%	100%
1	Paringin Timur	5.138.068	16.386.548	11.248.480	16.386.548	16.386.548	16.386.548	16.386.548
2	Paringin Kota	7.543.509	33.585.019	26.041.510	33.585.019	33.585.019	33.585.019	33.585.019
3	Batu Piring	6.404.938	48.416.160	42.011.222	48.416.160	48.416.160	48.416.160	48.416.160
SPPT PBB-P2		19.086.515	98.387.727	79.301.212	98.387.727	98.387.727	98.387.727	98.387.727
Potential Loss					0	0	0	0
Discounted Pot. Loss					0	0	0	0
Cumm. Disc. Pot. Loss					0	0	0	0

Sumber: Data Survey, diolah 2022

Pada tabel selanjutnya menyajikan skenario kedua, yang menggambarkan potensi kerugian yang muncul bila di tahun pertama dilakukan penyesuaian kenaikan sebesar 75% sebelum naik menjadi 100% pada tahun-tahun selanjutnya dari hasil pendataan yang baru. Potensi kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 16,7 juta. Terlihat juga bahwa dengan asumsi tingkat bunga sebesar 8%, ada potensi kerugian terdiskonto sebesar Rp. 15,5 juta, yang juga secara kumulatif akan tetap bernilai sama sampai empat tahun ke depan.

Tabel 4. 46. Potensi Kerugian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)/(M2) Bila Dilakukan Penyesuaian Kenaikan Bertahap 75% Dan 100% di 3 Kelurahan di Kabupaten Balangan, Tahun 2022

No	Thn Ke: ... Kel./Desa	0			1	2	3	4
		Tahun Dasar	Update	Update -Thn. Dasar	75%	100%	100%	100%
1	Paringin Timur	5.138.068	16.386.548	11.248.480	12.024.758	16.386.548	16.386.548	16.386.548
2	Paringin Kota	7.543.509	33.585.019	26.041.510	23.710.463	33.585.019	33.585.019	33.585.019
3	Batu Piring	6.404.938	48.416.160	42.011.222	45.909.895	48.416.160	48.416.160	48.416.160
SPPT PBB-P2		19.086.515	98.387.727	79.301.212	81.645.116	98.387.727	98.387.727	98.387.727
Potential Loss					16.742.611	0	0	0
Discounted Pot. Loss					15.502.418	0	0	0
Cumm. Disc. Pot. Loss					15.502.418	15.502.418	15.502.418	15.502.418

Sumber: Data Survey, Diolah 2022

Tabel berikutnya menampilkan potensi kerugian yang muncul bila di tahun pertama, dilakukan penyesuaian kenaikan sebesar 50% yang kemudian diikuti kenaikan di tahun kedua sebesar 75% sebelum naik menjadi 100% di tahun ketiga dengan menggunakan data dari hasil pendataan yang baru. Potensi kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 29,47 juta di tahun

pertama dan Rp. 16,74 juta di tahun kedua. Dengan asumsi tingkat bunga sebesar 8%, ada potensi kerugian terdiskonto sebesar Rp. 27,29 juta di tahun pertama Rp. 14,35 juta di tahun kedua, yang secara kumulatif akan bernilai Rp. 41,64 Juta di akhir tahun keempat.

Tabel 4. 47. Potensi Kerugian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)/(M2) Bila Dilakukan Penyesuaian Kenaikan Bertahap 50%, 75%, Dan 100% di 3 Kelurahan Kabupaten Balangan Tahun 2022

No	Kel./Desa	Thn Ke: ...			0	1	2	3	4
		Tahun Dasar	Update	Update -Thn. Dasar	50%	75%	100%	100%	100%
1	Paringin Timur	5.138.068	16.386.548	11.248.480	8.921.561	12.024.758	16.386.548	16.386.548	16.386.548
2	Paringin Kota	7.543.509	33.585.019	26.041.510	16.644.550	23.710.463	33.585.019	33.585.019	33.585.019
3	Batu Piring	6.404.938	48.416.160	42.011.222	43.347.038	45.909.895	48.416.160	48.416.160	48.416.160
SPPT PBB-P2		19.086.515	98.387.727	79.301.212	68.913.149	81.645.116	98.387.727	98.387.727	98.387.727
Potential Loss					29.474.578	16.742.611	0	0	0
Discounted Pot. Loss					27.291.276	14.354.090	0	0	0
Cumm. Disc. Pot. Loss					27.291.276	41.645.366	41.645.366	41.645.366	41.645.366

Sumber: Data Survey, Diolah 2022

Pada skenario yang lain, seperti terlihat pada tabel dibawah, dimana dilakukan perhitungan potensi kerugian pemerintah Kabupaten Balangan dari 3 Kelurahan yang diamati dengan penyesuaian bertahap, secara berturut turut, 25%, 50%, 75%, dan 100% dari tahun pertama hingga tahun keempat. Dalam kondisi ini, potensi kerugian kumulatif dari PBB adalah sebesar Rp. 77,61 Juta. Angka ini diperoleh dari penjumlahan rangkaian potensi kerugian terdiskonto akibat penetapan penyesuaian secara bertahap.

Tabel 4. 48. Potensi Kerugian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)/(M2) Bila Dilakukan Penyesuaian Kenaikan Bertahap 25%, 50%, 75%, Dan 100% di 3 Kelurahan Kabupaten Balangan Tahun 2022

No	Kel./Desa	Thn Ke: ...			0	1	2	3	4
		Tahun Dasar	Update	Update -Thn. Dasar	25%	50%	75%	100%	100%
1	Paringin Timur	5.138.068	16.386.548	11.248.480	5.827.730	8.921.561	12.024.758	16.386.548	16.386.548
2	Paringin Kota	7.543.509	33.585.019	26.041.510	10.606.038	16.644.550	23.710.463	33.585.019	33.585.019
3	Batu Piring	6.404.938	48.416.160	42.011.222	39.777.674	43.347.038	45.909.895	48.416.160	48.416.160
SPPT PBB-P2		19.086.515	98.387.727	79.301.212	56.211.442	68.913.149	81.645.116	98.387.727	98.387.727
Potential Loss					42.176.285	29.474.578	16.742.611	0	0
Discounted Pot. Loss					39.052.116	25.269.700	13.290.824	0	0
Cumm. Disc. Pot. Loss					39.052.116	64.321.816	77.612.640	77.612.640	77.612.640

Sumber: Data Survey, Diolah 2022

Bila pemerintah daerah Kabupaten Balangan memilih untuk tidak menaikkan SPPT PBB, besarnya potensi kerugian terdiskonto kumulatif menjadi senilai Rp.262, 65 Juta di akhir

tahun keempat. Lihat tabel dibawah, Hal ini dikarenakan semakin banyak kemungkinan terjadi kerugian sebesar Rp. 79,30 Juta per tahun.

Tabel 4. 49. Potensi Kerugian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bila Tidak Dilakukan Penyesuaian Kenaikan PBB di 3 Kelurahan Kabupaten Balangan Tahun 2022

No Kel./Desa	Thn Ke: ...			0	1	2	3	4
	Tahun Dasar	Update	Update -Thn. Dasar	0%	0%	0%	0%	0%
1 Paringin Timur	5.138.068	16.386.548	11.248.480	5.138.068	5.138.068	5.138.068	5.138.068	5.138.068
2 Paringin Kota	7.543.509	33.585.019	26.041.510	7.543.509	7.543.509	7.543.509	7.543.509	7.543.509
3 Batu Piring	6.404.938	48.416.160	42.011.222	6.404.938	6.404.938	6.404.938	6.404.938	6.404.938
SPPT PBB-P2	19.086.515	98.387.727	79.301.212	19.086.515	19.086.515	19.086.515	19.086.515	19.086.515
Potential Loss				79.301.212	79.301.212	79.301.212	79.301.212	79.301.212
Discounted Pot. Loss				73.427.048	67.988.008	62.951.859	58.288.758	58.288.758
Cumm. Disc. Pot. Loss				73.427.048	141.415.056	204.366.915	262.655.674	262.655.674

Sumber: Data Survey, Diolah 2022

Keputusan pemilihan kebijakan terbaik berdasarkan alternatif skenario penyesuaian kenaikan PBB dalam hal ini harus dipertimbangkan dengan baik yang terkait manfaat yang dihasilkan, daya beli, kemauan membayar, dan lain sebagainya. Hal ini penting karena tujuan utama dari pemungutan pajak adalah pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraannya. Jangan sampai, peningkatan yang dilakukan membawa dampak buruk bagi kepentingan umum.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Perubahan Nilai Indikasi Rata-rata Bumi pada 3 Kelurahan di Kabupaten Balangan dengan total sebanyak 6.304 nomor objek pajak (NOP), Secara rata-rata peningkatan NIR di 3 Kelurahan sebesar 498,13%. Dari seluruh kelurahan, Kelurahan Paringin Timur adalah Kelurahan yang terluas, mencakup 115.669 m², diikuti oleh Kelurahan Batu Piring dan Kelurahan Paringin Kota yang meliputi areal seluas 56.674 m² dan 41.791 m².
2. Perubahan nilai bangunan pada 3 Kelurahan yang dikaji, di mana terjadi peningkatan secara rata-rata sebesar 185,93% dari sebesar Rp.290,571,-/m² menjadi Rp.830.815,-/m². Kelurahan Paringin Timur merupakan Kelurahan dengan perubahan NJOP tertinggi yang mencapai 390% sementara Kelurahan Paringin Kota mengalami Penurunan NJOP Bangunan setelah dilakukan pembaharuan yang pada tahun dasar sebesar Rp. 352.163,-/M² Menjadi Rp. 67.593,-/M². Perubahan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada 3 Kelurahan di Kabupaten Balangan , di mana terjadi peningkatan secara rata-rata sebesar 280,91%.
3. Skenario pertama, yaitu dengan menerapkan kenaikan pajak 100%. Asumsi tingkat bunga 8%, Penerimaan pajak dari 3 Kelurahan adalah sebesar Rp. 98,3 Juta yang meningkat dari tahun dasar sebesar hanya Rp. 19 juta karena tidak terdapat potensial loss, maka juga tidak dapat didiskontokan dan demikian juga dengan kemungkinan kerugian kumulatifnya.
4. Skenario kedua, yaitu menggambarkan potensi kerugian yang muncul bila di tahun pertama dilakukan penyesuaian kenaikan sebesar 75% sebelum naik menjadi 100% pada tahun-tahun selanjutnya dari hasil pendataan yang baru. Potensi kerugian yang

dialami adalah sebesar Rp. 16,7 juta. Asumsi tingkat bunga sebesar 8%, ada potensi kerugian terdiskonto sebesar Rp. 15,5 juta, yang juga secara kumulatif akan tetap bernilai sama sampai empat tahun ke depan.

5. Skenario Berikutnya dilakukan penyesuaian kenaikan sebesar 50% di tahun pertama yang kemudian diikuti kenaikan di tahun kedua sebesar 75% sebelum naik menjadi 100% di tahun ketiga dengan menggunakan data dari hasil pendataan yang baru. Potensi kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 29,47 juta di tahun pertama dan Rp. 16,74 juta di tahun kedua. Asumsi tingkat bunga sebesar 8%, ada potensi kerugian terdiskonto sebesar Rp. 27,29 juta di tahun pertama Rp. 14,35 juta di tahun kedua, yang secara kumulatif akan bernilai Rp. 41,64 Juta di akhir tahun keempat.
6. Pada skenario yang lain, dimana dilakukan perhitungan potensi kerugian pemerintah Kabupaten Balangan dari 3 Kelurahan yang diamati dengan penyesuaian bertahap, secara berturut turut, 25%, 50%, 75%, dan 100% dari tahun pertama hingga tahun keempat. Dalam kondisi ini, potensi kerugian kumulatif dari PBB adalah sebesar Rp. 77,61 Juta. Angka ini diperoleh dari penjumlahan rangkaian potensi kerugian terdiskonto akibat penetapan penyesuaian secara bertahap.
7. Bila pemerintah daerah Kabupaten Balangan memilih untuk tidak menaikkan SPPT PBB, besarnya potensi kerugian terdiskonto kumulatif menjadi senilai Rp. 262, 65 Juta di akhir tahun keempat. semakin banyak kemungkinan terjadi kerugian sebesar Rp. 79,30 Juta per tahun.

5.2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan perlu keberanian untuk menjadikan jenis pajak PBB-P2 sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang controlable ini sebagai objek pajak prioritas.
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan perlu terus melakukan upaya untuk meng “update” data dan me“revaluasi” data objek PBB-P2 secara bertahap, agar tidak terjadwalnya “potensial loss” yang secara kumulatif dapat merugikan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam jangka panjang.
3. Terus mengupayakan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak PBB-P2 dengan menjadikan bukti pembayaran atau Lunas PBB-P2 tahun berjalan, sebagai syarat mutlak untuk masyarakat Kabupaten Balangan dalam mengurus seluruh perizinan dan pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Balangan, sehingga akan membentuk willingness to pay masyarakat ke arah lebih baik.
4. Memberikan penghargaan kepada Kecamatan, Desa, RT terbaik pengelolaan PBB-P2 dengan imbalan tertentu untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran msyarakat.
5. Memberikan penghargaan wajib pajak yang secara rutin misalnya 5 tahun berturut-turun membayar PBB-P2 tepat waktu sebuah penghargaan dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk lain, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kebersamaan masyarakat.
6. Merubah dan memberlakukan besaran tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat, dengan terlebih dahulu melakukan simulasi, FGD atau penelitian terkait hal itu, agar kebijakan tersebut efektif dan mendapat dukungan masyarakat.
7. Untuk mendapatkan potensi pajak PBB-P2 sebagaimana hasil Updating dan Revaluasi, maka penyesuaian perlu dilakukan dengan kebijakan tarif, baik menaikkan ataupun menurunkannya. Kebijakan tarif pada nilai NJOP mengalami kenaikan begitu besar maka,

tarif dapat diturunkan, namun besarnya penurunan persentasi tarif harus lebih kecil dari besarnya kenaikan NJOP hasil dari kegiatan Updating dan Revaluasi, sehingga Nilai Pajak Terhutang akan tetap mengalami kenaikan dari yang telah ditetapkan tahun sebelumnya.

8. Dalam menentukan besaran tarif pajak, perlu mempertimbangkan dua aspek, yaitu : ability to pay dan willingness to pay masyarakat wajib pajak yang dirumuskan berdasarkan skenario penyesuaian peningkatan panjak yang telah diajukan dalam dokumen ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin. Rudy.2011. Ekonomi Otonomi Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kasirin, 2012. Perpajakan, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 2002. Asas Dan Dasar Perpajakan. Refika Aditama.
- Sjafrizal, (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Survey Lapangan (Nilai Bumi/Tanah)

NAMA SUBJEK PAJAK	NAMA JALAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KABUPATEN / KOTAMADYA	LUAS TANAH (M2)	JENIS TANAH	JUMLAH BANGUNAN	HARGA TANAH PASARAN
HARYONO	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		5	BALANGAN	93	1		1.000.000
AGUS MUSLIM	KOMPLEK CITRA PERMAI	PARINGIN TIMUR		7	BALANGAN	130	1		500.000
ABDUL FATAH	A. YANI	PARINGIN TIMUR	0	11	BALANGAN	300	1		500.000
SRI NORHASANAH	KOMPLEK MARITAM	PARINGIN TIMUR		1	BALANGAN	120	1		400.000
H. TABERANI	A. YANI	PARINGIN TIMUR		1	BALANGAN	168	1		1.500.000
ASMADI	A. YANI	PARINGIN TIMUR		1	BALANGAN	151	1		1.500.000
SYAHMADI	A. YANI	PARINGIN TIMUR		1	BALANGAN	110	1		1.500.000
HJ. FATIMAH	A. YANI	PARINGIN TIMUR		1	BALANGAN	208	1		1.500.000
H. FAISAL	A. YANI	PARINGIN TIMUR		1	BALANGAN	172	1		2.000.000
Halik	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		6	Balangan	180	1	1	1.000.000
RUDI RESNAWAN	TEPIAN	PARINGIN TIMUR		2	BALANGAN	200	1		1.500.000
JOHANSYAH	TEPIAN	PARINGIN TIMUR		2	BALANGAN	96	1		1.500.000
NORHAFIAH	TEPIAN	PARINGIN TIMUR		2	BALANGAN	45	1		750.000
M. ANWAR	TEPIAN	PARINGIN TIMUR		2	BALANGAN	151	1		2.000.000
KUSMALI	TEPIAN	PARINGIN TIMUR		2	BALANGAN	84			650.000
MASIAH	TEPIAN	PARINGIN TIMUR		2	BALANGAN	60	1		700.000
SYAHRUJI	TEPIAN	PARINGIN TIMUR		2	BALANGAN	77	1		750.000
RUSDIA NSYAH	TEPIAN	PARINGIN TIMUR		2	BALANGAN	119	1		800.000
MAYUS AKHMAD	TEPIAN	PARINGIN TIMUR		2	BALANGAN	168	1		1.500.000
IDA HJ	TEPIAN	PARINGIN TIMUR		2	BALANGAN	115	1		1.500.000
KASMAN PURBA	TEPIAN	PARINGIN TIMUR		2	BALANGAN	149	1		1.500.000
Desi	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		6	Balangan	217	1	1	1.000.000
MUSLIM EFFENDIE	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		3	BALANGAN	270	1		700.000
ALI SUBHAN	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		12	BALANGAN	110	1		600.000
MURSI AH	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	0	3	BALANGAN	80	1		500.000
YUSMANSYAH	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	0	3	BALANGAN	80	1		450.000
DIDIT TANTOKO	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR	0	3	BALANGAN	110	1		450.000
NINING ERNAWATI	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		3	BALANGAN	410	1		1.000.000
Anc ah	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		3	Balangan	150	1	1	300.000
NORBAINAH	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		3	BALANGAN	120	1		750.000
Daimmarullah	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		3	Balangan	90	1	1	450.000
WAHYUNI	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		3	BALANGAN	60	1		400.000
HARNAWATI	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		3	BALANGAN	279	1		1.000.000
HASAN	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		3	BALANGAN	300	1		750.000
HA FSAH	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		3	BALANGAN	420	1		800.000

NAMA SUBJEK PAJAK	NAMA JALAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KABUPATEN / KOTAMADYA	LUAS TANAH (M2)	JENIS TANAH	JUMLAH BANGUNAN	HARGA TANAH PASARAN
Syamsul bahri	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		3	Balangan	60	1	1	450.000
IPANDI	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		4	BALANGAN	130	1		500.000
MAMA SHALEH	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		12	BALANGAN	48	1		400.000
HJ. MASIAH	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		4	BALANGAN	160	1		1.500.000
BUSRIANSYAH	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		4	BALANGAN	100	1		1.500.000
RAMLI	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		4	BALANGAN	225	1		1.500.000
SATRIO ADI NUGROHO	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		4	BALANGAN	200	1		1.500.000
AIDIL	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		12	BALANGAN	131	1		550.000
Karim	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		6	Balangan	100	1	1	1.000.000
yadi Jarmat	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		6	Balangan	200	1	1	800.000
ABDUL MURAD	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		5	BALANGAN	90	1		1.000.000
SARKANI	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		5	BALANGAN	90	1		500.000
ETER NABIRING	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		5	BALANGAN	127	1		500.000
ABDUL MUTHALIB	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		5	BALANGAN	93	1		1.000.000
HALIK	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		5	BALANGAN	178	1		500.000
SUMIATI	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		5	BALANGAN	127	1		1.000.000
SUGIANNOOR	JL. KAMPUNG BARU	PARINGIN KOTA	3	17	BALANGAN - 71611	68	1		350.000
Masdia H	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		6	Balangan	90	1	1	800.000
RUSMINI	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		5	BALANGAN	90	1		1.000.000
Yahya	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		6	Balangan	100	1	1	800.000
KHAIRIL ANWAR	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		12	BALANGAN	230	1	1	400.000
AGUS	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		5	BALANGAN	90	1	1	500.000
ABDURRAHMAN SIDIQ	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		12	BALANGAN	120	1		400.000
Yusi Wirawan	Ratu Zaleha	PARINGIN TIMUR		6	Balangan	327	1	1	800.000
TAUFIKURRAHMAN	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		12	BALANGAN	200	1		600.000
Muhammad	Komp 25	PARINGIN TIMUR		6	Balangan	247	1	1	1.000.000
Sugiani H	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		6	Balangan	150	1	1	800.000
Husyairi	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		6	Balangan	240	1	1	800.000
Muslani	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		6	Balangan	165	1	1	800.000
FAKHRUDIN	KOMPLEK CITRA PERMAI	PARINGIN TIMUR		7	BALANGAN	120	1	1	500.000
Marzuki H	Tembus Mesjid Yampi	PARINGIN TIMUR		6	Balangan	200	1	1	800.000
HAMBRAN	KOMPLEK CITRA PERMAI	PARINGIN TIMUR	0	7	BALANGAN	120	1		500.000
RAHMADI	KOMPLEK CITRA PERMAI	PARINGIN TIMUR		7	BALANGAN	120	1		500.000
NORIFANSYAH	KOMPLEK CITRA PERMAI	PARINGIN TIMUR		7	BALANGAN	120	1		500.000

NAMA SUBJEK PAJAK	NAMA JALAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KABUPATEN / KOTAMADYA	LUAS TANAH (M2)	JENIS TANAH	JUMLAH BANGUNAN	HARGA TANAH PASARAN
Akhyar	Komplek Citra Permai	PARINGIN TIMUR		7	Balangan	120	1	1	500.000
HARNI RIADI	KOMPLEK CITRA PERMAI	PARINGIN TIMUR		7	BALANGAN	120	1		500.000
AGUS SALIM	KOMPLEK CITRA PERMAI	PARINGIN TIMUR		7	BALANGAN	120	1		500.000
H. ZAINAL HAKIM	KOMPLEK CITRA PERMAI	PARINGIN TIMUR		7	BALANGAN	120	1		500.000
Selamat R	Komplek Citra Permai	PARINGIN TIMUR		7	Balangan	120	1	1	500.000
WARSITO	KOMPLEK CITRA PERMAI	PARINGIN TIMUR		7	BALANGAN	120	1		500.000
SUWARDI	KOMPLEK CITRA PERMAI	PARINGIN TIMUR		7	BALANGAN	120	1		500.000
A. Marwan	Tembus Murung Dalam	PARINGIN TIMUR		9	Balangan	270	1	1	300.000
HORMAN	TEMBUS MURUNG DALAM	PARINGIN TIMUR		9	BALANGAN	200	1		300.000
RUSMAIDI	TEMBUS MURUNG DALAM	PARINGIN TIMUR		9	BALANGAN	150	1		300.000
ARMAH	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		9	BALANGAN	160	1		500.000
ISMAWATI	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		9	BALANGAN		1		500.000
JALI RAHMAN	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		9	BALANGAN		1		500.000
Norbainah	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		3	Balangan	120	1	1	750.000
Hasan	Lingkar Timur	PARINGIN TIMUR		10	Balangan	200	1	1	750.000
Syahrudin	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		10	Balangan	100	1	1	300.000
Abd Karim	Lingkar Timur	PARINGIN TIMUR		10	Balangan	150	1	1	300.000
h. mithan	Lingkar Timur	PARINGIN TIMUR		10	Balangan	200	1	1	750.000
Aberani	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		10	Balangan	200	1	1	750.000
Aliansyah	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		10	Balangan	100	1	1	400.000
Supriatno	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		10	Balangan	200	1	1	300.000
Hartati	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		10	Balangan	100	1	1	500.000
Nasrullah	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		10	Balangan	200	1	1	500.000
Ernawati	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		10	Balangan	150	1	1	300.000
Suhardi	Gunung Pandau	PARINGIN TIMUR		10	Balangan	1600	1	1	750.000
WASIDI	A. YANI	PARINGIN TIMUR	0	11	BALANGAN	300	1		400.000
SUWARTO	TEMBUS MESJID YAMPI	PARINGIN TIMUR	0	11	BALANGAN	176	1		1.000.000
ALPAN NASUKI	A. YANI	PARINGIN TIMUR	0	11	BALANGAN	150	1		1.000.000
BUDI UTOMO	A. YANI	PARINGIN TIMUR	0	11	BALANGAN	300	1		450.000
SYAHBANI RAHMAN	A. YANI	PARINGIN TIMUR	0	11	BALANGAN	443	1		1.500.000
MASRUNI	TEMBUS MESJID YAMPI	PARINGIN TIMUR	0	11	BALANGAN	200	1		500.000

NAMA SUBJEK PAJAK	NAMA JALAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KABUPATEN / KOTAMADYA	LUAS TANAH (M2)	JENIS TANAH	JUMLAH BANGUNAN	HARGA TANAH PASARAN
HAIRUL SHALEH	TEMBUS MESJID YAMPI	PARINGIN TIMUR	0	11	BALANGAN	200	1		500.000
SYAHRANI	A. YANI	PARINGIN TIMUR	0	11	BALANGAN	150	1		500.000
RUSMINI	A. YANI	PARINGIN TIMUR		11	BALANGAN	150	1		300.000
BUDI ANSHARI	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		12	BALANGAN	200	1		500.000
ABDUL HAMIDAN	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		12	BALANGAN	150	1		600.000
M. LAZIM	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		13	BALANGAN	111	1		300.000
SYAIFULLAH	Tepian	PARINGIN KOTA		1	Balangan	60	1	1	2.000.000
M YUSUF	tepian	PARINGIN KOTA		1	Balangan	165	1	1	2.000.000
NORLIANA	Tepian	PARINGIN KOTA		1	Balangan	200	1	1	2.000.000
SAHDAN H.	Tepian	PARINGIN KOTA		1	Balangan	322	1	1	2.000.000
ZULKIFLIANSYAH H.	Tepian	PARINGIN KOTA		1	Balangan	240	1	1	2.000.000
IRIANSYAH H.	Gunung Pandau	PARINGIN KOTA		1	Balangan	369	1	1	2.000.000
JAMHARI	Tepian	PARINGIN KOTA		1	Balangan	120	1	1	2.000.000
PRIYADI	Tepian	PARINGIN KOTA		1	Balangan	198	1	1	2.000.000
Paraji.H	Tepian	PARINGIN KOTA		1	Balangan	69	1	1	800.000
Fakhrudin	Tepian	PARINGIN KOTA		1	Balangan	69	1	1	800.000
Ruslan,H	Tepian	PARINGIN KOTA		1	Balangan	300	1	1	800.000
Arjani	Tepian	PARINGIN KOTA		1	Balangan	100	1	1	800.000
Supiani	Merdeka	PARINGIN KOTA		2	Balangan	60	1	1	2.000.000
Bustani	Merdeka	PARINGIN KOTA		2	Balangan	84	1	1	2.500.000
Syafrudin	Merdeka	PARINGIN KOTA		2	Balangan	63	1	2	2.500.000
Abd. Kadir	Merdeka	PARINGIN KOTA		5	Balangan	50	1	1	2.500.000
Saman	Merdeka	PARINGIN KOTA		2	Balangan	75	1	1	2.500.000
MASDIA, H	MERDEKA	PARINGIN KOTA		2	BALANGAN	168	1	1	2.500.000
Normansyah	Merdeka	PARINGIN KOTA		2	Balangan	90	1	1	2.500.000
Saunah	Merdeka	PARINGIN KOTA		2	Balangan	500	1	1	2.500.000
Mas'udi	Paringin	PARINGIN KOTA		2	Balangan	100	1	1	2.500.000
Taufik Hidayah	Merdeka	PARINGIN KOTA		2	Balangan	69	1	1	2.500.000
Syamsiar Rahman	Merdeka	PARINGIN KOTA		2	Balangan	100	1	1	2.500.000
Jainah	Merdeka	PARINGIN KOTA		2	Balangan	36	1	1	2.500.000
Suriani	M.Naid	PARINGIN KOTA		3	Balangan	176	1	1	3.000.000
Darmansyah	M. Naid	PARINGIN KOTA		3	Balangan	104	1	1	3.000.000
MURNADI, H	M.Naid	PARINGIN KOTA		3	Balangan	425	1	1	3.000.000
MUHAMAD SALIM	M.Naid	PARINGIN KOTA		3	Balangan	219	1	1	3.000.000
NORMANSYAH	M.Naid	PARINGIN KOTA		3	Balangan	290	1	1	3.000.000
ABDURAKHMAN SATIBI, H	M.Naid	PARINGIN KOTA		3	Balangan	550	1	1	3.000.000
IRAN	M.Naid	PARINGIN KOTA		3	Balangan	125	1	1	3.000.000
AMAT SEMARANG, H	M.Naid	PARINGIN KOTA		3	Balangan	120	1	1	300.000

NAMA SUBJEK PAJAK	NAMA JALAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KABUPATEN / KOTAMADYA	LUAS TANAH (M2)	JENIS TANAH	JUMLAH BANGUNAN	HARGA TANAH PASARAN
HUSAINI	M. Naid	PARINGIN TIMUR		3	Balangan		1	1	3.000.000
M.Ali Fahmi	M.Naid	PARINGIN KOTA		3	Balangan	81	1	1	3.000.000
Asnikusu	Gg Kai adam	PARINGIN KOTA		4	Balangan	392	1	1	500.000
SUKADI	Gg H.Sutardi	PARINGIN KOTA		4	Balangan	82	1	1	2.000.000
SUPIYAT, H	Gg Sutadri	PARINGIN KOTA		4	Balangan	127	1	1	500.000
KAMARIAH (PNS)	A.Yani	PARINGIN KOTA		4	Balangan	187	1	1	500.000
MUAZ	Gg H.Murhan	PARINGIN KOTA		4	Balangan	200	1	1	500.000
MAHFUS	Gg Tower 2	PARINGIN KOTA		4	Balangan	200	1	1	500.000
RAGUAN	Jl. A.Yani	PARINGIN KOTA		4	Balangan	269	1	1	500.000
RAJIDINNOR	Gang pasar adaro	PARINGIN KOTA		4	Balangan	144	1	1	500.000
NORERPANSYAH	A.Yani	PARINGIN KOTA		4	Balangan	42	1	1	500.000
Alpan Nasuki	Jl. A.Yani	PARINGIN KOTA		4	Balangan	400	1	1	500.000
Riduan	JL. A.Yani gang	PARINGIN KOTA		4	Balangan	152	1	1	500.000
Ruswandi	Jl. A.yani ting	PARINGIN KOTA		4	Balangan	308	1	1	500.000
Masianto	Gg Kai Adam	PARINGIN KOTA		5	Balangan	171	1	1	1.000.000
Amiruddin	Gg Kai Adam	PARINGIN KOTA		5	Balangan	256	1	1	1.000.000
Abdul Latif, H	Gg Kai Adam	PARINGIN KOTA		5	Balangan	200	1	1	1.000.000
Saudi	Gg Kai Adam	PARINGIN KOTA		5	Balangan	360	1	1	1.000.000
Eko Pramono	Gg Kai Adam	PARINGIN KOTA		5	Balangan	140	1	1	1.000.000
Hasan Duma	A.Yani	PARINGIN KOTA		5	Balangan	250	1	1	2.000.000
Suwardi	A.Yani	PARINGIN KOTA		5	Balangan	300	1	1	2.000.000
Gusti Fauzia	A. Yani	PARINGIN KOTA		5	Balangan	480	1	1	2.000.000
Butet Hadijah	A.Yani	PARINGIN KOTA		5	Balangan	553	1	1	2.000.000
Marhat	A.Yani	PARINGIN KOTA		5	Balangan	300	1	1	2.000.000
Sugian	A.Yani	PARINGIN KOTA		5	Balangan	300	1	1	2.000.000
Nurliani, Hj	M.Naid	PARINGIN KOTA		3	Balangan	289	1	1	3.000.000
Yudi Sudarto	Gg Kai Adam	PARINGIN KOTA		5	Balangan	91	1	1	1.000.000
ANANG PUDJI SUSANTO	JL. KAMPUNG BARU	PARINGIN KOTA	3	17	BALANGAN	66	1	1	350.000
Suriyadi Rahman	Merdeka	PARINGIN KOTA		6	Balangan	40	1	1	2.000.000
Fahdudin Rifqy	Merdeka	PARINGIN KOTA		6	Balangan	165	1	1	2.000.000
Budi	Merdeka	PARINGIN KOTA		6	Balangan	40	1	1	2.000.000
Yuspari	Merdeka	PARINGIN KOTA		6	Balangan	40	1	1	2.000.000
Yuliansyah	Merdeka	PARINGIN KOTA		6	Balangan	36	1	1	2.000.000
Murhan	Merdeka	PARINGIN KOTA		6	Balangan	100	1	1	2.000.000
Umar H	Merdeka	PARINGIN KOTA		6	Balangan	64	1	1	2.000.000
Herd	Merdeka	PARINGIN KOTA		6	Balangan	188	1	1	2.000.000
Syahman	Merdeka	PARINGIN KOTA		6	Balangan	66	1	1	2.000.000
Sadikul Madani	Merdeka	PARINGIN KOTA		6	Balangan	80	1	1	2.000.000

NAMA SUBJEK PAJAK	NAMA JALAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KABUPATEN / KOTAMADYA	LUAS TANAH (M2)	JENIS TANAH	JUMLAH BANGUNAN	HARGA TANAH PASARAN
Edy Yamani	Merdeka	PARINGIN KOTA		6	Balangan	156	1	1	2.000.000
Moh.Asri	Paringin Barat	PARINGIN KOTA		6	Balangan		1		2.000.000
Linda Astrilita/Nasir	GG Sahminah	PARINGIN KOTA	3	7	Balangan	180	1	1	300.000
H. Busera	GG Sahminah	PARINGIN KOTA	3	7	Balangan	200	1	1	300.000
Mislan	GG Sahminah	PARINGIN KOTA	3	7	Balangan	230	1	1	300.000
Suriansyah	Perintis	PARINGIN KOTA		7	Balangan	180	1	1	300.000
Kursin H	Perintis	PARINGIN KOTA		7	Balangan	200	1	1	300.000
Sanusi S.SPD	Perintis	PARINGIN KOTA	3	7	Balangan	160	1	1	300.000
ANTON	JL. KAMPUNG BARU	PARINGIN KOTA	3	17	BALANGAN	84	1		300.000
Erwan Efendi	Perintis	PARINGIN KOTA	3	7	Balangan	180	1	1	300.000
Mahdianor	Perintis	PARINGIN KOTA	3	7	Balangan	160	1	2	300.000
Surati	Perintis	PARINGIN KOTA		7	Balangan	120	1	1	300.000
Muliadi	GG Sahminah	PARINGIN KOTA	3	7	Balangan	140	1	1	300.000
H.Mahyudin	Perintis	PARINGIN KOTA		7	Balangan	170	1	1	300.000
SUPIANOR	LAYAP	Batu piring	2	17	BALANGAN	165	1	1	350.000
Paimin	M. Naid	PARINGIN KOTA		3	Balangan	170	1	1	3.000.000
Hj. Herliani	Perintis gg Sahminan	PARINGIN KOTA		7	Balangan	140	1	1	300.000
Suriansyah	Merdeka	PARINGIN KOTA	3	8	Balangan	224	1	1	300.000
Murniyati	Merdeka	PARINGIN KOTA		8	Balangan	168	1	1	200.000
Bahriah Hj	MErdeka	PARINGIN KOTA		8	Balangan	384	1	1	500.000
Abdul Hadi	Merdeka	PARINGIN KOTA	3	8	Balangan	140	1	1	300.000
Mulyadi	Medeka	PARINGIN KOTA		8	Balangan	140	1	1	300.000
Mahrani	Merdeka	PARINGIN KOTA	3	8	Balangan	160	1	1	250.000
Haris Padillah	GgMarhani	PARINGIN KOTA		8	Balangan	150	1	1	300.000
Norman H	Merdeka	PARINGIN KOTA		8	Balangan	180	1	1	250.000
H.Asiah	Marhani	PARINGIN KOTA		8	Balangan	180	1	1	300.000
Yudi	Merdeka	PARINGIN KOTA		8	Balangan	180	1	1	300.000
Ibramsah	Bahagia	PARINGIN KOTA		9	Balangan	120	1	1	500.000
Suhada	Bahagia	PARINGIN KOTA	4	9	Balangan	160	1	1	500.000
Normaji	Bahagia	PARINGIN KOTA	4	9	Balangan	224	1	1	500.000
Hanafi	Bahagia	PARINGIN KOTA		9	Balangan	200	1	1	500.000
Hasan	Bahagia	PARINGIN KOTA		9	Balangan	160	1	1	500.000
Rudiansah	Bahagia	PARINGIN KOTA		9	Balangan	180	1	1	500.000
Yamani, H	Jl Kampung Baru	PARINGIN KOTA		17		66	1	1	350.000
Hasran	Bahagia	PARINGIN KOTA	4	9	Balangan	180	1	1	500.000
Hifni	Bahagia	PARINGIN KOTA		10	Balangan	140	1	1	300.000
Ami	Bahagia	PARINGIN KOTA		10	Balangan	160	1	1	300.000
Salasiah	Bahagaia	PARINGIN KOTA		10	Balangan	160	1	1	300.000

NAMA SUBJEK PAJAK	NAMA JALAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KABUPATEN / KOTAMADYA	LUAS TANAH (M2)	JENIS TANAH	JUMLAH BANGUNAN	HARGA TANAH PASARAN
H.Abidin	Bahagia	PARINGIN KOTA		10	Balangan	120	1	1	300.000
Pahriansyah	Bahagia	PARINGIN KOTA		10	Balangan	120	1	1	300.000
Sahlani	Bahagia	PARINGIN KOTA		10	Balangan	130	1	1	300.000
Abdul Salam arif	Bahagia	PARINGIN KOTA		10	Balangan	180	1	1	300.000
Masrun	Bahagia	PARINGIN KOTA		10	Balangan	200	1	1	300.000
Norhin	Bahagia	PARINGIN KOTA		10	Balangan	180	1	1	300.000
Satibi	Bahagia	PARINGIN KOTA		11	Balangan	144	1	1	200.000
Yanto	Bahagia	PARINGIN KOTA		11	Balangan	160	1	1	200.000
Irhamna	Bahagia	PARINGIN KOTA	4	11	Balangan	224	1	1	200.000
Yahdi	Bahagia	PARINGIN KOTA	4	11	Balangan	120	1	1	200.000
Hairullah	Bahagia	PARINGIN KOTA		11	Balangan	164	1	1	200.000
H. Alihan	Bahagia	PARINGIN KOTA	4	11	Balangan	160	1	1	200.000
Subli	Bahagia	PARINGIN KOTA	4	11	Balangan	180	1	1	200.000
H. Abdul Hadi	Bahagia	PARINGIN KOTA	4	11	Balangan	180	1	1	200.000
Ahmadi	Bahagia	PARINGIN KOTA	4	11	Balangan	200		1	200.000
Saipullah	Bahagia	PARINGIN KOTA	4	11	Balangan	164	1	1	200.000
Umu Tuhals.H	Bahagia	PARINGIN KOTA		11	Balangan	170	1	1	200.000
ARSYAD	A. YANI	PARINGIN TIMUR	0	11	BALANGAN	150	1		1.500.000
Norhayati	Bahagia	PARINGIN KOTA		11	Balangan	224	1	1	200.000
M.Arif Muluk		PARINGIN KOTA		12	Balangan	196	1	1	200.000
Riduansyah	A.Yani	PARINGIN KOTA		12	Balangan	170	1	1	200.000
Kasnawati	A.Yani	PARINGIN KOTA		12	Balangan	80	1	1	200.000
Saipullah	A. Yani	PARINGIN KOTA		12	Balangan	190	1	1	200.000
Asad	A.Yani	PARINGIN KOTA		12	Balangan	200	1	1	200.000
Adul	A.Yani	PARINGIN KOTA		12	Balangan	185	1	1	200.000
Usdek Apriansyah	A. Yani	PARINGIN KOTA		12	Balangan	200	1	1	200.000
Abdullah	A. Yani	PARINGIN KOTA		12	Balangan	168	1	1	200.000
SAHRIAH	GANG ULIN	PARINGIN KOTA	5	13	BALANGAN	70	1		300.000
A. SAINI	JL. A. YANI	PARINGIN KOTA	5	13	BALANGAN	80	1		400.000
EDY SUCIPTO	GANG ULIN	PARINGIN KOTA	5	13	BALANGAN	180	1		1.500.000
MASRAWAN	JL. A. YANI	PARINGIN KOTA	5	13	BALANGAN	150	1		1.500.000
ARPANI	JL. A. YANI	PARINGIN KOTA	5	13	BALANGAN	150	1		1.500.000
BUDIMAN. H	JL. A. YANI	PARINGIN KOTA	5	13	BALANGAN	150	1		1.500.000
SUWANDI	A. YANI	PARINGIN KOTA	5	13	BALANGAN	240	1		1.500.000
MARYUDI	A. YANI	PARINGIN KOTA	5	13	BALANGAN	220	1		1.500.000
MAHYUDIN		PARINGIN KOTA	5	13	BALANGAN				1.500.000
SARIDIN	JLN LINGKAR TIMUR	PARINGIN KOTA	5	13	BALANGAN	-	1		1.500.000
M.Junaidi	A.Yani	PARINGIN KOTA		12	Balangan	165	1	1	200.000

NAMA SUBJEK PAJAK	NAMA JALAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KABUPATEN / KOTAMADYA	LUAS TANAH (M2)	JENIS TANAH	JUMLAH BANGUNAN	HARGA TANAH PASARAN
SUPARMAN	JL. A. YANI	PARINGIN KOTA	5	13	BALANGAN	200	1		1.500.000
MUHAMMAD NOOR	Perintis	PARINGIN KOTA		17	Balangan	64	1	1	350.000
Ahmad Barkati	Batu Piring	Batu piring		1	Balangan	266	1	1	500.000
Hatimah	Batu Piring	Batu piring		1	Balangan	200	1	1	500.000
Muksin	Gg Murung Sari	Batu piring		1	Balangan	75	1	1	300.000
Masrukiyah	A.Yani	Batu piring		1	Balangan	50	1	1	500.000
Ahmadi	A.Yani	Batu piring		1	Balangan	210	1	1	500.000
Triso	A.Yani	Batu piring		1	Balangan	465	1	1	500.000
Ahmad Basuni	Murung Sari	Batu piring		1	Balangan	177	1	1	300.000
Hadiyatun	A. Yani	Batu piring		1	Balangan	96	1		500.000
Sumartini	Batu Piring	Batu piring		1	Balangan	66	1	1	500.000
Said Kira	Murung sari	Batu piring		1	Balangan	60	1	1	300.000
YONO SUGENG R	JL. PARINGIN / MARGO MULYO	Batu piring	2	6	BALANGAN	147	1		2.000.000
MAHMUD	JL. A. YANI	Batu piring	4	12	BALANGAN	105	1		300.000
WILDAN AIM	JL. A. YANI	Batu piring	4	12	BALANGAN	112	1		200.000
ROHIMAT	JL. TUNGKAP	Batu piring	2	7	BALANGAN	86	1		800.000
Dulhansyah	A.Yani	Batu piring		2	Balangan	75	1	1	500.000
Noor Janah	A. Yani	Batu piring		2	Balangan	104	1	1	500.000
Masri Efendi	Cempaka	Batu piring		2	Balangan	110	1	1	300.000
Aisyah	Cempaka	Batu piring		2	Balangan	60	1	1	300.000
Abdul Kadir	Cempaka	Batu piring		2	Balangan	52	1	1	300.000
Syokrani, H	Ahmad Yani	Batu piring		2	Balangan	168	1	1	500.000
Rajudin	Cempaka	Batu piring		2	Balangan	196	1	1	300.000
Ramsidah	A.Yani	Batu piring		2	Balangan	220	1	1	500.000
Siti Rabiah	Batu Piring	Batu piring		2	Balangan	77	1	1	500.000
Muhammad Aini	Melati	Batu piring		2	Balangan	50	1	1	300.000
Du:hansyah	Cempaka	Batu piring		2	Balangan	150	1	1	300.000
Hirmansyah	Jl. Desa Batu Piring	Batu piring		3	Balangan	94	1	1	450.000
Ali Bahrin	Jl. Desa Batu Piring	Batu piring		3	Balangan	211	1	1	500.000
Jumiansyah	Jl. Desa Batu Piring	Batu piring		3	Balangan	190	1	1	800.000
Sukarno	Jl. Desa Batu Piring	Batu piring		3	Balangan	105	1	1	450.000
Muhammad Ilmi	Jl. Batu Piring	Batu piring		3	Balangan	207	1	1	500.000
Rini Harlina	A.Yani	Batu piring		3	Balangan	208	1	1	500.000
Supian suri	Jl. Desa Batu Piring	Batu piring		3	Balangan	96	1	1	500.000
Ujiansyah	Batu Piring Gang Meranti	Batu piring		3	Balangan	200	1	1	600.000
Nunik Yuniarti	Batu Piring	Batu piring		4	Balangan	84	1	1	700.000
NORSIAH	JL PARINGIN	Batu piring	3	9	BALANGAN	86	1		200.000

NAMA SUBJEK PAJAK	NAMA JALAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KABUPATEN / KOTAMADYA	LUAS TANAH (M2)	JENIS TANAH	JUMLAH BANGUNAN	HARGA TANAH PASARAN
Abdul Gani	JL.Desu Batu Piring	Batu piring		3	Balangan	300	1	1	450.000
Arani H	Jl. Desa Batu Piring	Batu piring		3	Balangan	60	1	1	450.000
Muhammad Aliansyah	A.yani	Batu piring		3	Balangan	204	1	1	650.000
Suratmi	Jl.A.Yani	Batu piring		3	Balangan	91	1	1	650.000
Saipullah	Keluarga	Batu piring		4	Balangan	280	1	1	500.000
Jamhari	A.Yani	Batu piring		4	Balangan	220	1	1	800.000
Edi Hartono	A.Yani Gg Kenanga	Batu piring		4	Balangan	135	1	1	500.000
Firman Hadi	A.Yani	Batu piring		4	Balangan	180	1	1	700.000
Mursid	A.Yani	Batu piring		4	Balangan	450	1	1	1.200.000
Hadjo Djatikusuma	A.Yani	Batu piring		4	Balangan	200	1	1	700.000
Riasan Arianito	A.Yani	Batu piring		4	Balangan	140	1	1	700.000
Sudato.H	A.Yani Gg Meranti	Batu piring		4	Balangan	559	1	1	800.000
Busriansyah	Kompleks Batu Piring	Batu piring		4	Balangan	84	1	1	500.000
Rasidah	Komplek Batu Piring	Batu piring		4	Balangan	93	1	1	800.000
SANTIANOR	JL. H. ANANG MANGSUR	Batu piring		5	BALANGAN	75	1		1.800.000
RUSDIANSYAH	JL. H. ANANG MANGSUR	Batu piring		5	BALANGAN	82	1		2.000.000
ZAINAL	JL. H. ANANG MANGSUR	Batu piring		5	BALANGAN	102	1		1.800.000
HAIRIL ANWAR	JL. H. ANANG MANGSUR	Batu piring	0	5	BALANGAN	120	1		1.800.000
MAKMURRAZABI	JL. H. ANANG MANGSUR	Batu piring	0	5	BALANGAN	124	1		1.800.000
TAUFIQURRAHMAN	JL. H. ANANG MANGSUR	Batu piring	0	5	BALANGAN	145	1		1.800.000
BAMBANG HERMANTO	JL. H. ANANG MANGSUR	Batu piring		5	BALANGAN	145	1		1.350.000
NOOR RAJIDIN	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		4	BALANGAN	160	1		1.500.000
ANDRI WIJAYA	JL. H. ANANG MANGSUR	Batu piring	0	5	BALANGAN	88	1		1.500.000
H. BAHMI	JL. PARINGIN / MARGO MULYO	Batu piring	2	6	BALANGAN	120	1		1.800.000
WIJI	JL. PARINGIN / MARGO MULYO	Batu piring	2	6	BALANGAN	145	1		1.800.000
SUKMADI	PARINGIN / MARGO MULYO	Batu piring	2	6	BALANGAN	132	1		2.300.000
WAHYUDI	JL. PARINGIN / MARGO MULYO	Batu piring	3	6	BALANGAN	122	1		800.000
SARMIN	JL. PARINGIN / MARGO MULYO	Batu piring	2	6	BALANGAN	128	1		1.200.000
HADERI	JL. PARINGIN / MARGO MULYO	Batu piring	2	6	BALANGAN	98	1		800.000
SARMO	JL. PARINGIN / MARGO MULYO	Batu piring	2	6	BALANGAN	117	1		1.000.000
MAHMUD	JL. PARINGIN / MARGO	Batu piring	2	6	BALANGAN	120	1		1.500.000

NAMA SUBJEK PAJAK	NAMA JALAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KABUPATEN / KOTAMADYA	LUAS TANAH (M2)	JENIS TANAH	JUMLAH BANGUNAN	HARGA TANAH PASARAN
	MULYO								
KAMRANI	JL. PARINGIN / MARGO MULYO	Batu piring	2	6	BALANGAN	98	1		1.200.000
H. YAHDI	JL. PARINGIN / MARGO MULYO	Batu piring	2	6	BALANGAN	145	1		2.500.000
HASMAH	JL. TUNGKAP	Batu piring	2	7	BALANGAN	84	1		350.000
RUDIANSYAH	JL. TUNGKAP	Batu piring	2	7	BALANGAN	98	1		350.000
TARDI	JL. TUNGKAP	Batu piring		7	BALANGAN	82	1		400.000
MURNI	TUNGKAP	Batu piring	2	7	BALANGAN	132	1		1.500.000
MATRA'I	JL PARINGIN	Batu piring	3	8	BALANGAN	124	1		250.000
RUSDI	JL. PARINGIN / MUARA PITAP	Batu piring	3	8	BALANGAN	98	1		250.000
ABDUL MUHTAR	JL. PARINGIN	Batu piring	3	8	BALANGAN	98	1		250.000
ARDIANSYAH	JL. PARINGIN	Batu piring	3	8	BALANGAN	84	1		200.000
HURMANSYAH	JL PARINGIN	Batu piring	3	8	BALANGAN	88	1		3.000.000
YUSNI	JL. PARINGIN	Batu piring	3	8	BALANGAN	159	1		250.000
YANOR	JL. PARINGIN	Batu piring	3	8	BALANGAN	122	1		300.000
SAYYID ABDURAHMAN AL-IDRUS	PERUMNAS REZKY RESIDENCE	Batu piring	1	16	BALANGAN	96	1	1	300.000
H. JAINUDIN	JL. PARINGIN	Batu piring	3	8	BALANGAN	145	1		600.000
CARMIAH	JL.. PARINGIN	Batu piring	3	9	BALANGAN	82	1		200.000
MUSA	JL.. PARINGIN	Batu piring	3	9	BALANGAN	102	1		250.000
BAHRI	JL.. PARINGIN	Batu piring	3	9	BALANGAN	128	1		350.000
RUSMIN NURYADIN	JL PARINGIN	Batu piring	3	9	BALANGAN	122	1		350.000
SARUJI	JL.. PARINGIN	Batu piring	3	9	BALANGAN	108	1		250.000
TAUFIK	JL.. PARINGIN	Batu piring	3	9	BALANGAN	136	1		350.000
MUHAMMAD IDRIS	JL.. PARINGIN	Batu piring	3	10	BALANGAN	68	1		150.000
AMRULLAH	JL.. PARINGIN	Batu piring	3	10	BALANGAN	108	1		250.000
ALIANSYAH	JL.. PARINGIN	Batu piring	3	10	BALANGAN	124	1		250.000
RAHMADI	JL.. PARINGIN	Batu piring	3	10	BALANGAN	105	1		250.000
SUMAJI	JL. BHAYANGKARA	Batu piring		11	BALANGAN	140	1	1	150.000
SUPIAN NASIR	HARAPAN BARU	Batu piring	0	11	BALANGAN	100	1	1	300.000
ASMAIDI	JL. HARAPAN BARU	Batu piring	0	11	BALANGAN	100	1	1	300.000
ALOY SAPIRIN	JL. HARAPAN BARU	Batu piring	0	11	BALANGAN	110	1	1	200.000
ANDASI	HARAPAN BARU	Batu piring	0	11	BALANGAN	110	1	1	250.000
BARIAH	HARAPAN BARU	Batu piring	0	11	BALANGAN	100	1	2	250.000
AIDA SARI	JL. BHAYANGKARA	Batu piring	0	11	BALANGAN	300	1	1	200.000
WAHYUDI	JALAN AHMAD YANI	Batu piring	4	12	BALANGAN	120	1	1	300.000

NAMA SUBJEK PAJAK	NAMA JALAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KABUPATEN / KOTAMADYA	LUAS TANAH (M2)	JENIS TANAH	JUMLAH BANGUNAN	HARGA TANAH PASARAN
ABDILLAH	JL. A. YANI	Batu piring	4	12	BALANGAN	120	1	1	250.000
SALAMIAH	JL. MINDUIN	Batu piring	4	12	BALANGAN	100	1	1	200.000
M. SYAHRAN	JL. MINDUIN	Batu piring	4	12	BALANGAN	160	1	1	225.000
ARSANI	JL. A. YANI	Batu piring	4	12	BALANGAN	180	1	1	100.000
DAMANHURI / M. JAMHURI	JL. MINDUIN	Batu piring	4	12	BALANGAN	100	1	1	250.000
SULAIMAN	JL. MINDUIN	Batu piring	4	12	BALANGAN	200	1	1	300.000
ERIZAL	KOMP AR RAUDAH	Batu piring	0	11	BALANGAN	186	1	1	500.000
HERNI YUSNITA	JL. PARINGIN	Batu piring	3	8	BALANGAN		1		250.000
ALIYANSYAH	JL. KALADAN	Batu piring	0	13	BALANGAN	91	1	1	350.000
SURIANI	JL KALADAN	Batu piring	0	13	BALANGAN	60	1	1	300.000
DIAH / IKAT	JL KALADAN	Batu piring	0	13	BALANGAN	150	1	1	200.000
ABDUL SAMAD / USRAN	JL KALADAN	Batu piring	0	13	BALANGAN	100	1	1	250.000
ABDUL MAJID / DARHASAN	JL KALADAN	Batu piring	0	13	BALANGAN	170	1	1	300.000
RUSINAH	JL. KALADAN	Batu piring	0	13	BALANGAN	35	1		400.000
RUSDI / USRAN	JL. KALADAN	Batu piring	0	13	BALANGAN	200	1		250.000
NORMANSYAH	JL. KALADAN	Batu piring	0	13	BALANGAN	50	1	1	300.000
JINUR	JL. KALADAN	Batu piring	0	13	BALANGAN	35	1	1	300.000
RADIANAH	JL. KALADAN	Batu piring	0	13	BALANGAN	200	1	1	200.000
FERRY HASYINOR A	GANG MURAI	Batu piring	0	14	BALANGAN	120	1		500.000
FITRIADI	GANG PARKIT	Batu piring	0	14	BALANGAN	120	1		500.000
AHDI WIRA KUSUMA	GG KAKATUA	Batu piring	0	14	BALANGAN	135	1	1	500.000
RINI YOKRIMAH	GG KENARI	Batu piring	0	14	BALANGAN	130	1	1	500.000
ADMAWATI	GG GARUDA	Batu piring	0	14	BALANGAN	130	1	1	500.000
TAUFIKURRAHMAN	JL. H. ANANG MANGSUR	Batu piring		5	BALANGAN	145	1		1.800.000
HENDRA MAYEDI GANIE	GG WALET	Batu piring	0	14	BALANGAN	145	1		600.000
AHMADI	GG TIUNG	Batu piring	0	14	BALANGAN	130	1		500.000
MUHAMMAD NOOR	GG RAJAWALI	Batu piring	0	14	BALANGAN	130	1	1	500.000
DIET BAHARSYAH	GG BELIBIS	Batu piring	0	14	BALANGAN	130	1	1	500.000
Akhmad Nor Azmi	A.Yani	Batu piring		2	Balangan	168	1	1	500.000
Rusdiawati	A.Yani	Batu piring		4	Balangan	120	1	1	800.000
	Batu Piring	Batu piring		1	Balangan	120	1	1	500.000
SULAIMAN	PERUMNAS BUMI RAYU INDAH	Batu piring	3	15	BALANGAN	140	1	1	450.000
HERY SUPIANOR	PERUMNAS BUMI RAYU INDAH	Batu piring	3	15	BALANGAN	140	1	1	300.000
SUTARDI	PERUMNAS BUMI RAYU INDAH	Batu piring	3	15	BALANGAN	140	1	1	300.000
FADILLAH	PERUMNAS BUMI RAYU	Batu piring	3	15	BALANGAN	96	1	1	300.000

NAMA SUBJEK PAJAK	NAMA JALAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KABUPATEN / KOTAMADYA	LUAS TANAH (M2)	JENIS TANAH	JUMLAH BANGUNAN	HARGA TANAH PASARAN
	INDAH								
SUGENG PRAYETNO	PERUMNAS BUMI RAYA INDAH	Batu piring	3	15	BALANGAN	96	1	1	300.000
SUNARDI	PERUMNAS BUMI RAYA INDAH	Batu piring	3	15	BALANGAN	96	1	1	300.000
HENDRE	PERUMNAS BUMI RAYA INDAH	Batu piring	3	15	BALANGAN	96	1	1	300.000
BASUNI	PERUMNAS BUMI RAYA INDAH	Batu piring	3	15	BALANGAN	96	1	1	310.000
MARSEN S LESA WANGE	GG ANGGANG	Batu piring	0	14	BALANGAN	150	1	1	500.000
AMRULLAH	GUNUNG PANDAU	PARINGIN TIMUR		4	BALANGAN	200	1		1.500.000
FAKHRIADI	GG BANGAU	Batu piring	0	14	BALANGAN	150	1	1	500.000

Lampiran 2. Data Survey Lapangan (Nilai Bangunan)

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVA SI	DAYA LISTRIK TERPASAN G (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT- LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
HARYONO	51					2	2	2	2		-
AGUS MUSLIM	36	2	2011		1300	3	2	2	2	250.000.000	6.944.444
ABDUL FATAH	72					2	2	2	3		-
SRI NORHASAN AH	80		2011		900	5	4	4	3		-
H. TABERANI	99				900	2	2	2	2		-
ASMADI	133		2011		900	5	4	3	3		-
SYAHMADI	96		2011		900	5	4	4	3		-
HJ. FATIMAH	156		2011		900	2	2	2	3		-
H. FAISAL	150				1300	2	2	2	3		-
Halik	112	1	2011		2200	2	2	2	2		-
RUDI RESNAWAN	67	1	2011		900	5	4	2	3		-
JOHANSYA H		1				5	4	4	2		
NORHAFIAH	32		2011		900	4	4	4	3		-
M. ANWAR	133	1	2011		900	2	2	2	2		-
KUSMALI	66	1	2011		900	2	2	2	2		-
MASIAH	40		2011		900	4	4	2	3		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVA SI	DAYA LISTRIK TERPASAN G (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT- LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
											-
SYAHRUJI	50		2011		900	5	4	2	3		-
RUSDIANSY AH	104				900	2	2	2	2		-
MAYUS AKHMAD	99	1	2011		900	2	2	2	3		-
IDA HJ	72	1	2011		900	5	4	4	3		-
KASMAN PURBA	90	1	2011		900	5	4	4	3		-
Desi	40	1	2011		1300	2	2	2	2		-
MUSLIM EFFENDIE	168		2011		900	5	4	4	3		-
ALI SUBHAN	60		2011			2	2	2	2		-
MURSI AH	45	0	2011	0	900	5	4	4	3		-
YUSMANSY AH	63	0	2011	0	900	5	4	2	3		-
DIDIT TANTOKO											
NINING ERNAWATI	153					2	2	2	2		-
Ancah	70	1	2011		900	2	2	2	3		-
NORBAINA H	87		2011		900	5	4	4	3		-
Daimmarulla h	72	1			900	5	4	4	3		-
WAHYUNI	33		2011		900	5	4	4	3		-
HARNAWAT	84	1			900	2	2	2	2		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
I											-
HASAN	160		2011		900	5	4	4	3		-
HAFAH	79		2011		900						-
Syamsul bahri	50	1	2011		900	5	3	2	3		-
IPANDI	90		2011			5	4	4	2		-
MAMA SHALEH	30	1			900	5	4	4	3		-
HJ. MASIAH	90	1	2011		900	5	4	2	2		-
BUSRIANSYAH	70				900	5	4	2	2		-
RAMLI	90		2011		900	5	4	4	3		-
SUBELI,H	105		2011		900	5	4	4	3		-
AIDIL	133				900	2	2	2	2		-
Karim	45	1	2011		900	2	3	4	2		-
yadi Jarmat	72	1	2011		1300	2	2	2	2		-
ABDUL MURAD	64					5	4	4	2		-
SARKANI	79					2	2	2	2		-
ETER NABIRING	88					5	4	4	2		-
ABDUL MUTHALIB	51				900	5	4	4	2		-
HALIK	76				900	5	4	4	3		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVA SI	DAYA LISTRIK TERPASAN G (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT- LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
											-
SUMIATI	88					5	4	4	0		-
SUGIANNOR	68	1	2013		900	5	2	2	2		-
Masdia H	70	1	2011		1300	2	2	2	2		-
RUSMINI	70					5	4	4	2		-
Yahya	55	1			1300	2	3	2	2		-
KHAIRIL ANWAR	95		2011		1300	2	2	2	2		-
AGUS	64				900	5	4	4	2		-
ABDURRAH MAN SIDIQ					900	2	2	2	3		
Yusi Wirawan	112	1	1986		1300	3	3	2	2		-
TAUFIKURR AHMAN	68		2011			2	2	2	2		-
Muhammad	40	1	2011		1300	2	2	2	2		-
Sugiani H	126	1	2011		1300	2	2	2	2		-
Husyairi	96	1	2011		1300	3	2	4	2		-
Muslani	99	1	2011		1300	3	2	4	2		-
FAKHRUDIN	36		1997		900	2	2	2	2		-
Marzuki H	60	1	2011		1300	2	3	4	2		-
HAMBRAN	36		2011		900	2	2	2	2		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
											-
RAHMADI	36		2011		900	2	2	2	2		-
NORIFANSYAH	36		1997		900	3	2	2	2		-
Akhyar	36	1	2011		900	2	2	2	2		-
HARNI RIADI	36		1997		900	2	2	2	2		-
AGUS SALIM	36		1997		900	2	2	2	2		-
H. ZAINAL HAKIM	36		1997		900	2	2	2	2		-
Selamat R	36	1	1997		900	2	2	2	2		-
WARSITO	36		2011		900	2	2	2	2		-
SUWARDI	36		1997		900	2	2	2	2	250.000.000	6.944.444
A. Marwan	270	1	2010		900	5	4	4	2		-
HORMAN	180		2010			5	4	4	2		-
RUSMAIDI	140		2010			5	4	4	2		-
ARMAH	156		2010			5	4	4	2		-
ISMAWATI	125		2010			5	4	4	2		-
JALI RAHMAN	196		2010			5	2	2	2		-
Norbainah	87	1	2011		900	5	4	4	3		-
Hasan	72	1	2011		900	5	4	4	3		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVA SI	DAYA LISTRIK TERPASAN G (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT- LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
											-
Syahrudin	50	1	2011		900	5	4	4	3		-
Abd Karim	45	1	2011			5	4	4	3		-
h. mithan	96	1	2011		900	5	4	4	2		-
Aberani	72	1	2011			5	4	4	3		-
Aliansyah	45	1	2011		900	5	4	4	3		-
Supriatno	70	1	2011		900	5	4	2	3		-
Hartati	36	1	2011		900	2	2	2	3		-
Nasrullah	96	1	2011		900	2	2	2	2		-
Ernawati	72	1	2011		900	2	2	2	3		-
Suhardi	170	1	2011		1300	2	2	2	2		-
WASIDI	84		2011		900	5	4	2	3		-
SUWARTO					900	2	2	2	3		
ALPAN NASUKI	64				900	4	2	2	3		-
BUDI UTOMO	96				900	5	4	2	3		-
SYAHBANI RAHMAN	72					5	4	4	3		-
MASRUNI	91					2	2	2	3		-
HAIRUL SHALEH	72					5	4	4	3		-

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
SYAHRANI											
RUSMINI	60				900	2	2	2	3		-
BUDI ANSHARI	96		2011		900	2	2	2	2		-
ABDUL HAMIDAN	70				900	2	2	2	2		-
M. LAZIM	36				900	2	2	2	2		-
SYAIFULLAH	60	1	2011		900	5	2	2	2		-
M YUSUF / JARKASI	74	1	2011		450	5	4	4	2		-
NORLIANA	72	1	2011		450	5	4	4	2		-
SAHDAN, H	221	1	2011		900	5	4	4	2		-
ZULKIFLIAN SYAH, H	54	1	2011		900	3	4	2	2		-
IRIANSYAH, H	91	2	2011		1200	2	2	2	2		-
JAMHARI, H	60	1	2011		900	3	4	2	2		-
PRIYADI	50	1	2011		900	3	4	2	2		-
Paraji.H	48	1			900	3	2	2	2		-
Fakhrudin	60	1	2011		1200	3	2	2	1		-
Ruslan,H	48	1	2011		450	5	4	4	2		-
Arjani	40	1	2011		450	5	4	4	2		-
Supiani	48	1	2011		450	5	4	4	2		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVA SI	DAYA LISTRIK TERPASAN G (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT- LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
											-
Bustani	50	1	2011		900	5	4	4	2		-
Syafrudin	48	2	2011		1200	2	2	2	1		-
Abd. Kadir	24	1	2011		450	5	4	4	2		-
Saman	50	1	2011		450	5	4	4	2		-
MASDIA, H	93	1	2011		900	2	2	2	1		-
Normansyah	24	1	2011		1200	2	2	2	1		-
Saunah	64	1			900	3	4	2	2		-
Mas'udi	60	1	2011		900	3	4	2	2		-
Taufik Hidayah	48	1	2011		900	5	4	4	2		-
Syamsiar Rahman	80	1	2011		900	3	4	2	2		-
Jainah	36	1			900	3	4	2	2		-
Suriani	145	1			900	3	4	2	2		-
Darmansyah	72	1			450	5	4	4	3		-
MURNADI, H	170	1	2011		1200	2	2	2	2		-
MUHAMAD SALIM	144	1			900	3	4	2	2		-
NORMANSY AH	140	1	2011		900	3	2	2	2		-
ABDURAKH	112	1	2011		1200	2	2	2	1		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
MAN SATIBI, H											-
IRAN	125	1	2011		450	5	4	4	3		-
AMAT SEMARANG, H	90	1	2011		1200	2	2	2	1		-
HUSAINI, H		1			450	5	4	4	3		
M.Ali Fahmi	81	1	2011		1200	2	2	2	1		-
Asnikusu	71	1	2011		71	2	2	2	1		-
SUKADI	36	1	2011		450	5	4	4	2		-
SUPIYAT, H	45	1	2011		900	5	4	4	2		-
KAMARIAH (PNS)	84	1			900	5	2	2	2		-
MUAZ	128	1	2011		900	5	4	4	3		-
MAHFUS	136	1	2011		450	5	4	4	2		-
RAGUAN	90	1	2011		900	5	4	4	3		-
RAJIDINNO R	72	1	2011		900	5	2	2	3		-
NORERPAN SYAH	42	1			900	5	2	2	3		-
Alpan Nasuki	84	1	2011		900	5	4	4	3		-
Riduan	66	1	2011		900	5	2	2	1		-
Ruswandi	64	1	2011		1200	3	2	2	2		-

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
MARSIANO	112	1	2011		450	5	4	4	2		-
AMIRUDIN	60	1	2011		450	3	4	4	3		-
ABDUL LATIF, H	96	1	2011		900	3	2	2	2		-
SAUDI	108	1	2011		1200	1	2	2	1		-
Eko Pramono	77	1	2011		450	5	4	2	1		-
Hasan Duma	80	1	2011		900	5	4	4	3		-
Suwardi	110	1	2011		900	2	2	2	1		-
Gusti Fauzia	120	1	2011		1200	2	2	2	1		-
Butet Hadijah	138	1	2011		900	3	2	2	2		-
Marhat	140	1	2011		900	5	4	4	3		-
Sugian	48	1	2011		1200	2	2	2	1		-
Nurliani, Hj	96	1	2011		900	5	4	4	3		-
Yudi Sudarto	58	1	2011		450	3	4	4	3		-
ANANG PUDJI SUSANTO	66	1	2013	-	900	5	2	2	3		-
Suriyadi Rahman	36	1	2011		450	5	4	4	2		-
Fahdudin Rifqy	40	1	2011		450	5	4	4	2		-
Budi	30	1	2011		450	5	4	4	2		-

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
											-
Yuspari	30	1	2011		450	5	4	4	2		-
Yuliansyah	36	1	2011		450	5	4	4	2		-
Murhan	80	1	2011		450	5	4	4	2		-
Umar H	30	1	2011		1200	2	2	2	1		-
Herd	60	1	2011		1200	2	2	2	1		-
Syahman	50	1	2011		1200	2	2	2	1		-
Sadikul Madani	60	1			900	5	2	2	1		-
Edy Yamani	56	1	1200		2	2	2	2	1		-
Moh.Asri					1200	2	2	2	1		
Linda Astrilita/Nasir	100	2	2005		900	5	2	2			-
H. Busera	120	2	2018		900	5	4	4	3		-
Mislan	180	1	2011		900	5	4	4	3		-
Suriansyah	140	1	2018		900	5	4	4	3		-
Kursin H	160	1	2018		900	5	2	2	3		-
Sanusi S.SPD	120	1	2018		900	5	4	2	2		-
ANTON	84	1	2014		900	5	2	2	2		-
Erwan Efindi	120	1	2003		900	5	2	2	2		-

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
Mahdianor	140	1	2004		900	5	4	2	2		-
Surati	80	1	2012		900	5	2	2	2		-
Muliadi	100	1	2000		900	5	4	2			-
H.Mahyudin	100	1	2013		900	5	2	2	2		-
SUPIANOR	165	1	2013	-	900	5	2	2	2		-
Paimin	140	1	2011		900	3	4	2	2		-
Hj. Herliani	110	1	2008		900	5	4	4	3		-
Suriansyah	200	1	2016		900	5	4	4	2		-
Murniyati	158	1	2009	2018	900	5	4	4	2		-
Bahriah Hj	384	1	2004	2017	900	5	2	2	2		-
Abdul Hadi	120	1	2006		900	5	2	2	2		-
Mulyadi	100	1	2003		900	5	2	2	2		-
Mahrani	120	1	2007			5	4	4	2		-
Haris Padillah	120	1	2004		900	5	2	2	2		-
Norman H	140	1	2017		900	5	4	4	2		-
H.Asiah	140	1	2008		900	5	4	4	3		-
Yudi	160	1	2004		900	5	4	2	2		-

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
Ibramsah	100	1	2001		900	5	2	2	2		-
Suhada	120	1	2005		900	5	4	4	2		-
Normaji	144	1	2017		900	5	2	2	2		-
Hanafi	160	1	2015		900	3	4	4	2		-
Hasan	140	1	2010		900	5	4	4	2		-
Rudiansah	140	1	2005		900	5	3	4	2		-
YAMANI, H	66	1	2013		900	5	2	2	3		-
Hasran	120	1	2005		900	5	4	4	2		-
Hifni	100	1	2000		900	5	4	2	3		-
Arni	140	1	2000		900	5	4	4	2		-
Salasiah	140	1	2004		900	5	2	2	2		-
H.Abidin	100	1	2003		900	5	4	4	2		-
Pahriansyah	100	1	2005		900	5	4	4	2		-
Sahlani	90	1	2004		450	5	4	4	3		-
Abdul Salam arif	140	1	2001		900	5	2	2	2		-
Masrun	180	1	2004		900	5	4	4	3		-
Norhin	120	1	2003		900	5	4	4	3		-

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVA SI	DAYA LISTRIK TERPASAN G (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT- LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
Satibi	100	1	2001	2004	900	5	4	4	2		-
Yanto	100	1	2001		900	5	2	2	2		-
Irhamna	180	1	2002		900	5	4	2	2		-
Yahdi	100	1	2004		900	5	4	4	2		-
Hairullah	120	1	2000		900	5	4	2	2		-
H. Alihan	120	1	2003		900	5	4	4	2		-
Subli	140	1	2001		900	5	4	4	2		-
H. Abdul Hadi	160	1	2001		900	5	4	2	2		-
Ahmadi	160	1	2001		900	5	4	2	2		-
Saipullah	120	1	2000		900	5	4	4	2		-
Umu Tuhals.H	100	1	2001		900	5	4	4	2		-
ARSYAD	64				900	5	4	4	3		-
Norhayati	180	1	2004		900	5	4	4	2		-
M.Arif Muluk	84	1			900	5	2	2	2		-
Riduansyah	60	1	2001		900	5	4	4	3		-
Kasnawati	60	1	2001		450	5	4	4	3		-
Saipullah	80	1	2002		900	5	3	2	3		-

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVA SI	DAYA LISTRIK TERPASAN G (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT- LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
Asad	98	1	2003		900	5	4	4	3		-
Adul	60	1	2004		450	5	4	4	3		-
Usdek Apriansyah	90	1	2002		900	5	4	4	2		-
Abdullah	80	1	2000		900	5	4	4	2		-
SAHRIAH	45	1	2011		450	5	2	4	2		-
A. SAINI	28	-	2011		900	3	3	2	2		-
EDY SUCIPTO	32	1	2011		900	3	3	2	2		-
MASRAWAN	50	1	2011		450	5	4	4	2		-
ARPANI	60	1	2011		900	2	2	2	2		-
BUDIMAN. H	50	1	2011		450	5	4	5	3		-
SUWANDI	60	1	2011		900	5	4	2	2		-
MARYUDI	70	1	2011		900	5	4	4	2		-
MAHYUDIN	1	2011		450	2	5	4	4	3		-
SARIDIN	78	1	2003		900	5	4	4	2		-
M.Junaidi	68	1	2001		900						-
SUPARMAN			2002		900	5	2	2	2		
Muhammad Noor	64	1	2013		900	5	2	2	2		-
Ahmad		1	2011		2200	3	2	2	2		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVA SI	DAYA LISTRIK TERPASAN G (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT- LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
Barkati											
Hatimah	75	1	2011								-
Muksin	52	1	2011		2200	2	2	2	2		-
Masrukiyah	36	1	2011		1300	3	4	4	2		-
Ahmadi	104	1	2011		2200	3	4	4	2		-
Trisno	90	1	2011		2200	2	2	2	2		-
Ahmad Basuni	77	1	2011		2200	2	2	4	2		-
Hadiyatun	96	1	2011		2200	2	3	4	2		-
Sumartini	55	1	2011		1300	5	3	4	2		-
Said Kira	60	1	2011		3500	3	2	2	2		-
YONO SUGENG R	147	1	2000	2019	1300	2	2	2	2	2.100.000.00 0	14.285.714
MAHMUD	105	1	2001	2017	900	5	4	4	2	15.000.000	142.857
WILDAN AIM	112	1	2007	2018	900	5	4	4	2	10.000.000	89.286
ROHIMAT	86	1	2008	2017	900	5	3	2	2	6.500.000.00 0	75.581.395
Dulhansyah	57	1	2011		2200	3	3	2	2		-
Noor Janah	88	1	2011		1300	3	3	2	2		-
Masri Efendi	70	1	2011		2200	2	2	2	2		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVA SI	DAYA LISTRIK TERPASAN G (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT- LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
											-
Aisyah	62	1	2011		2200	2	2	2	2		-
Abdul Kadir	52	1	2011		1300	3	3	2	2		-
Syokrani, H	72	1	2011		2200	2	2	2	2		-
Rajudin	70	1	2011		2200	2	2	2	2		-
Ramsidah	120	1	2011		2200	2	2	2	2		-
Siti Rabiah	70	1	2011		1300	2	2	2	2		-
Muhammad Aini	40	1	2011		1300	2	2	2	2		-
Du;hansyah	75	1	2011		2200	2	2	2	2		-
Hirmansyah	48	1	2011		1300	2	2	2	2		-
Ali Bahrin	102	1	2011		1300	3	3	2	2		-
Jumiansyah	84	1			1300	2	2	2	2		-
Sukarno	68	1	2011		2200	2	2	2	2		-
Muhammad Ilmi	66	1	2011		1300	2	2	2	2		-
Rini Harlina	48	1	2011		900	3	3	4	2		-
Supian suri	96	1			1300	2	3	2	2		-
Ujiansyah	102	1	2011		1300	2	2	2	2		-
Nunik	84	1	2011		1200	3	3	2	2		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
Yuniarti											-
NORSIAH	86	1	2009	2022	900	2	2	2	2	130.000.000	1.511.628
Abdul Gani	142	1	2011		2200	2	2	2	2		-
Arani H	60	1	2011		1300	2	2	2	2		-
Muhammad Aliansyah	117	1	2011		2200	2	2	2	2		-
Suratmi	36	1	2011		1300	2	2	2	2		-
Saipullah	280	1			2200	2	2	3	2		-
Jamhari	76	1	2011		1300	2	2	2	2		-
Edi Hartono	60	1	2011		1300	3	3	4	2		-
Firman Hadi	180	1	2011		1300	3	2	4	2		-
Mursid	375	1	2011		2200	2	2	2	1		-
Hadijo Djatikusuma	54	1	2011		1300	2	2	2	2		-
Riasan Arianto	75	1	2011		1300	3	2	4	2		-
Sudato.H	174	1			2200	2	2	2	2		-
Busriansyah	75	1	2011		1300	3	3	4	2		-
Rasidah	93	1	2011		1300	3	3	4	2		-
SANTIANOR	75	1	2001	2015	900	5	4	4	2	400.000.000	5.333.333
RUSDIANSY	82	1	2004	2017	900	5	4	4	2		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
AH										240.000.000	2.926.829
ZAINAL	102	1	2006	2020	900	5	4	4	2	280.000.000	2.745.098
HAIRIL ANWAR	120	1	2005	2018	1300	2	2	2	2	1.800.000.000	15.000.000
MAKMURRA ZABI	124	1	2006	2020	1300	2	2	2	2	2.300.000.000	18.548.387
TAUFIQURRAHMAN	145	1	2018		1300	2	2	2	2	2.800.000.000	19.310.345
BAMBANG HERMANTO	145	1	2003	2020	900	5	4	4	2	800.000.000	5.517.241
NOOR RAJIDIN	111		2011		1300	5	2	2	2		-
ANDRI WIJAYA	88	2	2008	2016	900+1300	2	2	2	2	2.300.000.000	26.136.364
H. BAHMI	120	2	2003	2016	900+1300	2	2	2	2	2.800.000.000	23.333.333
WIJI	145	1	2003	2018	900	5	4	2	2	1.350.000.000	9.310.345
SUKMADI	132	1	2002	2019	900	5	4	2	2	1.700.000.000	12.878.788
WAHYUDI	122	1	2001	2017	900	5	4	4	2	350.000.000	2.868.852
SARMIN	128	1	2002	2014	900	5	3	2	2	950.000.000	7.421.875
HADERI	98	1	2005	2014	900	5	4	4	2	750.000.000	7.653.061
SARMO	117	1	2002	2016	900	5	4	4	2		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
										650.000.000	5.555.556
MAHMUD	120	1	2001	2014	900	5	4	4	2	1.600.000.000	13.333.333
KAMRANI	98	1	2008	2019	1300	2	2	2	2	1.800.000.000	18.367.347
H. YAHDI	145	2	2000	2020	900+300	2	2	2	2	3.500.000.000	24.137.931
HASMAH	84	1	2001	2013	900	5	4	4	2	250.000.000	2.976.190
RUDIANSYAH	98	1	2007	2018	900	5	4	4	2	250.000.000	2.551.020
TARDI	82	1	2020	2021	900	5	3	4	2	180.000.000	2.195.122
MURNI	132	2	2007	2020	1300	2	2	2	2	950.000.000	7.196.970
MATRA'I	124	1	1999	2022	450	2	2	2	2	400.000.000	3.225.806
RUSDI	98	1	1999	2019	450	5	4	4	2	120.000.000	1.224.490
ABDUL MUHTAR	88	1	2002	2016	450	5	4	4	2	260.000.000	2.954.545
ARDIANSYAH	84	1	2013	2020	450	5	4	4	3	80.000.000	952.381
HURMANSYAH	88	1	1998		450	5	4	4	2	280.000.000	3.181.818
YUSNI	159	1	2011	2019	900	5	4	2	2	480.000.000	3.018.868
YANOR	122	1	2001	2020	900	5	2	2	2	650.000.000	5.327.869
SAYYID ABDURAHM	96	1	2016	2020	900	2	2	2	2	128.000.000	1.333.333

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVA SI	DAYA LISTRIK TERPASAN G (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT- LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
AN AL- IDRUS											
H. JAINUDIN	145	1	2013	2019	450	5	4	4	2	850.000.000	5.862.069
CARMIAH	82	1	2004	-	450	5	4	4	3	120.000.000	1.463.415
MUSA	102	1	1996	2016	450	5	4	4	3	120.000.000	1.176.471
BAHRI	128	1	2003	2021	900	5	2	2	2	250.000.000	1.953.125
RUSMIN NURYADIN	122	1	1996	2018	900	2	2	2	2	250.000.000	2.049.180
SARUJI	108	1	1996	2013	900	5	4	4	3	150.000.000	1.388.889
TAUFIK	136	1	2000	2020	900	2	4	2	2	285.000.000	2.095.588
MUHAMMA D IDRIS	68	1	2007	-	450	5	4	4	3	130.000.000	1.911.765
AMRULLAH	108	1	1996	2008		5	4	4	2	280.000.000	2.592.593
ALIANSYAH	124	1	2002	2015	450	5	3	4	2	240.000.000	1.935.484
RAHMADI	105	1	1970	2007	450	5	4	4	3	240.000.000	2.285.714
SUMAJI	120	1	2022		1300	5	2	1	3	200.000.000	1.666.667
SUPIAN NASIR	100	1	2002		900	5	4	4	3	70.000.000	700.000
ASMAIDI	100	1	2000		900	5	4	4	3	300.000.000	3.000.000
ALOY SAPIRIN	110	1	2000		900	5	4	4	3	15.000.000.000	136.363.636
ANDASI	110	1	1969	2020	900	5	4	4	3		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVA SI	DAYA LISTRIK TERPASAN G (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT- LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
										20.000.000	181.818
BARIAH	100	1	2018		900	5	4	4	3	20.000.000	200.000
AIDA SARI	300	1	2018		1300	2	2	2	3	300.000.000	1.000.000
WAHYUDI	120	1	2006	2006	900	5	4	2	2	15.000.000	125.000
ABDILLAH	120	1	2004	2018	900	5	4	4	2	15.000.000	125.000
SALAMIAH	100	1	2004		900	5	4	4	3	20.000.000	200.000
M. SYAHRAN	160	1	2000	2017	900	5	4	2	2	25.000.000	156.250
ARSANI	180	1	1999	2018	900	5	4	4	2	20.000.000	111.111
DAMANHUR I / M. JAMHURI	100	1	2001	2013	900	5	4	4	2	15.000.000	150.000
SULAIMAN	200	1	2001	2017	900	5	2	2	2	100.000.000	500.000
ERIZAL	180	1	2009		1300	2	2	2	2	150.000.000	833.333
HERNI YUSNITA	120	1	1997	2019	900	5	2	2	2	550.000.000	4.583.333
ALIYANSYA H	91	1	2004	2004	900	5	2	2	2	150.000.000	1.648.352
SURIANI	66	1	1998	2015	450	5	4	4	2	35.000.000	530.303
DIAH / IKAT	150	1	2015	2022	450	5	2	2	3	15.000.000	100.000
ABDUL SAMAD / USRAN	100	1	1999		900	5	4	4	2	50.000.000	500.000
ABDUL	170	1	1985	2016	450	5	4	4	3		

NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
MAJID / DARHASAN										80.000.000	470.588
RUSINAH	35	1	2010		900	5	4	4	3	5.000.000	142.857
RUSDI / USRAN	200	1	1998	2016	900	5	4	4	3	20.000.000	100.000
NORMANSYAH	50	1	1989	2019	900	5	2	2	3	15.000.000	300.000
JINUR	35	1	2009		450	5	3	4	3	10.000.000	285.714
RADIANAH	200	1	2009		450	5	4	4	2	20.000.000	100.000
FERRY HASYINORA	120	1	2008	2010	900	2	2	2	2	300.000.000	2.500.000
FITRIADI	120	1	2007	2021	900	5	3	2	2	250.000.000	2.083.333
AHDI WIRAKUSUMA	135	1	2009	2017	450	2	2	2	2	300.000.000	2.222.222
RINI YOKRIMAH	130	1	2009	2010	900	2	2	2	2	200.000.000	1.538.462
ADMAWATI	130	2	2010	2016	900	5	2	2	2	120.000.000	923.077
TAUFIKURRAHMAN	145	1	2018	-	1300	2	2	2	2	2.800.000.000	19.310.345
HENDRA MAYEDI GANIE	145	1	2010	2013	900	5	2	2	2	400.000.000	2.758.621
AHMADI	130	1	11	2020	900	5	2	2	2	120.000.000	923.077
MUHAMMAD NOOR	130	1	2010	2013	900	5	2	2	2	200.000.000	1.538.462
DIET	120	1	2018	2018	900	5	2	2	2		

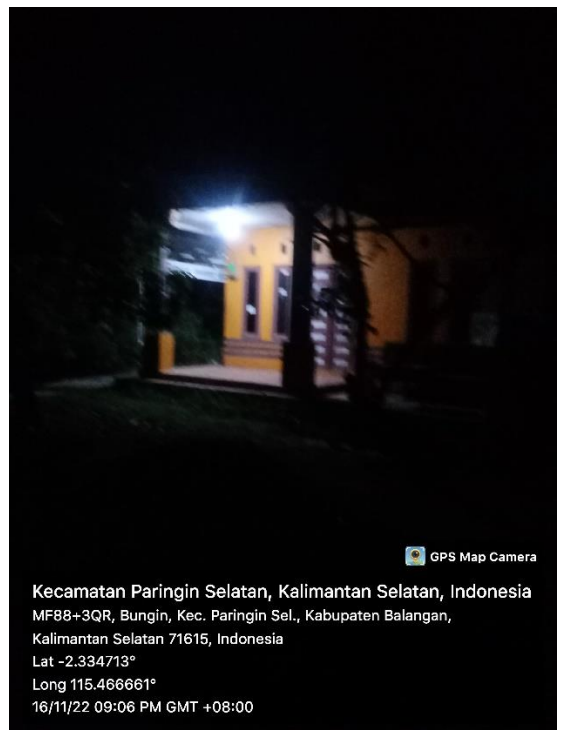
NAMA SUBJEK PAJAK	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH LANTAI	TAHUN DIBANGUN	TAHUN DIRENOVASI	DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	ATAS	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT	HARGA BANGUNAN PASAR (Rp)	Harga Bangunan Per Meter (Rp)
BAHARSYAH										120.000.000	1.000.000
Akhmad Nor Azmi	72	1	2011		2200	2	2	2	2		-
Rusdiawati	36	1	2011		900	3	3	2	2		-
SATRIO ADI NUGROHO	36	1	2011		2200	2	2	2	2		-
SULAIMAN	140	1	2002	2016	900	5	2	2	2	190.000.000	1.357.143
HERY SUPIANOR	96	1	2016	2020	900	5	2	2	2	180.000.000	1.875.000
SUTARDI	140	1	2004	2019	900	5	2	2	2	160.000.000	1.142.857
FADILLAH	96	1	2006	2022	900	5	2	2	2	160.000.000	1.666.667
SUGENG PRAYETNO	96	1	2004	2017	900	5	2	2	2	165.000.000	1.718.750
SUNARDI	96	1	2002	2014	900	5	2	2	2	170.000.000	1.770.833
HENDRE	96	1	2003	2021	900	5	2	2	2	170.000.000	1.770.833
BASUNI	96	2	2001	2017	900	5	2	2	2	115.000.000	1.197.917
MARSENI S LESA WANGE	150	1	2015	2015	1300	5	2	2	2	140.000.000	933.333
AMRULLAH	260				900	5	4	4	3		-
FAKHRIADI	150	1	2016	2022	1200	5	2	2	2	120.000.000	800.000

Lampiran 3. Dokumentasi Hasil Survey

Kelurahan Batu Piring









Kecamatan Paringin Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia
MF88+3QR, Bungin, Kec. Paringin Sel., Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan 71615, Indonesia
Lat -2.334713°
Long 115.466661°
16/11/22 09:14 PM GMT +08:00



Kecamatan Paringin Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia
MF88+3QR, Bungin, Kec. Paringin Sel., Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan 71615, Indonesia
Lat -2.334713°
Long 115.466661°
16/11/22 09:01 PM GMT +08:00

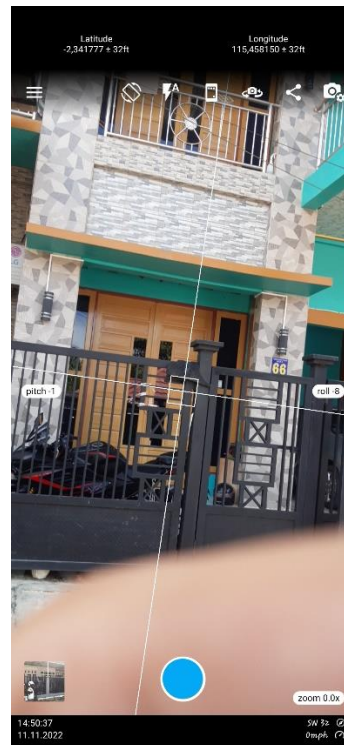


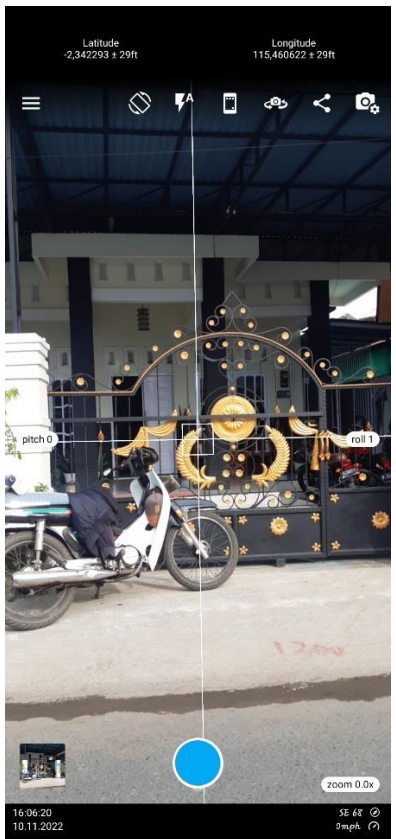
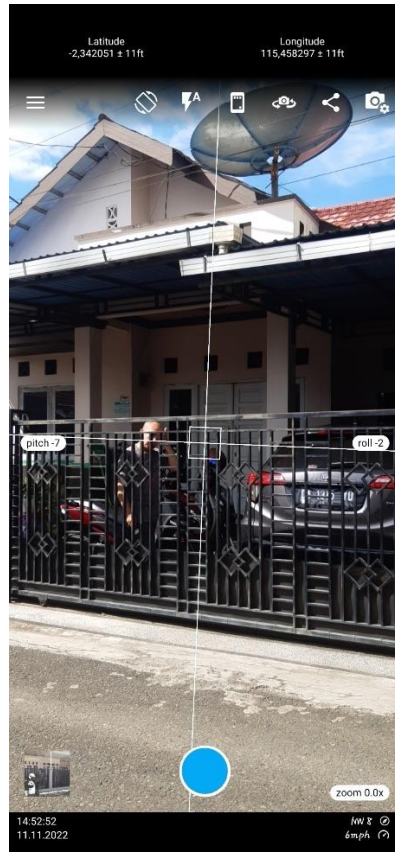
Kecamatan Paringin Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia
MF88+3QR, Bungin, Kec. Paringin Sel., Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan 71615, Indonesia
Lat -2.334713°
Long 115.466661°
16/11/22 09:04 PM GMT +08:00



Kecamatan Paringin Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia
MF88+3QR, Bungin, Kec. Paringin Sel., Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan 71615, Indonesia
Lat -2.334713°
Long 115.466661°
16/11/22 09:15 PM GMT +08:00

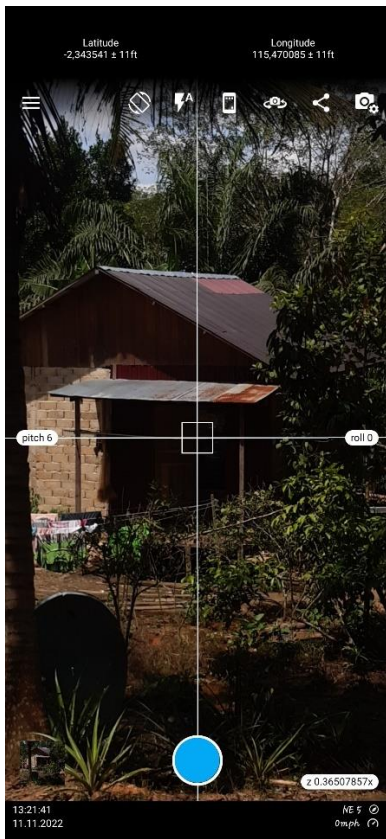














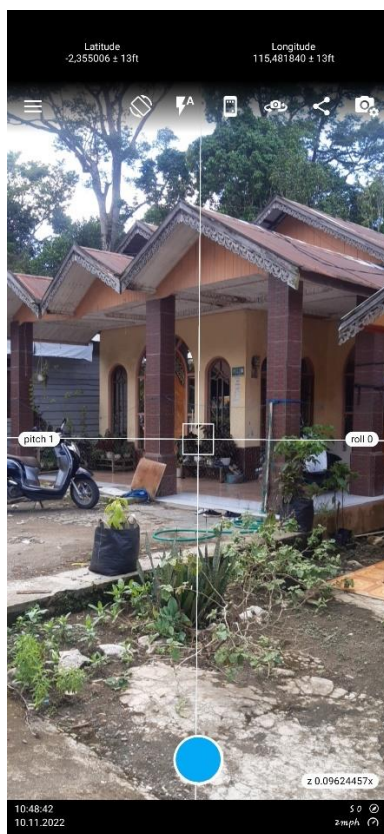




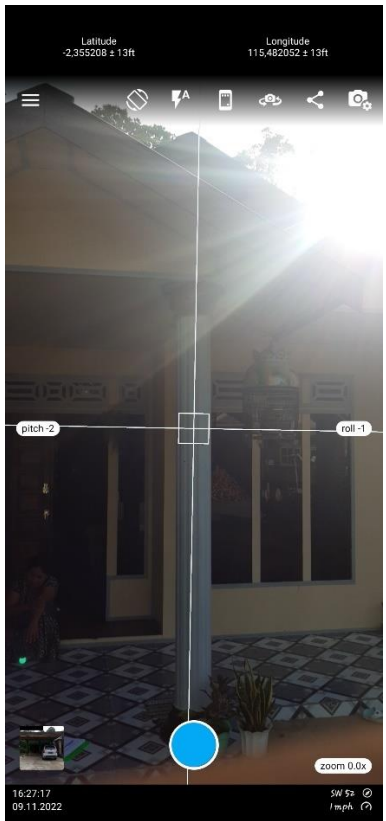


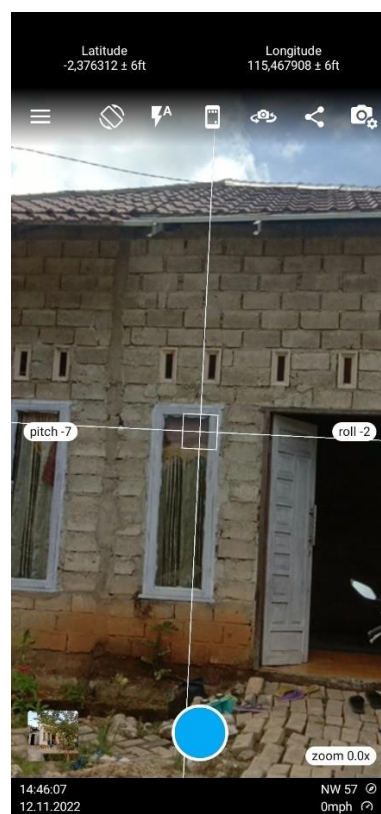
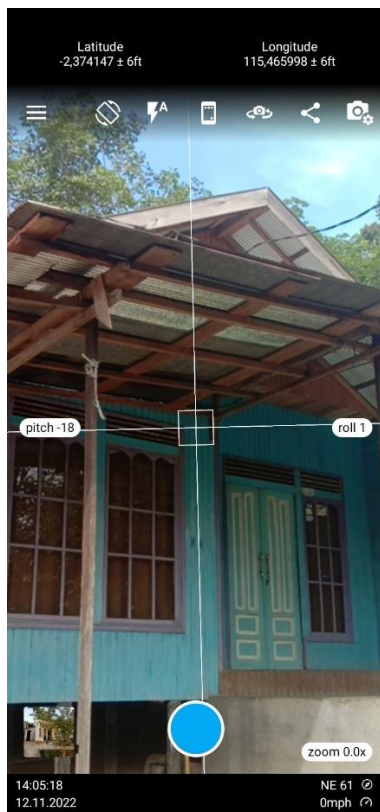


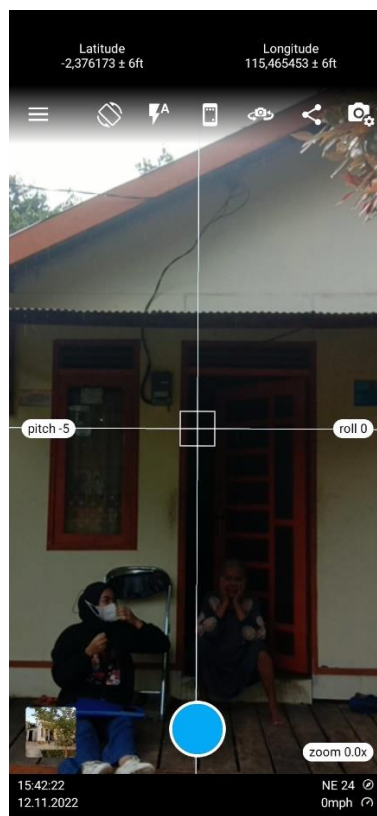


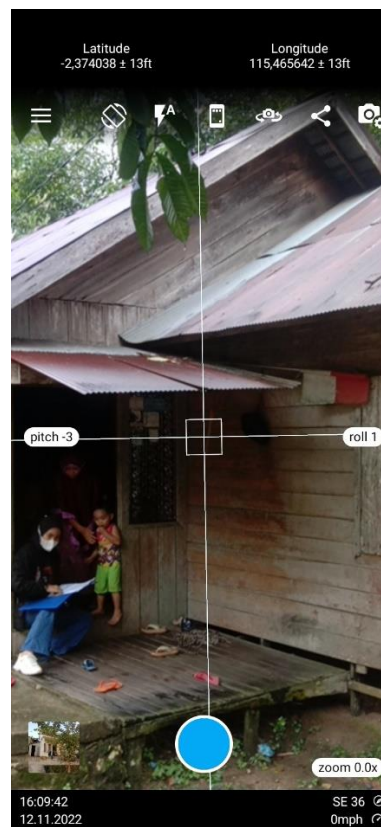
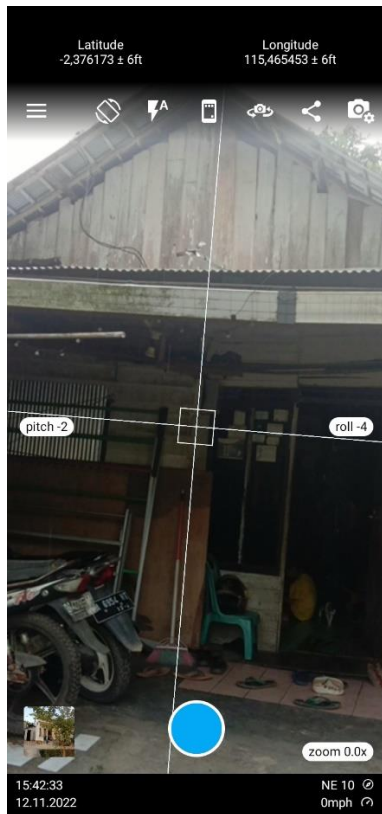


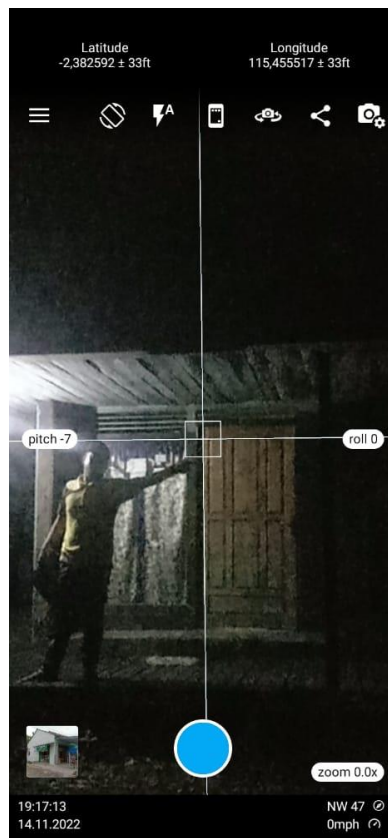






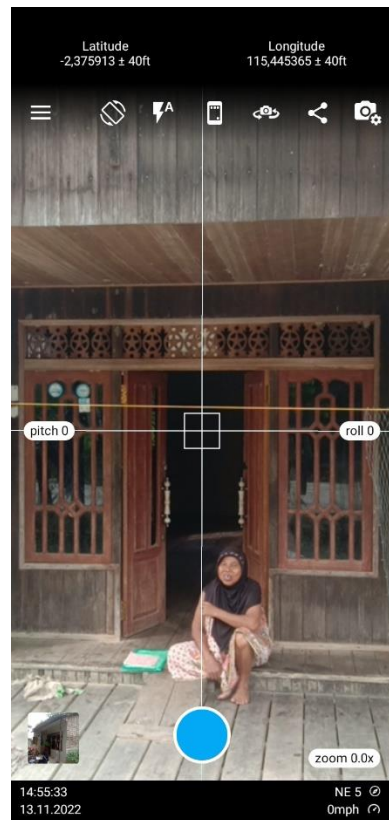
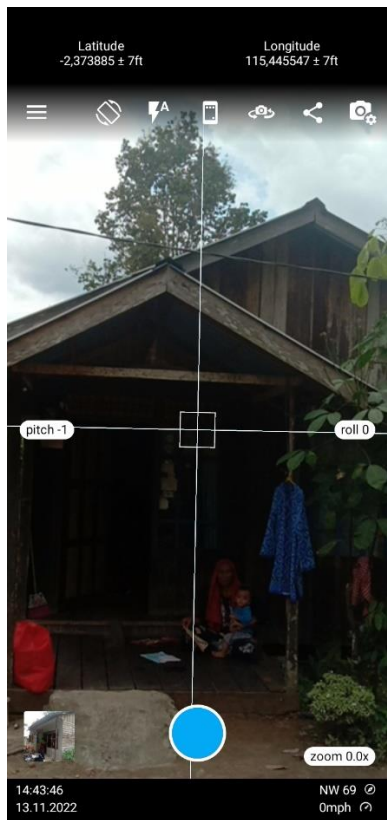
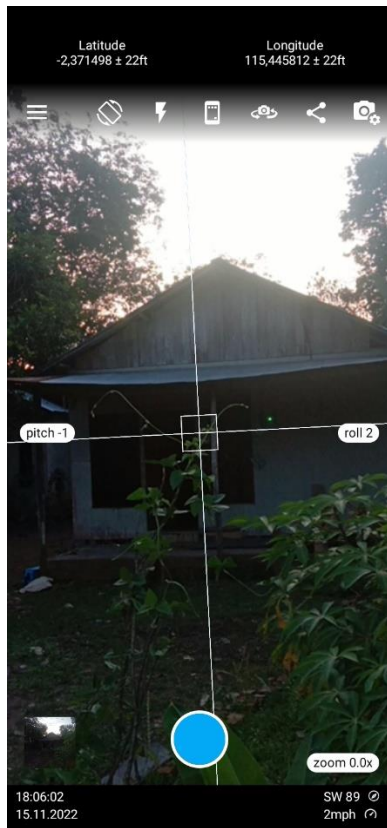


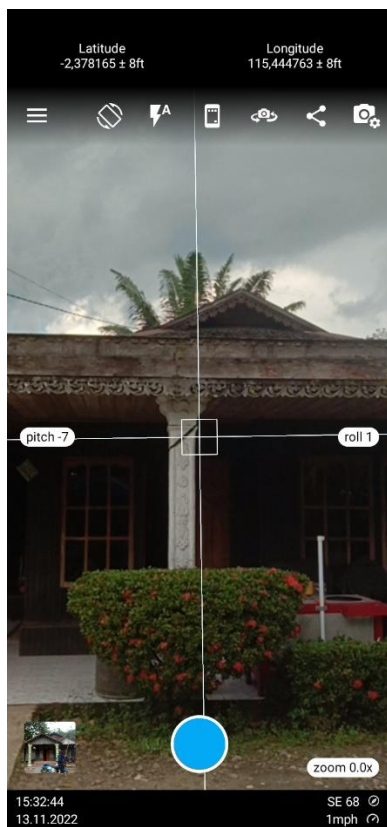
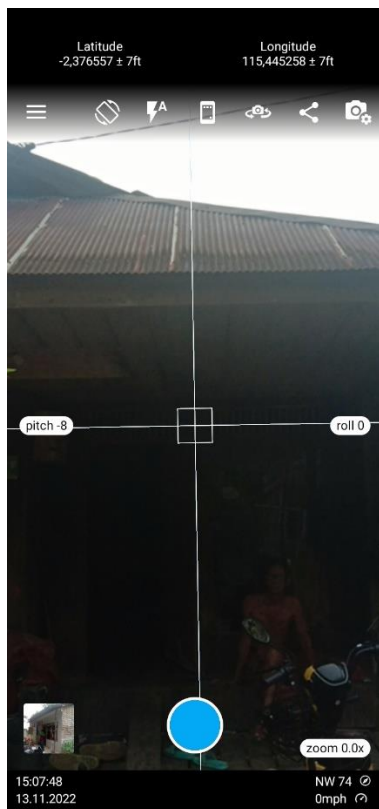


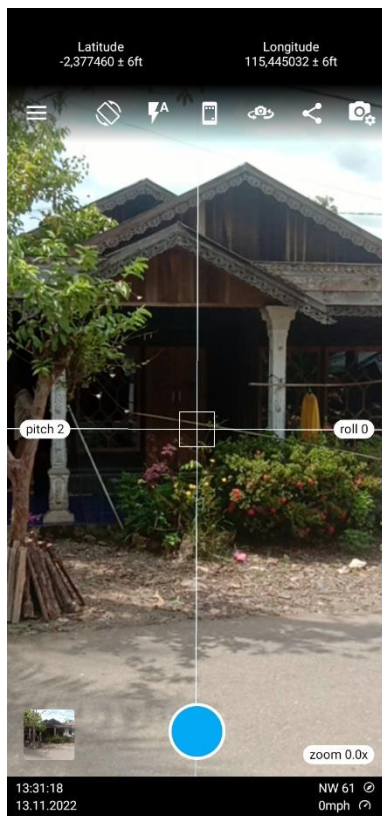


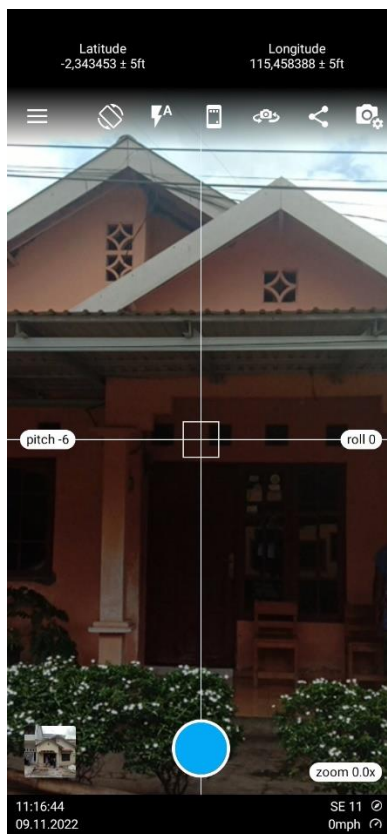


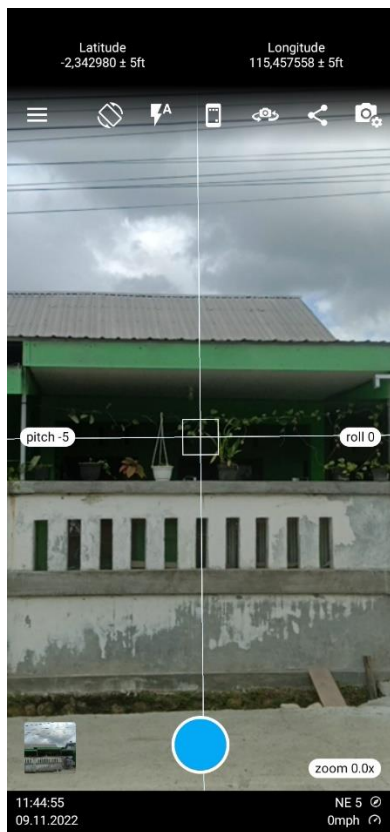


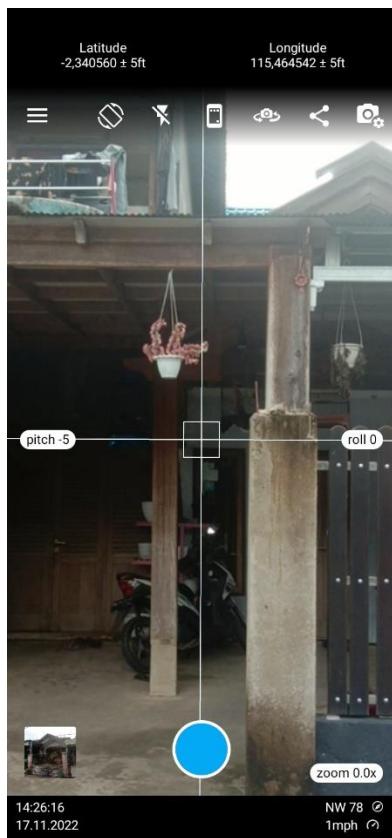


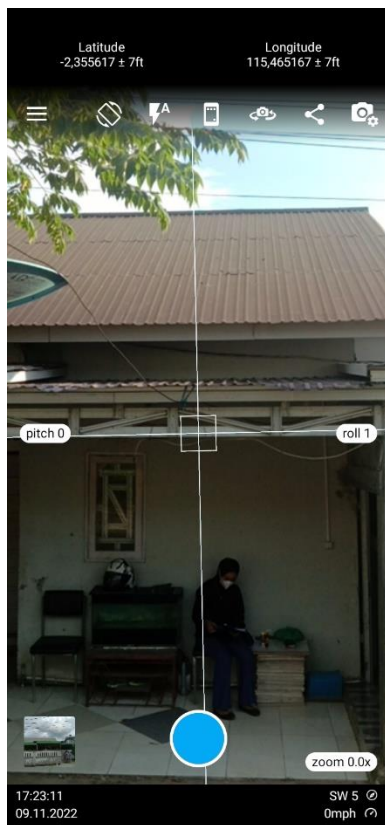






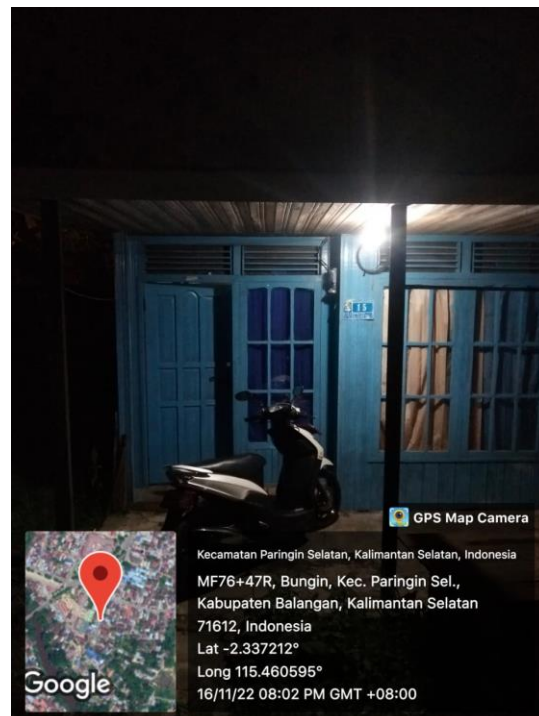
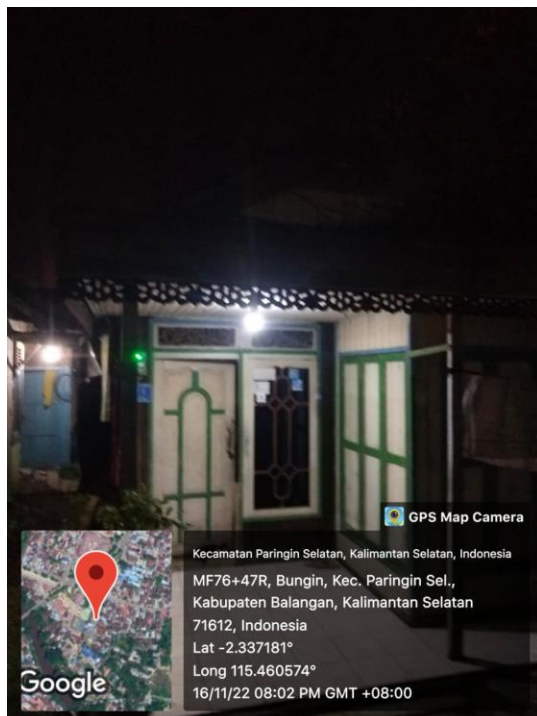


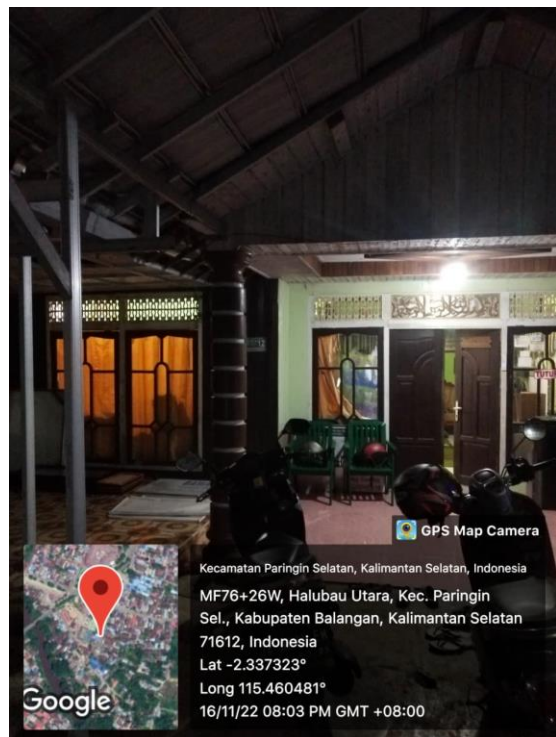
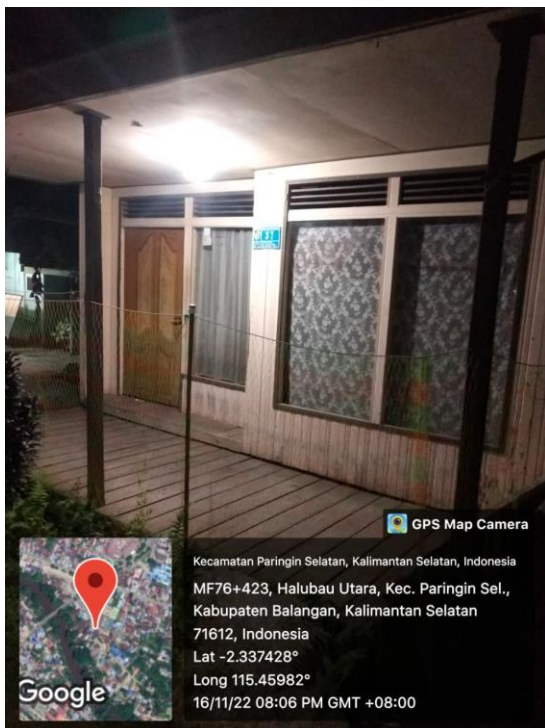
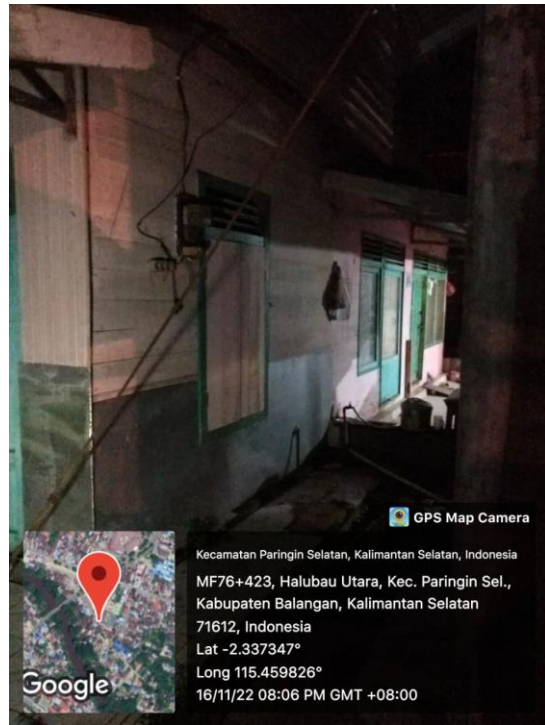
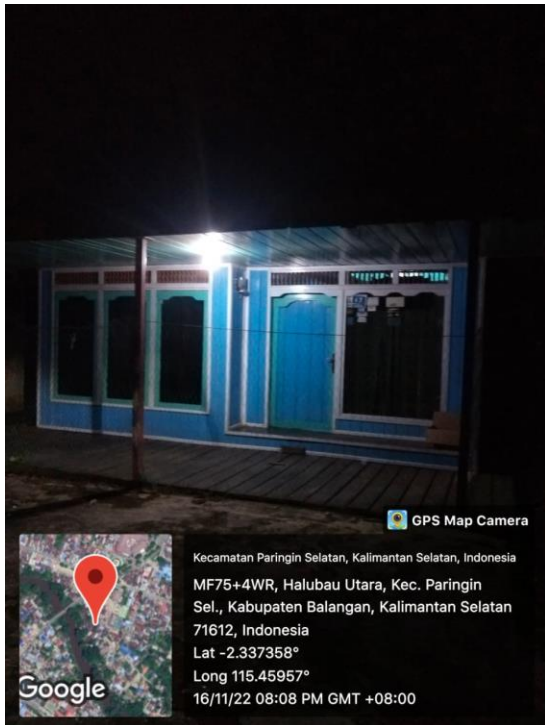


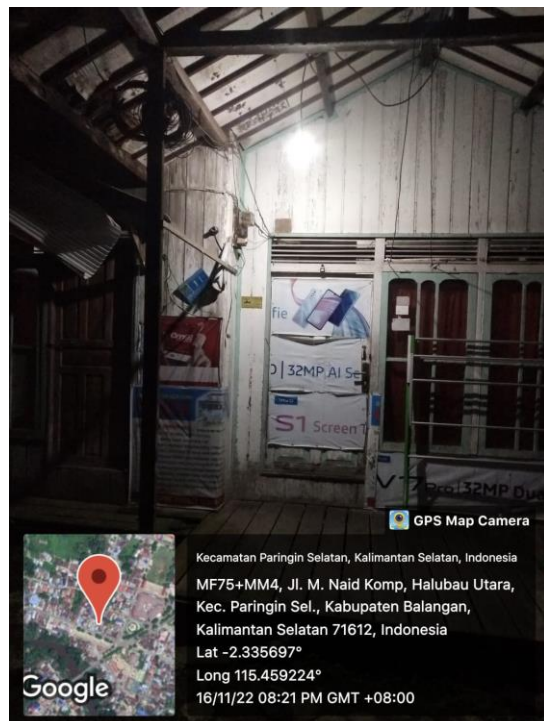


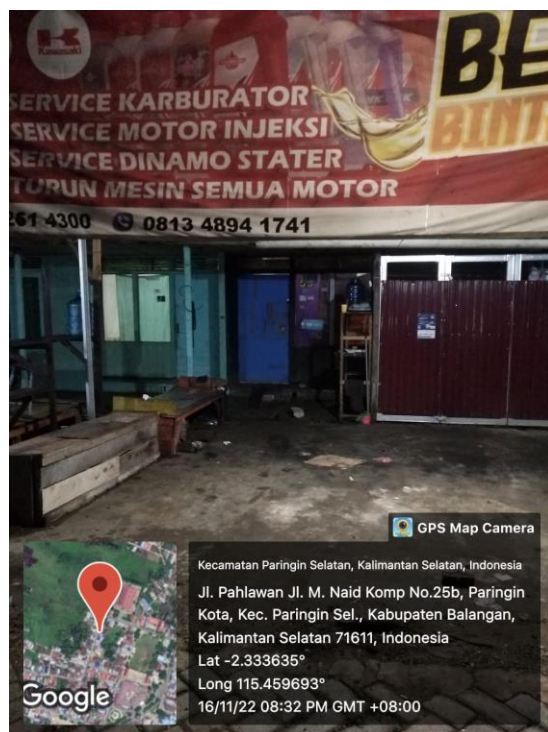
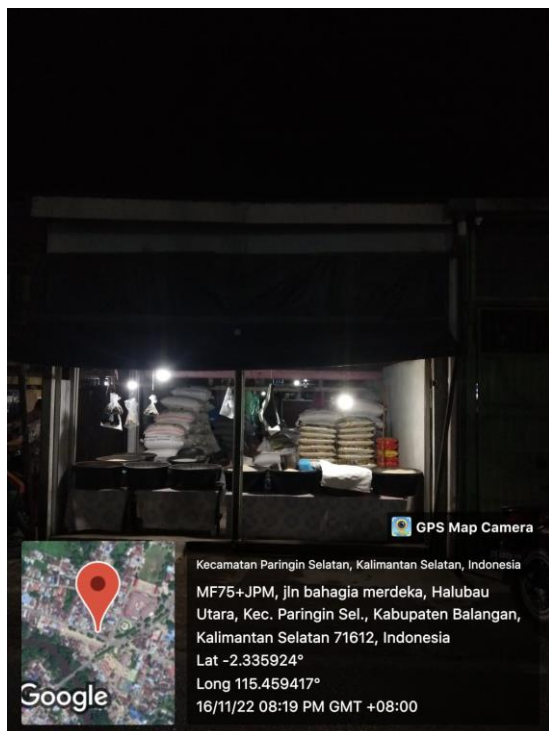


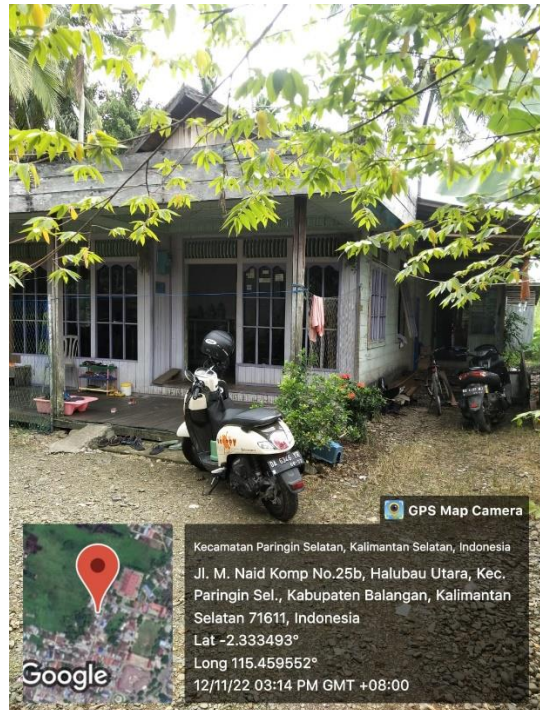
Kelurahan Paringin Kota

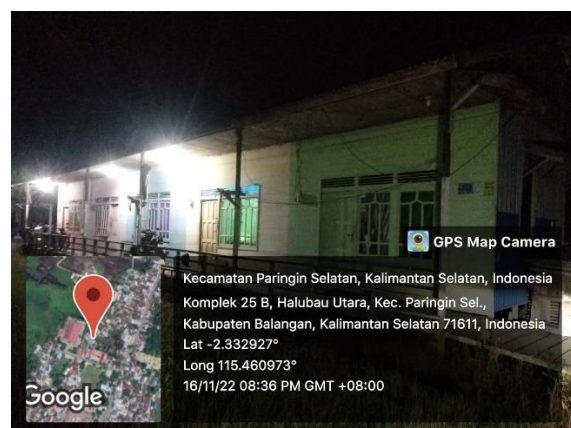
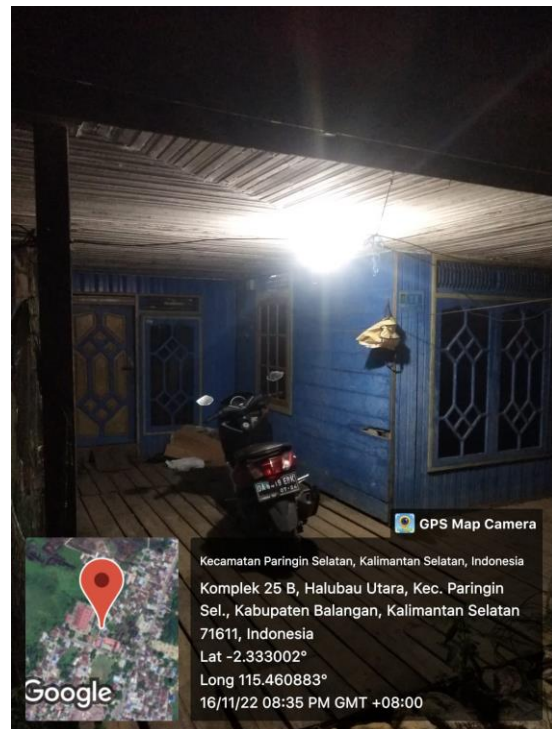


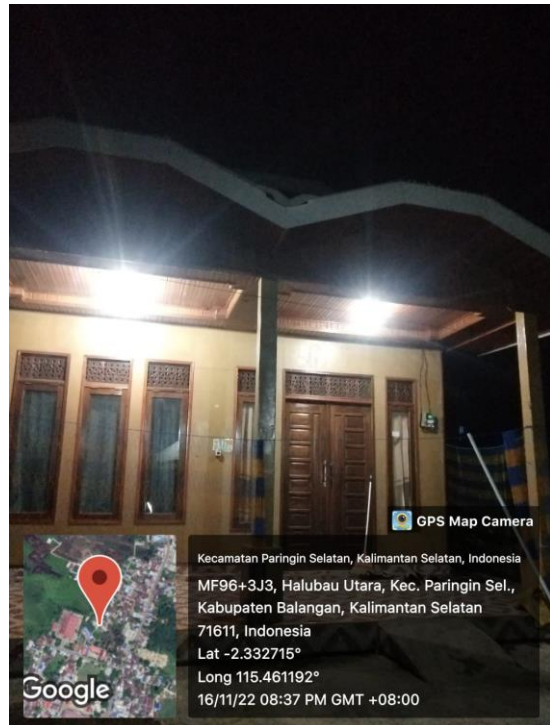


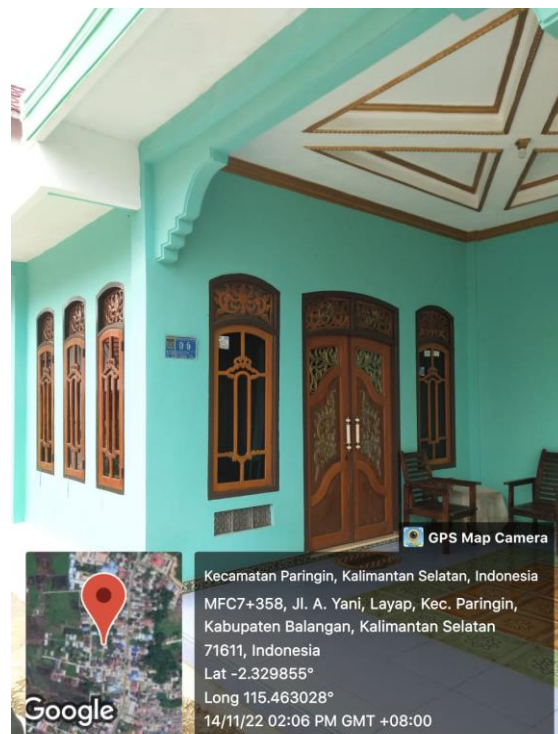


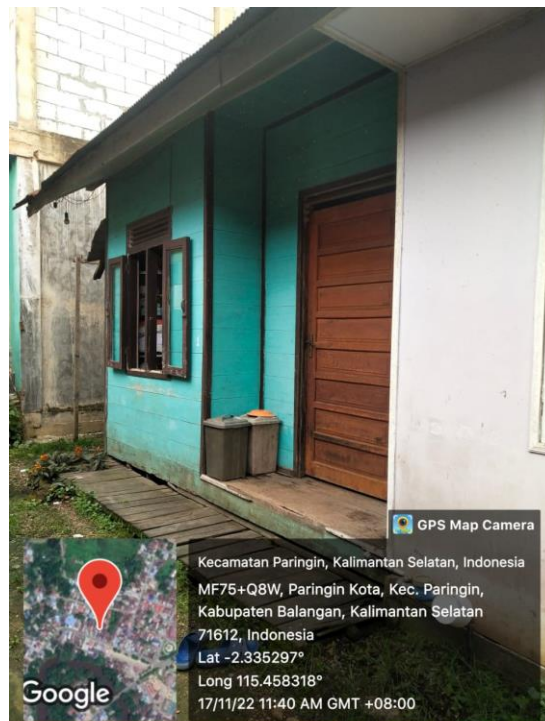
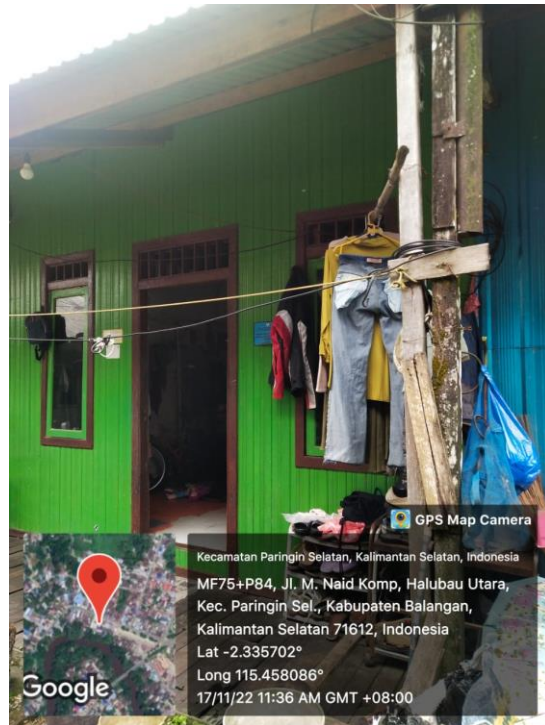


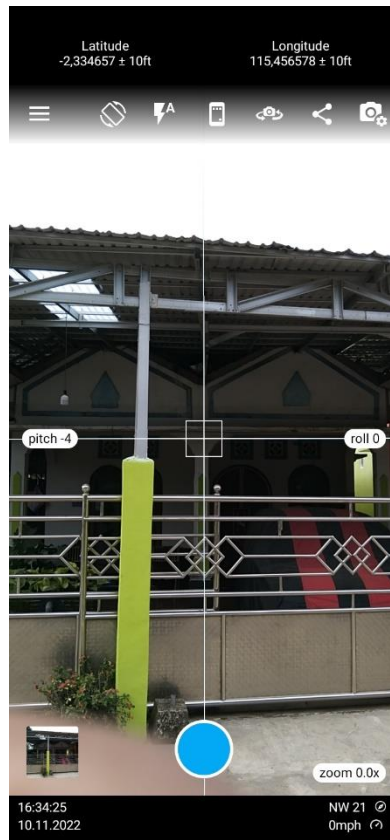




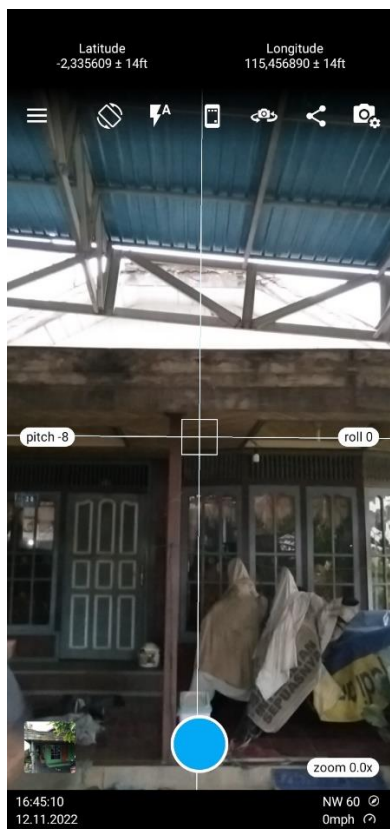




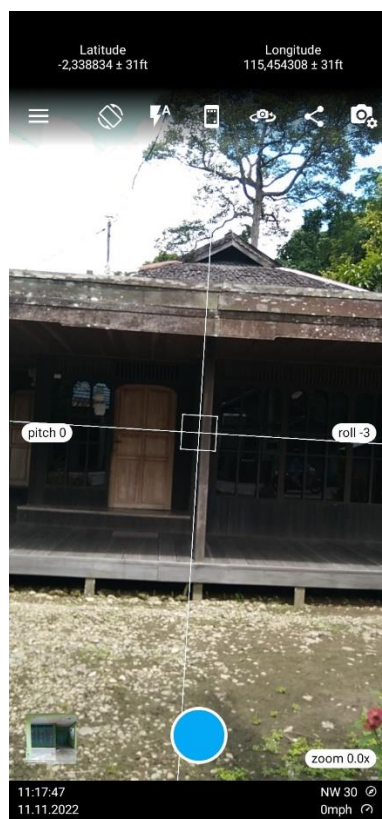


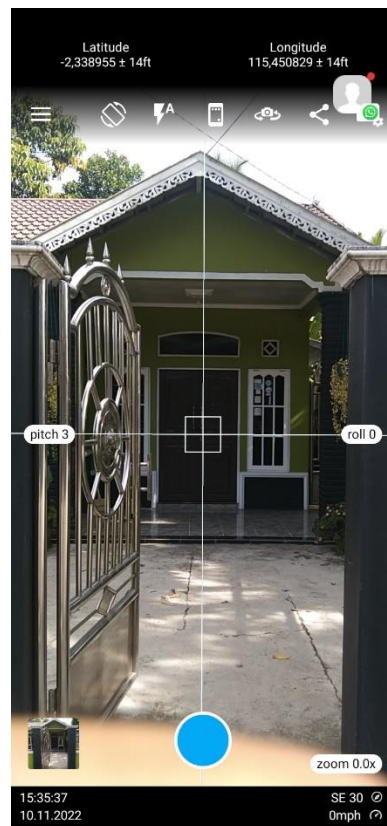




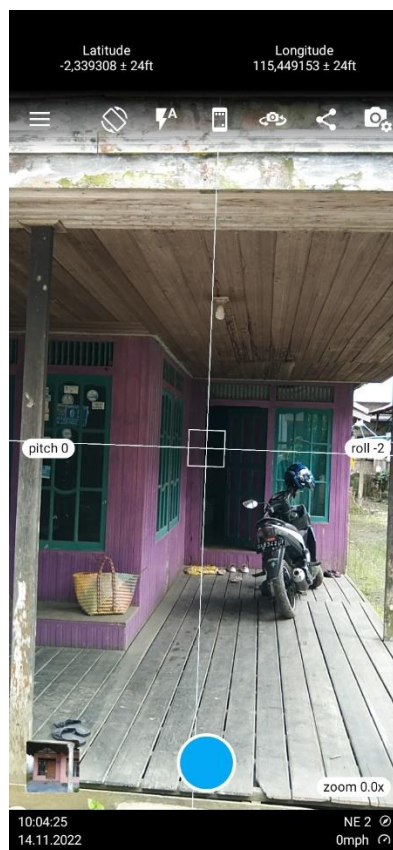




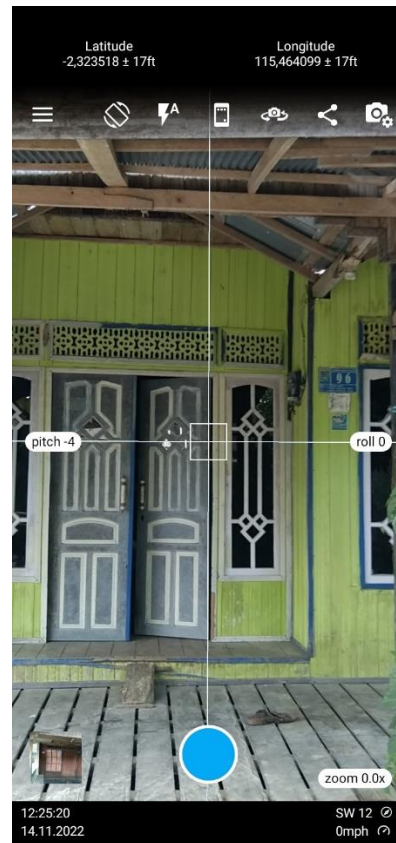












Kelurahan Paringin Timur



